



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

**LAPORAN
AKSI KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN
PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
(PPPS) SEMESTER II**

**KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Semester II Tahun 2025 di Kabupaten Pasuruan dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan akuntabel. Laporan ini disusun sebagai manifestasi tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengawal agenda prioritas nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kami menyadari sepenuhnya bahwa upaya penanggulangan *stunting* bukan sekadar program kesehatan semata, melainkan sebuah investasi kemanusiaan jangka panjang yang sangat fundamental untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan produktif demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Dokumen Laporan Semester II ini memiliki urgensi yang sangat strategis karena memotret dinamika pelaksanaan program pada fase krusial di akhir tahun anggaran 2025, khususnya periode Juli sampai dengan Desember. Pada semester ini, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan kinerja penurunan prevalensi secara riil di lapangan, di tengah adanya disparitas data survei makro. Melalui laporan ini, kami menyajikan analisis mendalam berbasis bukti (*evidence-based*) yang bersumber dari hasil pengukuran Bulan Timbang Agustus 2025 melalui E-PPGBM, yang menunjukkan tren penurunan positif dan konsisten. Selain itu, laporan ini juga menjadi rekam jejak atas prestasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang berhasil memperoleh alokasi Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan bukti nyata apresiasi pemerintah pusat atas kinerja daerah, sekaligus menjadi amunisi tambahan untuk memperluas cakupan layanan bagi keluarga berisiko *stunting*.

Secara substansial, laporan ini menguraikan secara komprehensif mengenai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi, yang mencakup analisis situasi terkini, capaian indikator layanan intervensi spesifik dan sensitif, kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga realisasi penyerapan anggaran dari berbagai sumber pendanaan. Kami juga menyertakan hasil identifikasi kendala dan

pembelajaran (*lesson learned*) selama pelaksanaan program di Semester II, serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut yang konstruktif untuk perencanaan tahun 2026, termasuk penetapan lokasi fokus (Lokus) intervensi lanjutan. Seluruh data dan informasi yang tertuang dalam dokumen ini diharapkan dapat menjadi rujukan valid bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Keberhasilan penyusunan laporan ini, serta capaian kinerja penurunan *stunting* di Kabupaten Pasuruan, tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, dan sinergitas yang solid dari seluruh elemen *Pentaphelix*. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Pasuruan atas arahannya, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Tim Penggerak PKK, organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, serta garda terdepan kami yakni para Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang telah berjuang tanpa lelah di lini lapangan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan kinerja TPPS Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang. Semoga ikhtiar kolektif kita dalam membebaskan generasi penerus Kabupaten Pasuruan dari jerat *stunting* senantiasa mendapatkan kemudahan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pasuruan, 31 Desember 2025

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.



DAFTAR ISI

PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	7
A. Dasar Hukum Tingkat Nasional.....	7
B. Dasar Hukum Tingkat Daerah.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan Program	8
A. Maksud	9
B. Tujuan	10
1.4. Sasaran Program.....	11
A. Remaja Putri (Rematri)	11
B. Calon Pengantin (Catin).....	12
C. Ibu Hamil (Bumil).....	12
D. Ibu Pasca Persalinan (Nifas)	12
E. Anak Usia 0 - 59 Bulan (Balita)	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	15
2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	15
2.2. Potensi Sumber Daya Daerah	17
F. Topografi	17
G. Geologi dan Jenis Tanah	22
H. Klimatologi.....	27
I. Penggunaan Lahan.....	28

J. Potensi Pengembangan Wilayah	29
2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	38
A. Daya Dukung Air	38
B. Daya Dukung Pangan	40
2.4. Ketahanan Energi	41
2.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	43
2.6. Kawasan Rawan bencana dan Perubahan Iklim.....	46
2.7. Demografi	54
A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	54
B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	56
C. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan	59
D. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan	64
E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan.....	66
F. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut	68
G. Proyeksi Demografi	70
2.1. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.....	75
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	75
B. Indeks/Rasio Gini.....	78
C. Angka Kemiskinan.....	79
D. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	82
E. PDRB Perkapita.....	84
F. Indeks Pembangunan Manusia.....	85
BAB III Capaian Kinerja dan Hasil Pelaksanaan	89
3.1. Perkembangan Angka Prevalensi Stunting.....	91
A. Analisis Komparatif Data SSGI dan E-PPGBM.....	92
B. Tren Penurunan Stunting Berdasarkan Bulan Timbang	93
3.2. Capaian Indikator Intervensi Spesifik (Sektor Kesehatan)	94
A. Pelayanan Kesehatan Remaja Putri	95

B. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Nifas	97
C. Pelayanan Kesehatan Balita	98
3.3. Capaian Indikator Intervensi Sensitif (Lintas Sektor)	100
A. Pelayanan dan Pendampingan Calon Pengantin (Catin)	100
B. Dukungan Sanitasi dan Lingkungan Hidup	101
C. Penguatan Pola Asuh dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	102
3.4. Kinerja Tim Pendamping keluarga (TPK)	103
A. Konsolidasi Kekuatan Personil dan Sinergitas Peran	104
B. Efektivitas Pendampingan Berbasis Aplikasi Elsimil	104
C. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Insentif Kinerja	105
3.5. Realisasi Kinerja Keuangan dan Pemanfaatan Insentif Fiskal	106
3.6. Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>) Indikator Kinerja	109
BAB IV KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT	111
4.1. Identifikasi Kendala dan Permasalahan	111
A. Residu Sasaran Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Nifas	111
B. Disparitas Data Skrining Remaja Putri di Hulu	112
C. Tekanan Akselerasi Serapan Anggaran	113
4.2. Rencana Tindak Lanjut (RTL)	113
A. Operasi Sisir Sasaran (Sweeping) dan Intervensi Presisi	113
B. Eskalasi Penanganan Gizi pada Kelompok Risiko Tinggi	114
C. Percepatan Eksekusi Keuangan	115
4.3. Penetapan Wilayah Prioritas (Lokus) Kecamatan Intervensi Tahun 2026	115
BAB V PENUTUP	118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Rekomendasi	120

DAFTAR TABEL

2.1	Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya.....	15
2.2	Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya.....	20
2.3	Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan	23
2.4	Iklim Kabupaten Pasuruan.....	27
2.5	Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan	25
2.6	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2024	57
2.7	Persebaran Penduduk Tahun 2020-2024.....	59
2.8	Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2024.....	61
2.9	Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021-2024.....	63
2.10	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	65
2.11	Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan	66
2.12	Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	67
2.13	Persentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	68
2.14	Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	69
2.15	Persentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	70
2.16	Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2030.....	72
2.17	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030 ..	73
2.18	Perkembangan Kemiskinan Tahun 2020-2024	61
2.19	Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2017-2021 (SP2010).....	85
2.20	Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2022-2024 (SP2020).....	86
3.1	Alokasi Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal Stunting.....	106
3.2	Sebaran Wilayah Lokus Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.....	116

DAFTAR GAMBAR

1.1 Hasil Survei RISKESDAS SKI.....	3
1.2 Hasil Survei Status Gizi Indonesia	4
1.3 E-PPGBM Bulan Agustus	6
2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan	17
2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian	19
2.3 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan	28
2.4 Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan	37
2.5 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029	39
2.6 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029	40
2.7 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kab. Pasuruan Tahun 2020-2024 ...	43
2.8 Kualitas Lahan dan Indeks LH Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	44
2.9 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	50
2.10 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	52
2.11 Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahun 2020-2024	54
2.12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	55
2.13 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	58
2.14 Ekonomi Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	77
2.15 Indeks Gini Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024..	79
2.16 Kemiskinan Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .	81
2.17 TPT Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	83
2.18 IPM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ...	88
3.1 Roda Aksi Konvergensi.....	89
3.2 Perbandingan SSGI dan E-PPGBM.....	91
3.3 Tren Prevalensi Stunting Berdasarkan E-PPGBM Tahun 2019-2025	93
3.4 Grafik Tren Kepatuhan Konsumsi TTD Rematri Semester I, Semester II ..	96
3.5 Konseptual Alur Berpikir.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting atau kerdil didefinisikan secara medis sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) yang diakibatkan oleh akumulasi kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial yang memadai dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini terutama terjadi pada periode emas pertumbuhan yang dikenal sebagai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni fase krusial sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. Secara antropometri, manifestasi fisik utama stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada di bawah standar deviasi minus dua (-2 SD) dari standar median pertumbuhan anak seusianya yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) *Child Growth Standards*. Namun, permasalahan stunting sejatinya bersifat multidimensional dan jauh lebih kompleks daripada sekadar indikator fisik semata. Dampak yang paling mengkhawatirkan dan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan) adalah terhambatnya sinapsis sel-sel otak yang berujung pada penurunan kemampuan kognitif, motorik, dan verbal anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini berimplikasi serius terhadap rendahnya prestasi pendidikan, meningkatnya risiko penyakit degeneratif atau tidak menular (seperti diabetes, hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung) pada usia dewasa, serta menurunnya potensi produktivitas ekonomi individu yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting bukan hanya isu kesehatan, melainkan agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Identifikasi faktor determinan penyebab stunting menjadi langkah fundamental dalam merumuskan strategi intervensi yang presisi. Berdasarkan analisis situasi dan rujukan dokumen *Global Nutrition Report*, penyebab stunting di Kabupaten Pasuruan dapat dipetakan ke dalam beberapa faktor utama yang saling berkaitan, antara lain:

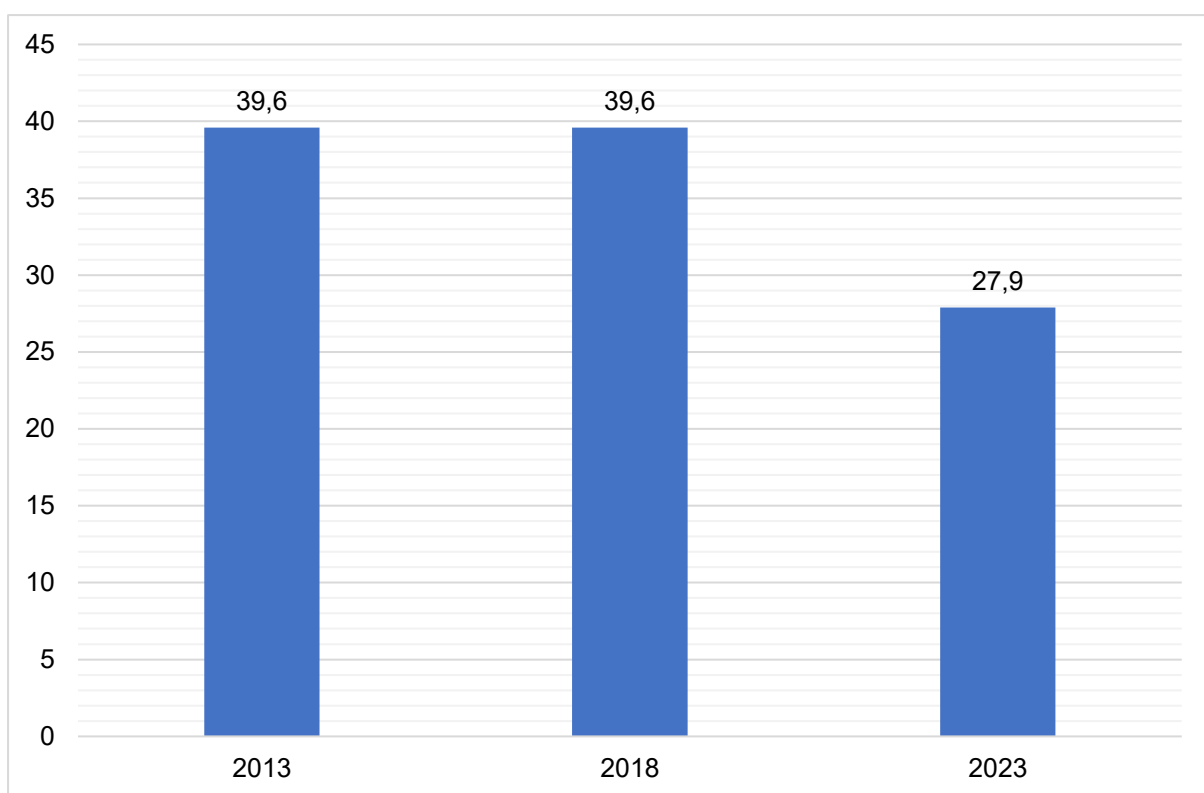
1. Kekurangan Asupan Gizi (Nutrient Intake): Asupan makanan yang tidak adekuat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas makronutrien dan

mikronutrien. Defisiensi protein hewani, zat besi, zink, dan vitamin A pada masa kehamilan ibu dan masa pertumbuhan balita (MP-ASI) menjadi kontributor utama kegagalan pertumbuhan jaringan tubuh.

2. Infeksi Penyakit Berulang: Tingginya prevalensi penyakit infeksi seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), diare kronis, dan kecacingan yang mengganggu proses absorpsi (penyerapan) nutrisi dalam tubuh anak. Kondisi sakit yang berulang menyebabkan energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dialihkan untuk pemulihan sistem imun.
3. Status Kesehatan Ibu (Maternal Health): Siklus stunting seringkali dimulai dari kondisi ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) dan Anemia. Ibu dengan status gizi buruk memiliki risiko tinggi melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan panjang badan lahir pendek, yang merupakan bibit utama terjadinya stunting.
4. Akses Sanitasi dan Air Bersih: Faktor lingkungan memegang peranan vital. Ketersediaan akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi layak (jamban sehat/ODF) sangat menentukan paparan patogen penyebab infeksi pada anak. Lingkungan yang tercemar menjadi media transmisi penyakit yang memperburuk status gizi.
5. Faktor Sosial Ekonomi dan Pola Asuh: Tingkat pendidikan orang tua, pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, serta daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA). Pola asuh yang kurang tepat seringkali ditemukan pada keluarga dengan keterbatasan akses informasi dan ekonomi.

Mengingat kompleksitas faktor penyebab tersebut, penanganan stunting menuntut tanggung jawab kolektif (*shared responsibility*) dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa melalui pendekatan Aksi Konvergensi yang terintegrasi. Dalam konteks pemantauan kinerja di Kabupaten Pasuruan pada Semester II Tahun 2025, evaluasi dilakukan dengan menyandingkan berbagai sumber data untuk mendapatkan potret yang utuh. Terdapat dinamika data prevalensi yang perlu dianalisis secara kritis dan objektif sebagai berikut:

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) / Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Survei ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dengan siklus lima tahunan untuk memotret indikator kesehatan masyarakat dalam skala makro. Data historis menunjukkan tren penurunan yang signifikan di Kabupaten Pasuruan; jika hasil RISKESDAS tahun 2018 mencatat angka prevalensi yang sangat tinggi yaitu 39,6%, hasil survei SKI terakhir pada tahun 2023 menunjukkan penurunan tajam dimana prevalensi Kabupaten Pasuruan berada di angka 27,9%. Penurunan lebih dari 10 digit persen dalam periode lima tahun ini mengindikasikan adanya perbaikan fundamental pada sistem pelayanan kesehatan dasar di daerah.

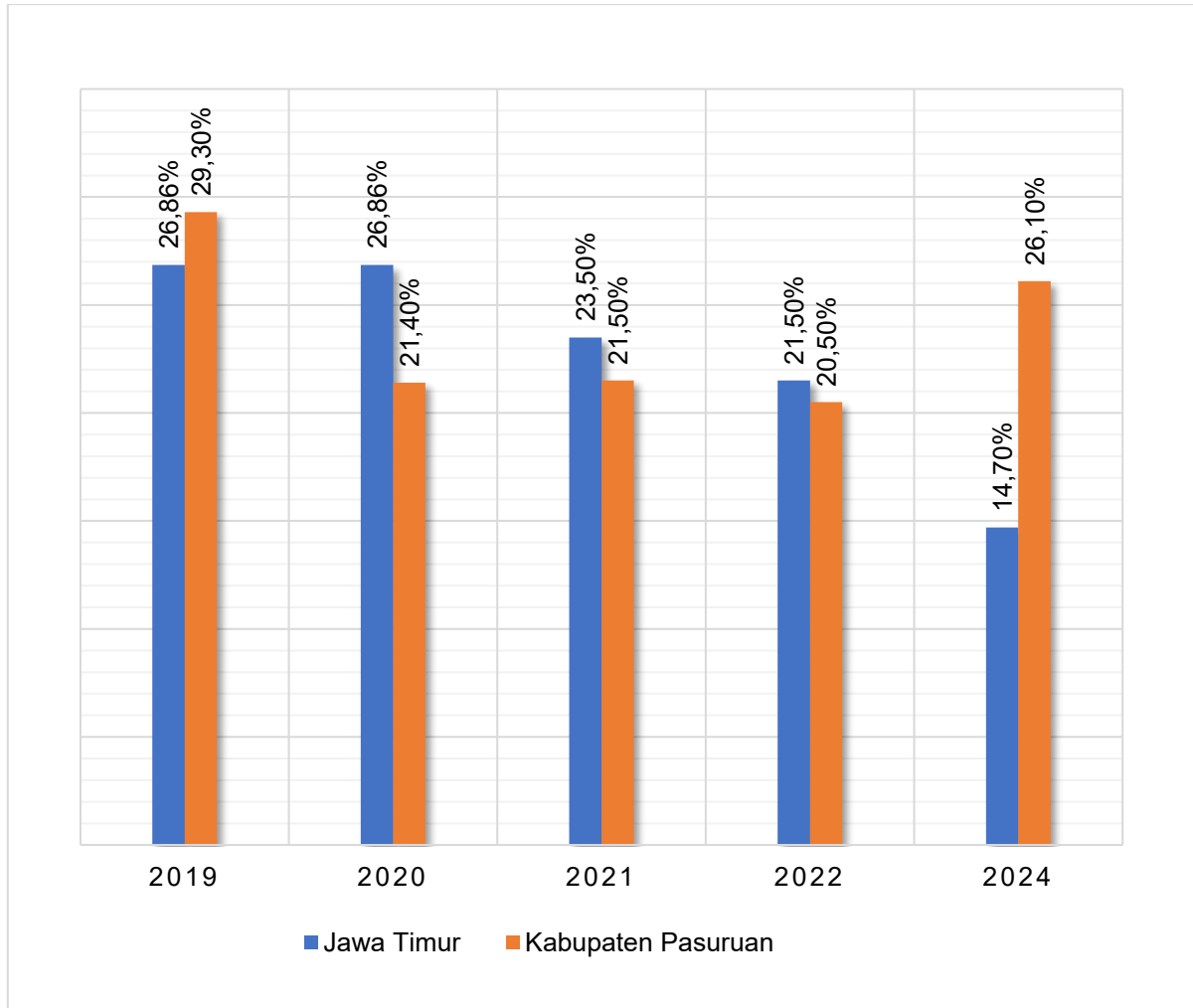


Gambar 1.1 Hasil Survei RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) SKI (Survei Kesehatan Indonesia)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Survei ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan dengan metode sampling blok sensus. Data SSGI bagi Kabupaten Pasuruan menunjukkan fluktuasi angka yang cukup dinamis dan menjadi tantangan tersendiri. Pada tahun 2021 prevalensi tercatat sebesar 21,50%, kemudian mengalami tren positif dengan penurunan pada tahun 2022 menjadi 20,50%. Namun,

berdasarkan rilis data SSGI tahun 2024, tercatat adanya kenaikan angka prevalensi menjadi 26,10%. Lonjakan angka survei ini menjadi anomali yang perlu disikapi dengan validasi data lapangan, mengingat metode survei memiliki *margin of error* dan keterbatasan sampel yang mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan intervensi masif yang telah dilakukan di seluruh desa/kelurahan.



Gambar 1.2 Hasil Survei Status Gizi Indonesia

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) hadir sebagai sumber data ketiga yang memegang peranan paling krusial karena sifatnya yang operasional, *real-time*, dan benar-benar merefleksikan hasil pengukuran riil di lapangan melalui sensus menyeluruh. Berbeda dengan metode sampling, sistem ini berfungsi sebagai instrumen pencatatan data sasaran balita yang sangat detail dengan prinsip *by name by address*. Data ini dikumpulkan secara rutin dan masif di

tingkat akar rumput, khususnya melalui Posyandu pada momentum Bulan Timbang yang dilaksanakan secara serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Karena pendekatannya yang bersifat sensus, E-PPGBM memiliki cakupan sasaran yang sangat luas mendekati 100% dari total populasi balita di suatu wilayah sehingga tingkat validitas dan akurasi untuk menentukan intervensi individu menjadi sangat tinggi dan tepat sasaran dibandingkan dengan data survei yang sering kali bias karena keterbatasan sampel.

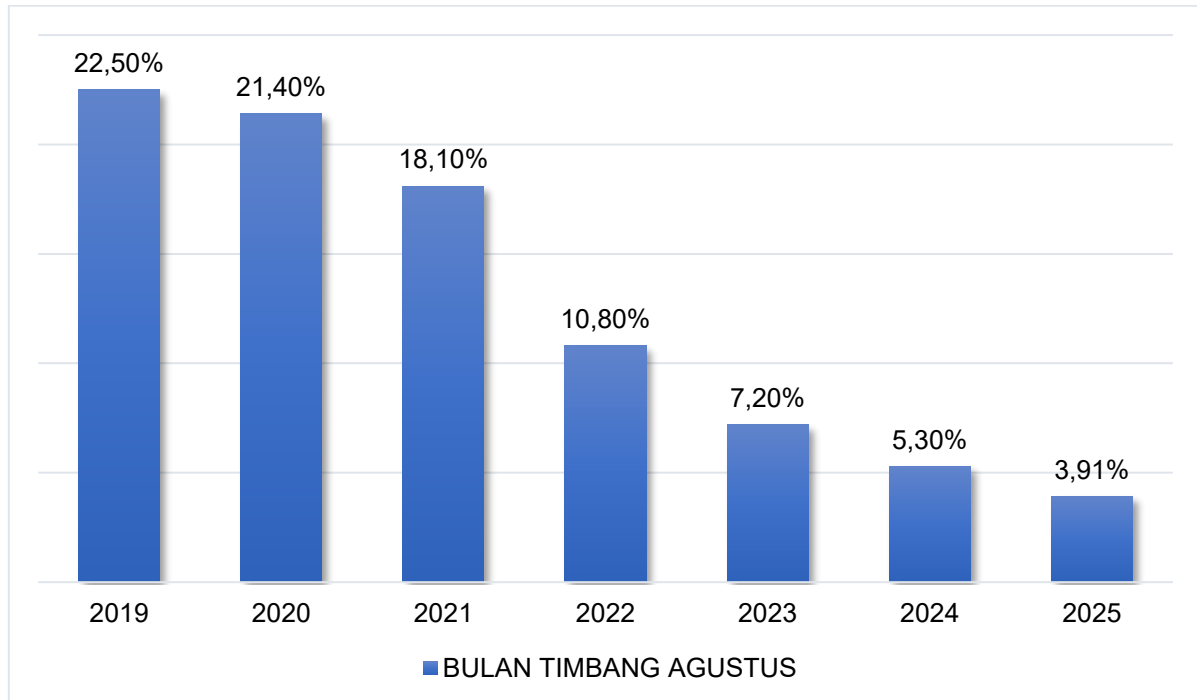
Analisis mendalam terhadap tren data E-PPGBM di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola konsistensi kinerja penanganan stunting yang jauh lebih meyakinkan dan terukur jika dibandingkan dengan fluktuasi data survei yang sering kali tidak stabil. Rekam jejak data historis memperlihatkan dinamika upaya penurunan angka stunting di daerah ini:

- Pada tahun 2019, prevalensi tercatat sebesar 29,30%, yang menjadi titik awal evaluasi.
- Terjadi penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi 21,40%.
- Angka ini relatif stabil pada tahun 2021 di posisi 21,50%.
- Penurunan kembali terjadi pada tahun 2022 menjadi 20,50%.
- Meskipun sempat tercatat kenaikan pada tahun 2023 menjadi 26,10%, data ini memberikan transparansi yang diperlukan untuk evaluasi program.

Pencapaian Signifikan Tahun 2025 Puncak keberhasilan dari berbagai intervensi spesifik dan sensitif yang dilakukan pemerintah daerah terlihat sangat nyata pada data tahun 2025. Berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran Bulan Timbang pada Agustus 2025, partisipasi masyarakat sangat tinggi dengan total sasaran balita yang diukur mencapai 101.252 balita. Dari jumlah populasi balita yang sangat besar tersebut, ditemukan jumlah balita stunting hanya sebanyak 3.962 anak.

Dengan demikian, angka prevalensi stunting Kabupaten Pasuruan pada Semester II Tahun 2025 berhasil ditekan secara drastis hingga tercatat sebesar 3,91%. Pencapaian angka di bawah 4% ini merupakan prestasi luar biasa karena nilainya jauh melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 14%. Hal ini

membuktikan bahwa efektivitas program daerah yang berbasis data E-PPGBM telah berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi perbaikan status gizi masyarakat.



Gambar 1.3 Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Bulan Agustus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Mendasari data prevalensi yang dinamis tersebut, serta menyadari dampak jangka panjang stunting terhadap kualitas sumber daya manusia, maka Prevalensi Stunting telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan. Dalam kerangka strategis tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerapkan 8 Aksi Konvergensi sebagai instrumen fundamental pembinaan.

Laporan Aksi Konvergensi Semester II Tahun 2025 ini disusun secara sistematis untuk melaporkan implementasi instrumen tersebut. Terlebih lagi, pada tahun anggaran 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil mencatatkan prestasi dengan diterimanya Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Penurunan Stunting dengan total alokasi sebesar Rp 7.147.236.000,-. Dana ini dialokasikan secara terpadu melalui Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup,

dan DP3AP2KB untuk akselerasi intervensi. Oleh karena itu, laporan ini menjadi dokumen vital untuk mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pasuruan bebas stunting.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) di Kabupaten Pasuruan didasarkan pada kerangka regulasi yang komprehensif, hierarkis, dan mengikat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Landasan hukum ini menjadi fondasi legitimasi, pengorganisasian, tata kelola, serta penganggaran seluruh intervensi spesifik maupun sensitif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Adapun regulasi yang menjadi acuan utama pelaksanaan program pada Semester II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Tingkat Nasional

Regulasi tingkat nasional menjadi pedoman strategis dalam penyelarasan target dan indikator kinerja daerah, yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menetapkan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting sebagai rujukan utama konvergensi pusat dan daerah.
3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2024.
4. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.7/1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025, perihal Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) di Daerah.

B. Dasar Hukum Tingkat Daerah

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan serangkaian Peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Keputusan (SK) Bupati yang menjadi landasan operasional teknis pelaksanaan Aksi Konvergensi, sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 130 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pasuruan.
2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadari Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera.
3. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 050/279/Hk/424.013/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Tim Teknis Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Pasuruan.
4. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 050/280/Hk/424.013/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penetapan Prioritas Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Pasuruan.
5. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 050/563/Hk/424.013/2021 Tanggal 9 Juni 2021 Tentang Prioritas Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.
6. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/548/HK/424.013/2025 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan Periode 2025-2029.
7. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/884/HK/424.013/2025 Tentang Tim Operator, Verifikator, dan Approver Website Aksi Konvergensi Dalam Upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan Program

Penyusunan Laporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Semester II Tahun 2025 ini tidak hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif rutin, melainkan dirancang dengan kerangka berpikir yang sistematis dan

strategis untuk memenuhi aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Adapun penjabaran secara rinci mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

A. Maksud

Maksud utama dari penyusunan laporan ini adalah untuk menyajikan potret kinerja yang komprehensif, faktual, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai seluruh rangkaian pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan selama periode semester kedua, terhitung mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2025. Dokumen ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), khususnya dalam aspek transparansi publik dan akuntabilitas kinerja. Secara lebih spesifik, laporan ini dimaksudkan sebagai:

1. Instrumen Kendali Manajemen (*Management Control System*): Laporan ini berfungsi sebagai alat bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, khususnya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), untuk memantau (*monitoring*) dan mengendalikan (*controlling*) kemajuan pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi. Melalui laporan ini, pimpinan daerah dapat mendeteksi secara dini apakah intervensi yang berjalan masih *on-track* (sesuai jalur) atau memerlukan koreksi strategis.
2. Media Pelaporan Berjenjang: Dokumen ini merupakan media pelaporan resmi TPPS Kabupaten kepada Bupati Pasuruan selaku pengarah, serta sebagai bahan laporan kinerja Pemerintah Daerah kepada Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara target prioritas nasional dengan eksekusi program di tingkat daerah.
3. Rekam Jejak Kinerja (*Performance Tracking*): Laporan ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan seluruh daya upaya, inovasi, dan praktik baik (*best practices*) yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, hingga Pemerintah Desa dalam menanggulangi stunting, sehingga menjadi aset pengetahuan (*knowledge management*) bagi organisasi.

B. Tujuan

Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai melalui penyusunan laporan ini meliputi aspek evaluasi, analisis, dan proyeksi perencanaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama dan Data Status Gizi Tujuan pertama adalah melakukan pengukuran dan evaluasi mendalam terhadap perkembangan status gizi balita berdasarkan hasil pengukuran Bulan Timbang Agustus 2025. Hal ini mencakup analisis komparatif untuk menguji validitas data antara hasil survei makro (SSGI) dengan data pencatatan riil (E-PPGBM). Evaluasi ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris efektivitas intervensi daerah dalam menurunkan prevalensi stunting, sekaligus memetakan sebaran wilayah (kantong stunting) yang masih memerlukan atensi khusus.
2. Mengukur Tingkat Konvergensi dan Sinergitas Lintas Sektor Tujuan kedua adalah menilai sejauh mana keterpaduan (*convergence*) layanan intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (sektor non-kesehatan) telah berjalan efektif. Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa "pagar ego sektoral" antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah runtuh, dan digantikan dengan kolaborasi integratif di mana setiap sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK) menerima paket layanan yang lengkap dan utuh.
3. Memantau Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Pemanfaatan Insentif Fiskal Tujuan ketiga berfokus pada aspek transparansi anggaran. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran rinci mengenai realisasi penyerapan anggaran program stunting dari berbagai sumber pendanaan (APBD, APBDes, dll). Secara khusus pada Semester II ini, laporan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2025, guna memastikan bahwa dana insentif tersebut benar-benar dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap penurunan kasus.
4. Identifikasi Hambatan Lapangan dan Perumusan Solusi Alternatif Tujuan keempat adalah menginventarisasi kendala-kendala teknis, administratif, maupun sosial-budaya yang dihadapi oleh garda terdepan di lapangan, yakni Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Laporan ini bertujuan untuk mengangkat permasalahan dari *grassroot* (akar rumput) ke level kebijakan, untuk kemudian dirumuskan solusi pemecahan masalah (*problem solving*) yang konkret dan aplikatif agar kendala serupa tidak terulang di masa depan.

5. Penyediaan Basis Data Valid untuk Perencanaan Tahun Berikutnya Tujuan kelima adalah menyediakan data dan informasi yang valid dan berbasis bukti (*evidence-based*) yang akan digunakan sebagai landasan utama dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi dalam laporan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kebijakan penganggaran, serta penetapan lokasi fokus (Lokus) intervensi stunting untuk Tahun Anggaran 2026, sehingga perencanaan ke depan menjadi lebih tajam dan tepat sasaran.

1.4. Sasaran Program

Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan tidak dilakukan secara parsial, melainkan menggunakan pendekatan intervensi berbasis siklus hidup manusia (*Life Cycle Approach*). Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa status gizi anak sangat ditentukan oleh akumulasi status gizi pada fase-fase kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, sasaran program pada Semester II Tahun 2025 ini mencakup rentang sasaran yang luas, mulai dari fase pra-konsepsi hingga masa pertumbuhan balita, dengan fokus utama pada periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Secara rinci, kelompok sasaran prioritas yang menjadi objek intervensi spesifik dan sensitif dalam laporan ini diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Remaja Putri (Rematri)

Kelompok remaja putri merupakan sasaran hulu yang sangat strategis dalam upaya memutus mata rantai stunting antar-generasi. Fokus intervensi pada kelompok ini diarahkan untuk pencegahan anemia (kekurangan sel darah merah) sejak dini, mengingat remaja putri yang menderita anemia berisiko tinggi tumbuh menjadi calon ibu yang tidak sehat dan berpotensi melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Pada semester ini, layanan difokuskan pada suplementasi Tablet

Tambah Darah (TTD) secara rutin di institusi pendidikan (sekolah/pesantren) serta edukasi gizi seimbang untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi mereka di masa depan.

B. Calon Pengantin (Catin)

Pasangan calon pengantin adalah sasaran krusial dalam fase pra-konsepsi. Intervensi pada kelompok ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengoreksi faktor risiko kesehatan sebelum terjadinya pernikahan dan pembuahan. Sasaran mencakup seluruh calon pengantin yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Lembaga Agama lainnya. Fokus layanan meliputi skrining kesehatan pranikah (pemeriksaan kadar Hb, Lingkar Lengan Atas/LiLA, dan Indeks Massa Tubuh) serta pendampingan intensif melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), guna memastikan setiap Catin berada dalam kondisi ideal untuk hamil.

C. Ibu Hamil (Bumil)

Ibu hamil menempati posisi sentral dalam periode kritis 1.000 HPK (fase janin). Status gizi dan kesehatan ibu selama 9 bulan kehamilan memiliki korelasi langsung dengan kualitas otak dan fisik janin yang dikandungnya. Sasaran program mencakup seluruh ibu hamil di wilayah Kabupaten Pasuruan, dengan atensi prioritas atau pemantauan khusus diberikan kepada Ibu Hamil Risiko Tinggi (Risti), Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan Ibu Hamil Anemia. Intervensi meliputi jaminan pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care/ANC) terpadu minimal 6 kali, pemberian makanan tambahan bagi bumil KEK, serta suplementasi mikronutrien.

D. Ibu Pasca Persalinan (Nifas)

Pasca proses persalinan, fokus sasaran beralih kepada ibu nifas. Fase ini sangat menentukan keberlangsungan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Sasaran program diarahkan untuk mendukung pemulihan kesehatan ibu pasca melahirkan serta memastikan keberhasilan inisiasi menyusui. Intervensi kunci pada kelompok ini adalah pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan. Hal ini sangat vital untuk mengatur jarak kehamilan (*birth spacing*), karena jarak kelahiran yang terlalu

dekat terbukti secara ilmiah meningkatkan risiko stunting pada anak berikutnya serta mengganggu pola asuh dan pemberian ASI.

E. Anak Usia 0 - 59 Bulan (Balita)

Kelompok balita merupakan sasaran hilir yang menjadi indikator akhir keberhasilan seluruh intervensi. Sasaran ini meliputi seluruh populasi balita yang menjadi target pengukuran di Posyandu. Penanganan pada kelompok ini dibagi menjadi dua skema utama: skema pencegahan bagi balita sehat melalui pemantauan pertumbuhan rutin dan imunisasi dasar lengkap; serta skema penanganan bagi balita yang terindikasi mengalami masalah gizi (*weight faltering*, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting). Bagi balita dengan masalah gizi, intervensi difokuskan pada tata laksana gizi medis, rujukan ke fasilitas kesehatan, dan pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal yang terpantau ketat hingga status gizinya membaik.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan komprehensif mengenai hasil pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, laporan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan fondasi penyusunan laporan yang mencakup latar belakang urgensi penanganan stunting berdasarkan dinamika data terkini (disparitas SSGI dan E-PPGBM), landasan hukum yang menjadi payung regulasi pelaksanaan program, maksud dan tujuan pelaporan kinerja, rincian sasaran program berdasarkan siklus hidup, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH Bab ini menyajikan analisis situasi kewilayahan yang relevan dengan faktor determinan stunting, meliputi kondisi geografis dan administratif, kondisi demografis kependudukan, gambaran derajat kesehatan masyarakat, kondisi sanitasi lingkungan dan akses air bersih, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

BAB III CAPAIAN KINERJA DAN HASIL PELAKSANAAN Bab ini merupakan inti dari laporan yang menyajikan analisis mendalam dan berbasis bukti (*evidence-based*). Pembahasan meliputi perkembangan angka prevalensi stunting, capaian

indikator layanan intervensi spesifik (sektor kesehatan), capaian indikator intervensi sensitif (lintas sektor), kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK), hasil pelaksanaan Audit Kasus Stunting, serta realisasi kinerja keuangan termasuk akuntabilitas pemanfaatan Dana Insentif Fiskal tahun berjalan.

BAB IV KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT Bab ini memaparkan hasil identifikasi terhadap kendala dan permasalahan operasional yang dihadapi selama pelaksanaan program di Semester II, serta merumuskan rencana tindak lanjut (RTL) strategis dan penetapan prioritas program untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan akhir atas kinerja penanganan stunting semester ini serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan untuk perbaikan program di masa mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'42.14" - 7°57'24.32" Lintang Selatan dan 112°34'29.31"-113° 6'0.29" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,02 km² dengan batas administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi:

Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

Secara administratif, struktur kewilayahan di Kabupaten Pasuruan terorganisasi ke dalam pembagian unit pemerintahan yang jelas dan terperinci. Wilayah ini terbagi menjadi 24 kecamatan sebagai satuan administratif utama. Selanjutnya, di lingkup yang lebih spesifik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terdapat 24 kelurahan serta 341 desa yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Rincian lengkap mengenai pembagian wilayah administratif ini disajikan secara mendetail pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06

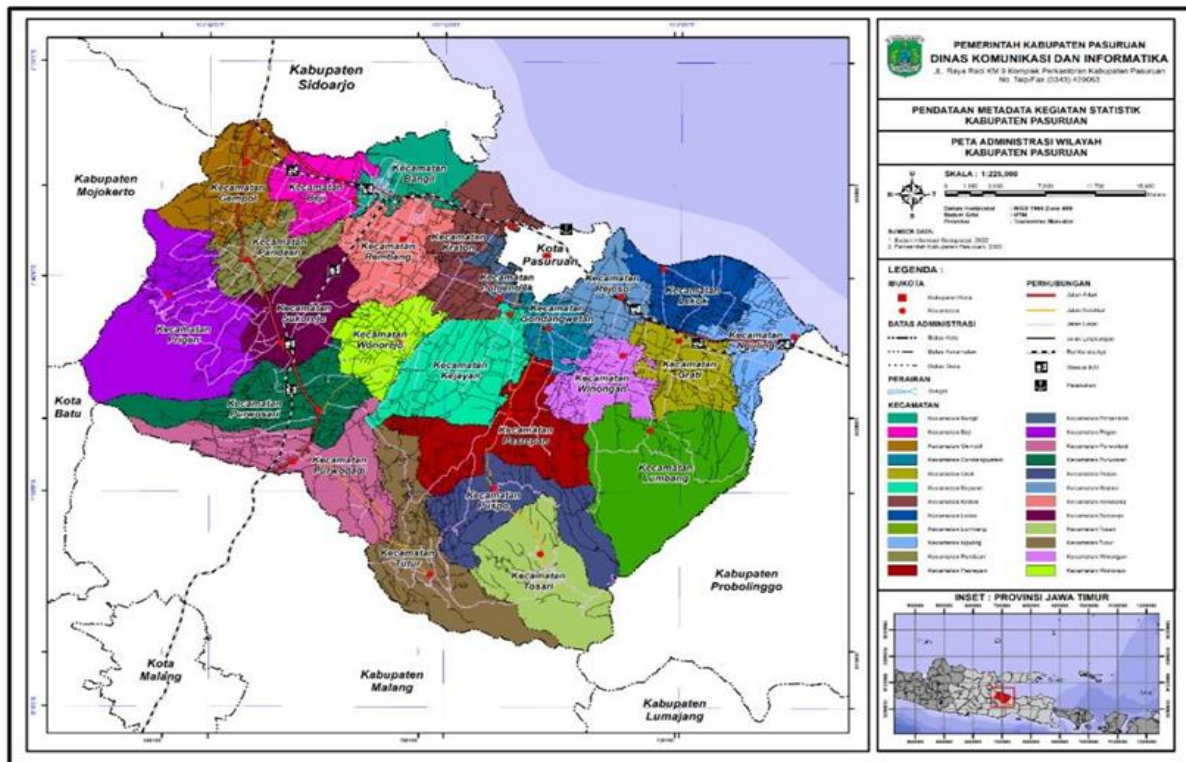
No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondang Wetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan Total:		341	24	1.474,2	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Ditinjau dari perspektif ekonomi, letak geografis wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang berada tepat di simpul segitiga jalur ekonomi vital yang menghubungkan koridor Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, koridor Surabaya - Malang, serta lintas Malang - Jember / Banyuwangi / Bali. Konektivitas wilayah ini semakin diperkuat dengan adanya lintasan jalur kereta api yang melayani angkutan penumpang maupun barang untuk rute Surabaya - Bangil - Banyuwangi dan Surabaya - Bangil - Malang.

Nilai strategis tersebut kian bertambah dengan adanya dukungan infrastruktur jalan bebas hambatan yang terintegrasi, meliputi ruas Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang, Gempol - Pasuruan, hingga Pasuruan - Probolinggo. Pembangunan akses tol ini secara signifikan memangkas waktu tempuh menuju Surabaya, sehingga menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai destinasi investasi yang sangat tepat dan menarik bagi pengembangan sektor industri. Adapun

visualisasi mengenai peta wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2. Potensi Sumber Daya Daerah

F. Topografi

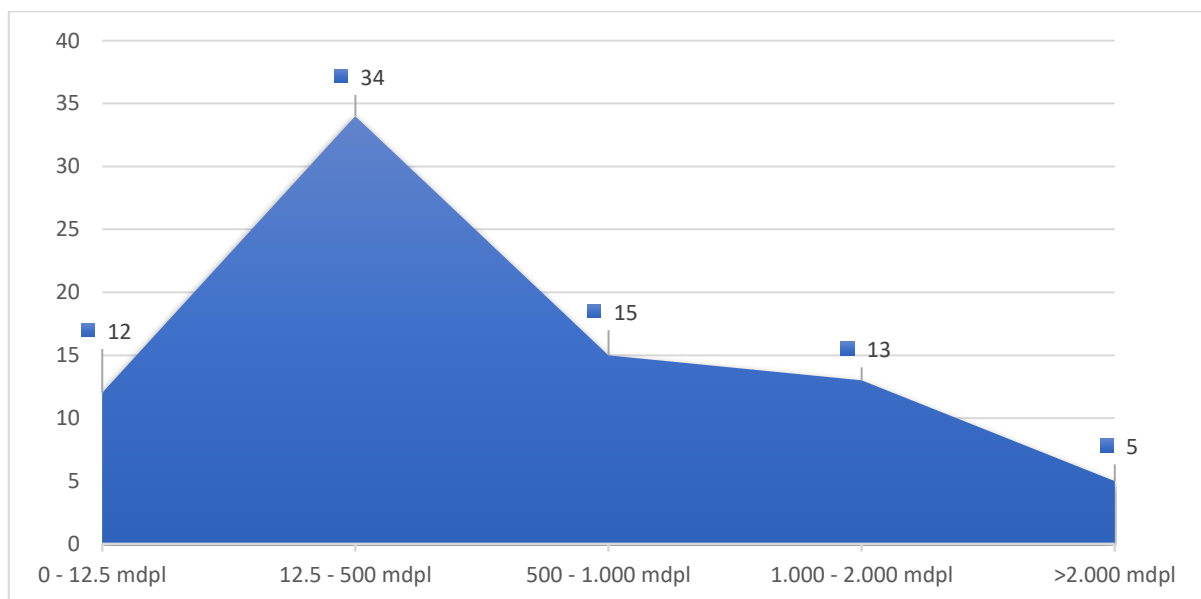
Secara topografis, bentang alam wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan variasi elevasi yang sangat beragam, terentang mulai dari titik terendah di 0 mdpl hingga mencapai puncak tertinggi di 3.313 meter di atas permukaan laut (mdpl). Data ketinggian ini tercatat secara rinci di setiap wilayah administrasi kecamatan. Karakteristik wilayah ini terbagi secara jelas berdasarkan letak geografisnya; dataran rendah mendominasi kawasan bagian utara, khususnya di sepanjang garis Pesisir Selat Madura, dengan rentang ketinggian antara 0 hingga 290 mdpl. Konsekuensi dari kondisi topografi yang rendah ini menyebabkan kawasan tersebut diidentifikasi memiliki potensi kerawanan terhadap ancaman bencana banjir.

Sebaliknya, kontur dataran tinggi terpusat pada bagian tenggara yang merupakan bagian dari Kawasan Gunung Bromo, serta di bagian barat daya yang meliputi Kawasan Gunung Welirang. Morfologi kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan ini sebagian besar ditandai dengan kondisi kelerengan yang terjal atau curam, yang secara alamiah membawa implikasi risiko berupa potensi bencana tanah longsor.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis tingkat kemiringan lahan atau kelerengan, wilayah Kabupaten Pasuruan dapat diklasifikasikan secara spesifik ke dalam tujuh (7) kategori zona, yaitu sebagai berikut:

1. Zona Kelerengan 0 – 2% (Datar): Wilayah ini meliputi cakupan yang luas, antara lain mencakup seluruh wilayah Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Lekok. Selain itu, zona ini juga mencakup sebagian wilayah dari Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, serta Kecamatan Nguling.
2. Zona Kelerengan 2 – 5% (Landai): Kategori ini tersebar meliputi sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, dan Kecamatan Nguling.
3. Zona Kelerengan 5 – 8% (Agak Miring): Kawasan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, dan Kecamatan Lekok.
4. Zona Kelerengan 8 – 15% (Miring): Wilayah dengan kemiringan ini mencakup sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan

- Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Winongan, serta Kecamatan Grati.
5. Zona Kelerengan 15 – 25% (Agak Curam): Daerah yang memiliki tingkat kemiringan ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, dan Kecamatan Beji.
 6. Zona Kelerengan 25 – 45% (Curam): Kawasan dengan topografi curam ini terdapat pada sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol.
 7. Zona Kelerengan > 45% (Sangat Curam): Zona dengan kemiringan ekstrem ini meliputi sebagian wilayah di kawasan pegunungan, yaitu Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, serta Kecamatan Prigen.



Gambar 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan visualisasi data yang disajikan pada Gambar tersebut, kondisi topografi wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan karakteristik yang sangat dinamis dan bervariasi apabila ditinjau dari aspek ketinggian lahan atau elevasi. Keragaman bentang alam ini menjadi dasar fundamental dalam pemetaan

karakteristik geografis daerah tersebut. Oleh karena itu, merujuk pada perbedaan elevasi yang ada, wilayah Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan secara spesifik ke dalam 5 (lima) kategori atau jenis wilayah. Rincian sistematis mengenai kelima klasifikasi wilayah tersebut dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
1	Wilayah Pesisir	0 - 12,5	18.819,04	Kawasan pengembangan usaha perikanan dan pertambakan	Pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, Winongan, Kecamatan Grati, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling
2	Wilayah Dataran	12,5 - 500	50.384,02	Kawasan pengembangan pertanian, permukiman, perindustrian	Pada sebagian wilayah kecamatan – kecamatan di Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari
3	Wilayah Perbukitan	500 – 1.000	21.877,17	Kawasan untuk tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi	Sebagian kawasan Kecamatan Lumbang, Kecamatan Gempol, Kecamatan Purwodadi,

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
				kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem terasiring	Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Pasrepan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari, dan Kecamatan Prigen
4	Wilayah Pegunungan	1.000 – 2.000	18.615,08	Kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air	Sebagian kawasan Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Prigen
5	Kawasan Pegunungan Tinggi	>2.000	7.920,77	Kawasan hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan bawahannya	Sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Purwosari, dan Kecamatan Prigen

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

G. Geologi dan Jenis Tanah

Secara geologis, karakteristik litologi wilayah bagian selatan Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral dari bentang alam Pegunungan Malang Selatan yang secara dominan tersusun oleh struktur batuan vulkanik. Pembentukan formasi batuan ini merupakan hasil dari aktivitas vulkanisme gunung berapi yang terjadi pada masa lampau (paleovolcanism). Material penyusun kawasan ini mencakup variasi jenis batuan beku dan piroklastik, seperti andesit, basalt, serta batuan piroklastik lainnya. Keberadaan gunung-gunung api strato yang menjulang tinggi, khususnya Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, menjadi bukti nyata sekaligus sumber material utama dari deposit batuan vulkanik yang tersebar luas di wilayah selatan ini.

Sementara itu, pada sisi bagian utara dan timur Kabupaten Pasuruan, kondisi geologinya didominasi oleh hamparan batuan sedimen. Jenis batuan ini terbentuk melalui proses sedimentasi yang kompleks, meliputi endapan sungai (fluvial), bentukan delta, hingga sedimen laut (marine sediment). Proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh dinamika geologis seperti mekanisme pengendapan material, sedimentasi berkelanjutan, serta aktivitas tektonik. Jaringan sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan berperan vital dalam transportasi material endapan yang tererosi dari kawasan pegunungan dan perbukitan di sekitarnya menuju ke dataran yang lebih rendah. Akibat proses ini, pada kawasan dataran rendah terbentuk lapisan endapan alluvial yang sangat subur dan kaya akan kandungan bahan organik, yang pada gilirannya menjadi fondasi utama bagi kesuburan tanah untuk mendukung sektor pertanian yang makmur di wilayah tersebut.

Lebih jauh lagi, posisi geografis Wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam zona yang tergolong aktif secara tektonik. Hal ini ditandai dengan keberadaan jalur-jalur patahan (sesar) dan rekahan geologi yang mengindikasikan adanya potensi kerawanan terhadap bencana gempa bumi. Aktivitas tektonik yang berlangsung dalam kurun waktu geologis tersebut juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan konfigurasi relief permukaan bumi serta pola aliran sungai (drainase) yang ada saat ini. Di samping itu, beberapa bagian dari wilayah Kabupaten Pasuruan juga teridentifikasi memiliki kandungan deposit batu gamping (batu kapur). Batuan ini umumnya terbentuk dari proses sedimentasi laut purba dan kini menjadi salah satu

sumber daya alam mineral yang bernilai ekonomis tinggi, khususnya sebagai bahan baku utama untuk mendukung industri konstruksi dan bahan bangunan.

Ditinjau dari perspektif struktur geologi secara makro, wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi secara proporsional ke dalam dua kelompok formasi geologi besar. Kelompok pertama adalah formasi gunung api kuartir muda (young quaternary) yang mendominasi wilayah dengan cakupan luasan mencapai 52,43%, sedangkan kelompok kedua adalah formasi kuartir tua (old quaternary) yang mencakup luasan sebesar 34,95%. Secara lebih spesifik, kondisi geologi wilayah ini tersusun atas dua belas (12) satuan batuan yang meliputi: Satuan Alluvium (Qa), Satuan Tuff Rabano (Qvtr), Satuan batuan gunung api kuartir atas Penanggungan (Qvn), Satuan batuan gunung api Arjuno-Welirang (Qvaw), Satuan batuan gunung api kuartir tengah Ringgit (Qvr), serta Satuan gunung api kuartir Tengger tua (Qpvtr).

Secara garis besar, klasifikasi jenis batuan yang terdapat di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori utama, yaitu: kelompok batuan permukaan, kelompok batuan sedimen, dan kelompok batuan gunung api. Rincian penjelasan teknis mengenai karakteristik masing-masing jenis batuan tersebut telah disajikan secara lengkap pada Tabel berikut.

Tabel 2.3 Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Endapan Permukaan	
Batuan Alluvium	1. Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur 2. Terdiri dari endapan sungai Rejoso dan endapan pantai sepanjang Selat Madura
Batuan Sedimen	
Formasi Kabuh	1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan 2. Sebarannya tidak luas, terdapat disekitar Desa Raci dan di Beji

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Formasi Jombang	1. Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan 2. Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan
Formasi Welang	1. Terdiri Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batupasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan 2. Sebarannya tidak luas di Sungai Welang
Batuan Gunung Api	
Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis)	1. Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat
Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit)	1. Terdiri dari batuan gunung api ringgit, batuan gunung api tengger tua
Batuan Gunung Api Arjuna – Welirang	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf
Batuan Gunung Api Tengger	1. Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat
Tuf Rabano	1. Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus
Batuan Gunung Api Kuarter Atas Penanggungan	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar
Batuan Gunung Api Bromo	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi, dan lahar 2. Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo.
Pasir Gunung Api Tengger	1. Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung 2. Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok G. Bromo

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Kompleksitas proses geologi yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang di wilayah Kabupaten Pasuruan telah meninggalkan jejak yang signifikan. Fenomena ini membentuk banyak rekaman peristiwa geologi yang unik dan menarik, yang memiliki nilai ilmiah serta estetika tinggi. Oleh karena itu, potensi ini perlu dikelola dan ditetapkan sebagai Warisan Geologi (Geological Heritage). Langkah pelestarian ini menjadi sangat krusial agar keberadaan situs-situs geologi tersebut tetap terjaga keasliannya dan terhindar dari kerusakan, sekaligus mendorong pengakuan status Warisan Geologi tersebut tidak hanya pada tingkat Nasional, tetapi juga menembus pengakuan di tingkat Internasional.

Lebih lanjut, beralih pada aspek pedologi atau karakteristik tanah, wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki variasi jenis tanah yang cukup beragam. Berdasarkan karakteristik fisik dan kimianya, jenis tanah di wilayah ini secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok utama. Identifikasi ini penting untuk menentukan daya dukung lahan terhadap berbagai aktivitas pembangunan dan pertanian. Berikut adalah rincian keenam kelompok tanah tersebut:

1. Tanah Alluvial Jenis tanah ini memiliki karakteristik fisik berupa warna dominan kelabu dengan tekstur liat. Tingkat keasaman tanah ini bervariasi (aneka), namun memiliki kandungan zat organik yang tergolong lemah. Meskipun demikian, tingkat kejenuhan basanya berkisar antara sedang hingga tinggi. Dari sisi hidrologi, tanah Alluvial memiliki permeabilitas yang rendah. Meskipun kepekaan terhadap erosi tergolong tinggi, namun karena sebarannya mayoritas berada di daerah yang datar, risiko erosi lanjut tidak terjadi secara signifikan. Pemanfaatan: Lahan dengan jenis tanah ini sangat cocok dan umum digunakan untuk budidaya padi sawah, tanaman palawija, serta kegiatan perikanan darat.
2. Tanah Regosol Tanah Regosol dicirikan dengan warna yang bervariasi dari kelabu hingga kuning dengan tekstur yang kasar atau berpasir. Kandungan liat pada tanah ini relatif sedikit, yakni kurang dari 40%. Sifat kimianya menunjukkan keasaman dan kejenuhan basa yang beraneka ragam, serta kandungan zat organik yang rendah. Tanah ini memiliki permeabilitas atau kemampuan meloloskan air yang tinggi, serta memiliki kepekaan yang tinggi pula terhadap erosi. Pemanfaatan: Jenis tanah ini mendukung untuk kegiatan

- pertanian seperti padi sawah, tanaman palawija, perkebunan tebu, serta budidaya berbagai jenis sayuran.
3. Tanah Andosol Tanah yang umumnya terbentuk dari material vulkanik ini memiliki ciri khas warna hitam hingga kuning. Teksturnya berkisar dari lempung hingga debu, dengan kandungan liat yang cenderung menurun. Derajat keasamannya berada pada rentang agak masam hingga netral, dengan kandungan zat organik yang lemah dan kejenuhan basa. Sifat fisiknya memiliki permeabilitas sedang, namun perlu diwaspadai karena memiliki kepekaan yang besar terhadap ancaman erosi. Pemanfaatan: Lahan Andosol sangat produktif untuk komoditas dataran tinggi seperti sayur-mayur, tanaman bunga-bunga, perkebunan teh, kopi, serta pengembangan hutan pinus.
 4. Tanah Grumusol Karakteristik fisik tanah Grumusol ditandai dengan warna kelabu hingga hitam pekat. Tekstur tanah ini didominasi oleh liat, di mana kandungan liatnya akan semakin meningkat seiring bertambahnya kedalaman tanah. Secara kimiawi, tanah ini memiliki reaksi sedikit asam hingga alkalin (basa), dengan kadar zat organik yang rendah namun memiliki kejenuhan basa yang tinggi. Permeabilitas tanah ini rendah, yang menyebabkan air sulit meresap, dan memiliki kepekaan erosi yang besar. Pemanfaatan: Tanah ini dimanfaatkan secara luas untuk pertanian padi sawah, tanaman jagung, kedelai, tebu, kapas, serta sangat cocok untuk pertumbuhan hutan jati.
 5. Tanah Mediteran Tanah Mediteran mudah dikenali dari warnanya yang kuning hingga merah. Tekstur tanah ini adalah lempung liat dengan tingkat keasaman mulai dari agak masam hingga netral. Kandungan zat organik di dalamnya tergolong rendah, namun memiliki kejenuhan basa yang tinggi. Sifat permeabilitasnya sedang, sementara kepekaan terhadap erosi berkisar dari besar hingga sedang, tergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan: Potensi lahan ini umumnya digunakan untuk areal persawahan (padi sawah), lahan tegalan, serta area pertumbuhan rumput untuk pakan ternak.
 6. Tanah Latosol Jenis tanah ini memiliki warna khas merah hingga kuning dengan tekstur liat yang konsisten dari lapisan atas hingga ke bawah. Tingkat keasamannya berkisar dari masam hingga agak masam. Kandungan zat organiknya bervariasi dari rendah hingga agak sedang di lapisan permukaan

(top soil) dan menurun pada lapisan yang lebih dalam. Kejenuhan basanya rendah hingga sedang, namun memiliki permeabilitas yang tinggi dan keunggulan berupa kepekaan erosi yang kecil, sehingga relatif stabil. Pemanfaatan: Tanah Latosol sangat mendukung berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan, meliputi padi sawah, jagung, tanaman umbi-umbian, kelapa, coklat (kakao), cengkeh, kopi, maupun sebagai area hutan tropika.

H. Klimatologi

Secara klimatologis, karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan secara umum dikategorikan memiliki tipe iklim tropis basah. Kondisi cuaca dan iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh dinamika sirkulasi udara regional, khususnya hembusan angin Muson yang bertiup secara periodik. Keberadaan angin Muson ini memegang peranan vital dalam membentuk pola iklim wilayah serta menentukan siklus pergantian musim. Fenomena alam tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme musim, yakni musim penghujan yang ditandai dengan aktivitas angin Muson Timur, serta musim kemarau yang terjadi akibat pengaruh hembusan angin Muson Barat. Adapun gambaran spesifik mengenai data dan kondisi iklim aktual yang terjadi di Kabupaten Pasuruan sepanjang Tahun 2024, disajikan secara terperinci dalam Tabel berikut.

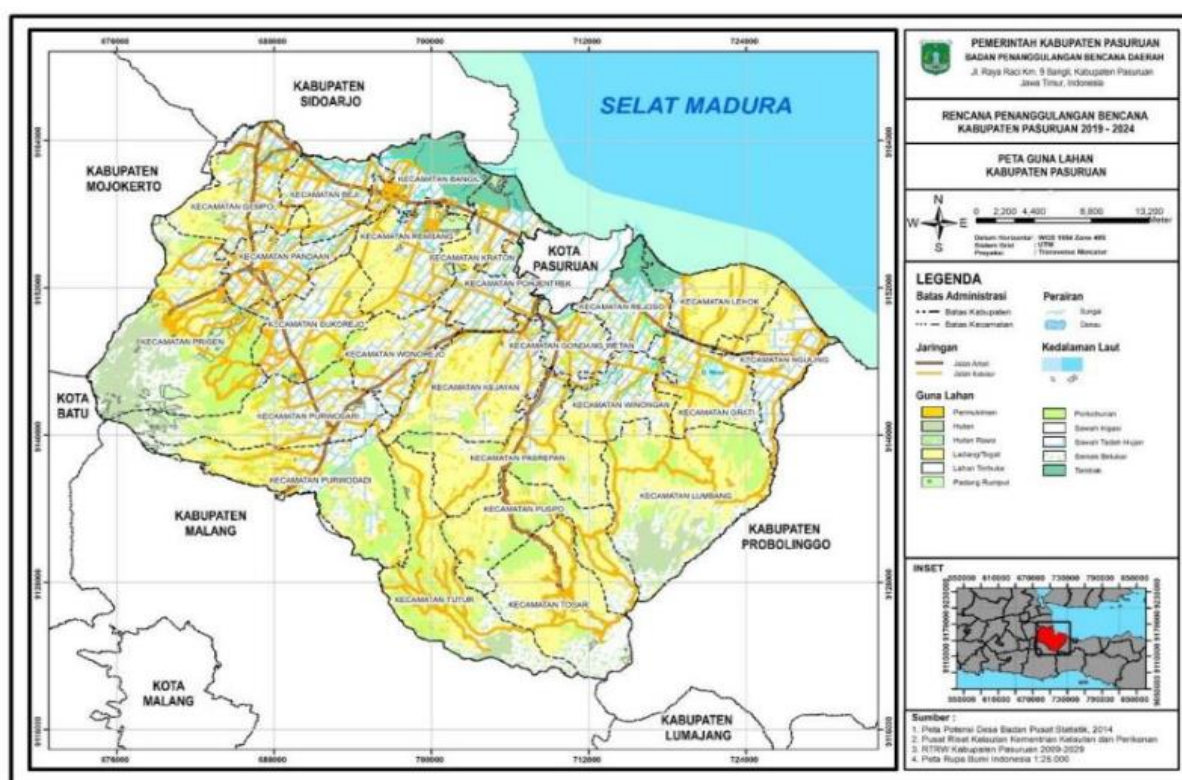
Tabel 2.4 Iklim Kabupaten Pasuruan

Kecepatan Angin	Maks 13 Knots terjadi di bulan Maret dan April
Rata-rata Kelembapan Maksimum	91% di bulan Februari dan Desember
Hari Hujan	Terbanyak selama 25 hari di bulan Maret dan Desember
Rata-rata Penyinaran Matahari	Paling lama 6,3 jam di bulan Agustus
Curah Hujan	Maks 736,1 mm/tahun terjadi di bulan Desember
Rata-rata Suhu Tertinggi	Mencapai 24,5 C terjadi di bulan Oktober

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

I. Penggunaan Lahan

Ditinjau dari aspek tata guna lahan, pola pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan dominasi yang signifikan pada sektor pertanian. Hal ini terindikasi dari penggunaan lahan terbesar yang dialokasikan untuk areal persawahan dengan sistem irigasi, yang mencatatkan total luasan mencapai 38.391,34 Hektar. Di sisi lain, proporsi lahan yang dimanfaatkan sebagai kawasan terbangun yang meliputi permukiman, kawasan industri, dan fasilitas infrastruktur lainnya tercatat seluas 17.301,60 Hektar. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai distribusi spasial dan komposisi peruntukan lahan lainnya, rincian data secara mendetail telah diuraikan dalam Tabel berikut:



Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.5 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

No	Penggunaan	Presentase
1	Aneka Industri	0,994
2	Industri Kecil	0,023
3	Jasa Permukiman	10,169

No	Penggunaan	Presentase
4	Peternakan Unggas	0,021
5	Tambak	1,696
6	Sawah Irigasi	26,187
7	Sawah Tadah Hujan	1,536
8	Buah-Buahan	0,006
9	Kebun Campuran	3,242
10	Perkebunan	2,805
11	Tegalan/Ladang	36,051
12	Hutan Sejenis	11,878
13	Padang Rumput	0,707
14	Semak	2,708
15	Kolam Air Tawar	0,001
16	Lapangan Olahraga	0,215
17	Tanah Kosong yang Diperuntukkan	0,033
18	Tanah Terbuka	1,224
19	Sungai	0,217
20	Danau/Situ/Telaga	0,127
21	Jalan Aspal	0,081
22	Pemakaman	0,081

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pasuruan, 2024

J. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara ekonomis, Kabupaten Pasuruan dianugerahi berbagai keunggulan komparatif maupun kompetitif yang menjadi potensi daerah yang sangat strategis. Apabila seluruh potensi tersebut dapat dioptimalisasi pemanfaatannya dengan manajemen yang tepat, maka hal tersebut akan menjadi katalisator utama dalam mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah secara signifikan. Salah satu pilar utama yang menjadi keunggulan tersebut adalah:

1. Ketersediaan dan Konektivitas Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai dan terintegrasi, yang telah menghubungkan hampir seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pasuruan, menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah. Aksesibilitas yang tinggi ini memberikan dukungan yang sangat vital bagi akselerasi perkembangan di berbagai sektor strategis, meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan destinasi pariwisata, produktivitas pertanian, kemajuan sektor industri, serta kelancaran transportasi. Lebih jauh lagi, konektivitas ini berkontribusi langsung

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan mobilitas.

Selain mengandalkan prasarana jalan raya, sistem transportasi logistik barang dan mobilitas jasa juga diperkuat dengan dukungan moda transportasi berbasis rel. Jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan menjadi sarana pendukung yang efisien, dengan melayani dua koridor utama yang strategis, yakni jurusan selatan (Surabaya - Bangil - Malang - Blitar) dan jurusan timur (Surabaya - Pasuruan - Jember - Banyuwangi).

Sebagai daerah yang memiliki basis perekonomian kuat pada sektor pertanian dan industri, Kabupaten Pasuruan telah dilengkapi dengan sistem jaringan irigasi teknis yang handal. Infrastruktur ini berfungsi krusial dalam mendukung produktivitas lahan pertanian serta kebutuhan air baku bagi kawasan industri. Sistem jaringan irigasi yang tersedia dirancang untuk mampu mengairi lahan pertanian secara memadai, yang pengelolaannya dioptimalkan melalui mekanisme pengelolaan irigasi partisipatif guna menjamin keberlanjutan pasokan air.

Sementara itu, dari sisi pengembangan investasi, ketersediaan Kawasan Industri yang terpadu menjadi nilai tambah tersendiri. Kawasan ini telah dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang komprehensif, termasuk fasilitas pengelolaan limbah yang berstandar serta fasilitas penunjang lainnya. Keunggulan kawasan ini semakin nyata dengan adanya konektivitas langsung (aksesibilitas) menuju jaringan jalan tol yang menghubungkan arah Surabaya - Malang hingga Banyuwangi/Bali, yang menjamin efisiensi logistik.

Tidak hanya itu, ketersediaan komponen infrastruktur utilitas dasar lainnya juga telah terpenuhi dalam jumlah yang cukup memadai, meliputi ketersediaan air bersih, suplai energi listrik yang stabil, jaringan pipa gas untuk industri, serta infrastruktur telekomunikasi yang modern. Dengan demikian, ekosistem infrastruktur yang telah terbangun secara menyeluruh ini akan menjadi fondasi yang kokoh dalam menunjang perkembangan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Pasuruan secara berkelanjutan."

2. Potensi Wisata

Kabupaten Pasuruan menyimpan kekayaan potensi pariwisata yang sangat beragam dan bernilai tinggi, mencakup berbagai spektrum mulai dari

keindahan alam, kekayaan sejarah, hingga inovasi wisata buatan dan agrowisata. Salah satu daya tarik utama yang menjadi primadona dan telah diakui sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah wisata Sunrise Puncak Penanjakan Gunung Bromo. Destinasi ini terletak di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan menawarkan panorama matahari terbit yang ikonik serta pemandangan kaldera yang spektakuler.

Selain pesona Bromo, Kabupaten Pasuruan juga dianugerahi berbagai wisata alam lainnya yang tersebar di berbagai penjuru wilayah. Wisata berbasis perairan dan air terjun menjadi unggulan, meliputi Air Terjun Kakek Bodho, Pemandian Alam Banyu Biru yang legendaris, keindahan Danau Ranu Grati, serta kejernihan Sumber Air Umbulan. Deretan air terjun eksotis lainnya yang patut dikunjungi antara lain Air Terjun Coban Cemoro Gading, Air Terjun Sumber Nyonya, Air Terjun Putuk Truno, Air Terjun Coban Baung, Air Terjun Coban Jala, Air Terjun Rambut Moyo, hingga Air Terjun Coban Waru. Tidak hanya di dataran tinggi, potensi wisata bahari dan pesisir juga tersedia, seperti Pantai Pasir Panjang di Kecamatan Lekok, serta ekosistem Hutan Mangrove yang asri di Pantai Penunggul (Kecamatan Nguling), Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Kraton.

Dari aspek sejarah dan spiritualitas, Kabupaten Pasuruan kaya akan situs wisata budaya dan religi yang menjadi saksi perjalanan peradaban masa lampau. Peninggalan masa klasik Hindu-Buddha dapat ditemukan pada situs Candi Laras, Candi Satrio Manggung, Candi Kebo Ireng, Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Sepilar, Candi Makutoromo, Candi Jawi, serta situs Dewa Wisata Purbakala Tambak Sari. Jejak sejarah perjuangan juga terekam di Goa Jepang/Inna Tretes. Sementara itu, wisata religi Islam atau ziarah makam leluhur meliputi Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Sakerah, Makam Mbah Bangil, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Semendhi, dan Makam Mbah Segoropuro. Bagi para pencari ketenangan spiritual, terdapat pula lokasi pertapaan seperti Pertapaan Abiyoso dan Pertapaan Indrokilo.

Melengkapi keindahan alam dan budaya, sektor pariwisata juga didukung oleh pengembangan Wisata Buatan yang menawarkan alternatif rekreasi modern dan pengalaman baru bagi wisatawan keluarga. Beberapa

destinasi unggulan dalam kategori ini antara lain Saygon Water Park dan Taman Dayu Water Park.

Sektor pertanian yang subur di Kabupaten Pasuruan juga diintegrasikan menjadi daya tarik Wisata Agro yang edukatif dan rekreatif. Destinasi ini tersebar luas, meliputi Agrowisata Apel, Agro Kopi, serta Agro Bunga Krisan dan Paprika yang terpusat di Kecamatan Tutar. Selain itu, terdapat pula sentra Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Tutar dan Kecamatan Grati, budidaya Agro Jamur di Kecamatan Sukorejo dan Purwodadi, serta sentra Agro Durian yang dapat ditemui di Kecamatan Lumbang, Purwodadi, Tutar, dan Puspo. Destinasi agrowisata lainnya yang menarik untuk dikunjungi meliputi Agro Wisata Bhakti Alam di Kecamatan Tutar, wisata sejarah industri Agro PG Kedawung di Kecamatan Grati, perkebunan Agro Mangga di Kecamatan Rembang dan Sukorejo, wisata edukasi Kebun Pak Budi di Kecamatan Purwosari, serta hamparan harum Kebun Bunga Sedap Malam di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Bangil.

Terakhir, Kabupaten Pasuruan juga memfasilitasi segmen Wisata Minat Khusus yang menawarkan pengalaman eksklusif dan petualangan. Destinasi yang masuk dalam kategori ini antara lain Taman Safari Indonesia II yang terkenal sebagai konservasi satwa, kawasan elit Taman Dayu, fasilitas olahraga golf di Finna Golf & Country Club, kawasan wisata Kaliandra, Bukit Flora, serta area berkemah di Baung Camp. Pengembangan pariwisata ini juga diperkuat dengan keberadaan Desa Wisata yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Desa-desa wisata ini tersebar strategis di berbagai kecamatan, yaitu di Kecamatan Tosari, Kecamatan Tutar, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Grati, Kecamatan Gempol, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Winongan.

3. Potensi Industri

Sektor industri merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Kabupaten Pasuruan, dengan spektrum yang luas meliputi industri skala besar, menengah, hingga industri kecil. Persebaran industri besar terkonsentrasi di beberapa wilayah strategis yang didukung oleh aksesibilitas yang baik, yakni meliputi Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari,

Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Bangil, dan Kecamatan Kejayan. Sementara itu, industri kecil dan menengah (IKM) tumbuh subur dan menjadi penggerak ekonomi di wilayah perdesaan. Sektor IKM ini bergerak dalam berbagai bidang yang variatif, antara lain industri makanan dan minuman, kerajinan bordir, tekstil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), konveksi, meubel kayu, serta kerajinan logam.

Dalam peta industri kreatif daerah, salah satu sektor unggulan yang telah memiliki reputasi kuat adalah kerajinan bordir, konveksi, dan batik. Kecamatan Bangil telah lama dikenal sebagai sentra kerajinan bordir dengan keunggulan kompetitif pada desain yang inovatif dan kualitas yang prima. Tingginya permintaan pasar yang sering kali melebihi kapasitas produksi di Bangil memicu terbentuknya jejaring produksi yang meluas ke kecamatan penyangga lainnya, seperti Kecamatan Beji, Wonorejo, Rembang, Pandaan, Sukorejo, dan Winongan. Jangkauan pemasaran produk bordir ini tidak hanya mendominasi pasar lokal, tetapi juga sukses menembus pasar ekspor ke negara-negara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, hingga kawasan Timur Tengah. Di sektor lain, industri konveksi berkembang pesat di Kecamatan Gempol dengan spesialisasi produk berupa celana jeans, kaos, dan celana olahraga (sport). Tidak ketinggalan, industri batik pewarna alam juga menunjukkan eksistensinya yang semakin diakui oleh konsumen mancanegara, dengan pasar ekspor mencakup Korea, Malaysia, dan Australia.

Potensi sumber daya alam juga mendorong berkembangnya sentra industri kayu dan meubel. Sentra-sentra ini tersebar di berbagai titik, antara lain di Desa Sentul (Kecamatan Purwodadi), Desa Tambaksari (Kecamatan Kraton), Desa Wonorejo (Kecamatan Wonorejo), Desa Sungikulon dan Desa Sungiwetan (Kecamatan Pohjentrek), serta wilayah Kecamatan Winongan dan Rejoso. Para pengrajin di wilayah ini sangat kreatif dalam menghasilkan berbagai produk bernilai tambah, mulai dari mainan edukatif anak-anak, aksesoris otomotif (setir mobil, handle persneling, dashboard), kotak tisu, papan catur, hingga produk furnitur atau meubel. Pemasaran produk berbasis kayu ini telah menjangkau pasar domestik hingga internasional.

Selain kayu, Kabupaten Pasuruan juga memiliki sentra kerajinan logam mulia, khususnya perak, yang berpusat di Kecamatan Bangil dan Gempol.

Karya pengrajin perak ini telah berhasil menembus pasar global, termasuk ekspor ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa. Di sisi lain, industri pendukung otomotif berupa industri kecil spare part kendaraan bermotor tumbuh berkembang di Kecamatan Winongan, dengan distribusi pasar utama menyuplai kebutuhan di kota besar seperti Malang dan Surabaya.

Untuk mendukung iklim investasi, Kabupaten Pasuruan memiliki kawasan industri terpadu, yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Sebagai kawasan berikat, PIER menawarkan lingkungan investasi yang aman, kondusif, dan menjanjikan bagi para investor. Selain PIER, pemerintah daerah juga masih memiliki cadangan kawasan peruntukan industri di luar area tersebut yang membuka peluang besar bagi pengembangan kawasan industri baru di masa depan.

Sektor industri kecil makanan dan minuman (mamin) yang berbasis bahan baku lokal juga menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat di seluruh kecamatan. Salah satu ikon kuliner, yaitu sentra Pia di Kecamatan Gempol, terus berkembang dan menjadi sektor padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, dengan pemasaran yang meluas ke Malang dan Surabaya. Potensi agroindustri juga dimanfaatkan dengan baik, seperti industri olahan apel, kopi, dan susu yang tumbuh di Kecamatan Tukur; serta industri aneka keripik yang tersebar di Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen, Tosari, dan Purwodadi. Di wilayah pesisir, industri pengolahan hasil perikanan berkembang di Kecamatan Rejos, Lekok, Grati, Bangil, dan Beji. Terdapat pula produk unik seperti minuman herbal Pokak di Kecamatan Winongan serta olahan sirup dan dodol salak di Kecamatan Gondangwetan.

Tumbuh kembangnya sentra-sentra industri potensial ini memberikan optimisme dan harapan baru bagi penguatan ekonomi sektor riil daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan. Keberlanjutan industri kecil menengah ini juga ditopang oleh ketersediaan infrastruktur pemasaran yang strategis, seperti Kawasan Wisata Masjid Cheng Hoo, Pasar Buah Pandaan, Sentra Produk Unggulan di Bangil, kawasan Taman Dayu, serta Sentra Kulakan produk UMKM/IKM di Kecamatan Gempol yang berfungsi sebagai etalase produk-produk lokal.

4. Potensi Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa, menjadikannya salah satu lumbung pangan strategis di Jawa Timur. Berdasarkan data tahun 2025, wilayah ini memiliki bentang alam yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan secara terintegrasi dan berkualitas tinggi.

Keanekaragaman Sektor Pertanian dan Perkebunan Di sektor pertanian, Kabupaten Pasuruan memproduksi berbagai komoditas pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi jalar yang tersebar hampir di seluruh kecamatan, terutama di wilayah dataran rendah seperti Purwodadi, Wonorejo, hingga Grati.

Kekuatan utama lainnya terletak pada sektor hortikultura yang terbagi berdasarkan topografi wilayah. Wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Tukur, Puspo, dan Tosari menjadi sentra sayuran dan buah subtropis, menghasilkan kentang, paprika, wortel, kubis, serta buah-buahan premium seperti apel dan stroberi. Sementara itu, wilayah dataran rendah dan menengah dikenal sebagai penghasil buah tropis unggulan, khususnya Mangga Gadung Klonal 21 dan Mangga Garifta, serta Alpukat, Pisang Cavendish, Durian, dan Jeruk. Tak hanya buah dan sayur, florikultura juga berkembang pesat dengan komoditas tanaman hias, Anggrek, Krisan, dan Bunga Sedap Malam yang banyak ditemui di wilayah Prigen, Rembang, dan Bangil.

Sektor perkebunan komersial didukung oleh komoditas bernilai ekonomi tinggi. Tebu menjadi tanaman yang dominan di banyak kecamatan, disusul oleh Kopi dan Cengkeh yang tumbuh subur di lereng pegunungan, serta komoditas lain seperti Kapuk, Tembakau, dan Kelapa.

Sentra Peternakan yang Produktif Kabupaten Pasuruan juga dikenal sebagai sentra peternakan yang vital. Populasi ternak tersebar merata dengan spesialisasi tertentu. Komoditas sapi potong dan unggas (ayam buras, petelur, pedaging, itik) dapat ditemukan di hampir seluruh kecamatan. Namun, yang menjadi ciri khas adalah peternakan Sapi Perah. Wilayah seperti Tukur, Puspo, Purwodadi, Grati, dan Lekok menjadi pusat produksi susu segar yang signifikan. Selain itu, ternak kecil seperti kambing, domba, dan kelinci juga

dikembangkan secara luas oleh masyarakat sebagai penopang ekonomi kerakyatan.

Kekayaan Sektor Perikanan: Dari Kolam hingga Laut Potensi perikanan di Kabupaten Pasuruan melengkapi kekayaan agrarisnya. Sektor ini terbagi menjadi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di empat kecamatan dataran tinggi (Tutur, Puspo, Tosari, dan Lumbang) yang memang difokuskan untuk agrikultur pegunungan.

Di wilayah pesisir utara seperti Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok, dan Nguling sektor perikanan sangat dominan dengan hasil laut dan tambak. Perikanan tangkap menghasilkan tongkol, teri nasi, cumi-cumi, kakap, kepiting, dan udang. Sementara itu, budidaya tambak (air payau) di wilayah ini memproduksi Bandeng, Udang (Windu, Vanamei), dan Rumput Laut dalam jumlah besar.

Untuk wilayah daratan (non-pesisir), budidaya perikanan air tawar berkembang pesat melalui metode kolam. Komoditas utamanya meliputi Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, dan Patin. Keunikan tersendiri terdapat di Kecamatan Grati, yang selain memiliki potensi laut, juga mengembangkan budidaya sistem Jaring Apung (kemungkinan besar di Ranu Grati) dengan komoditas seperti Nila, Tombro, dan Gurami.

Secara keseluruhan, Kabupaten Pasuruan menunjukkan ekosistem ekonomi yang kuat dengan pembagian zonasi komoditas yang jelas antara wilayah pegunungan, dataran rendah, dan pesisir.

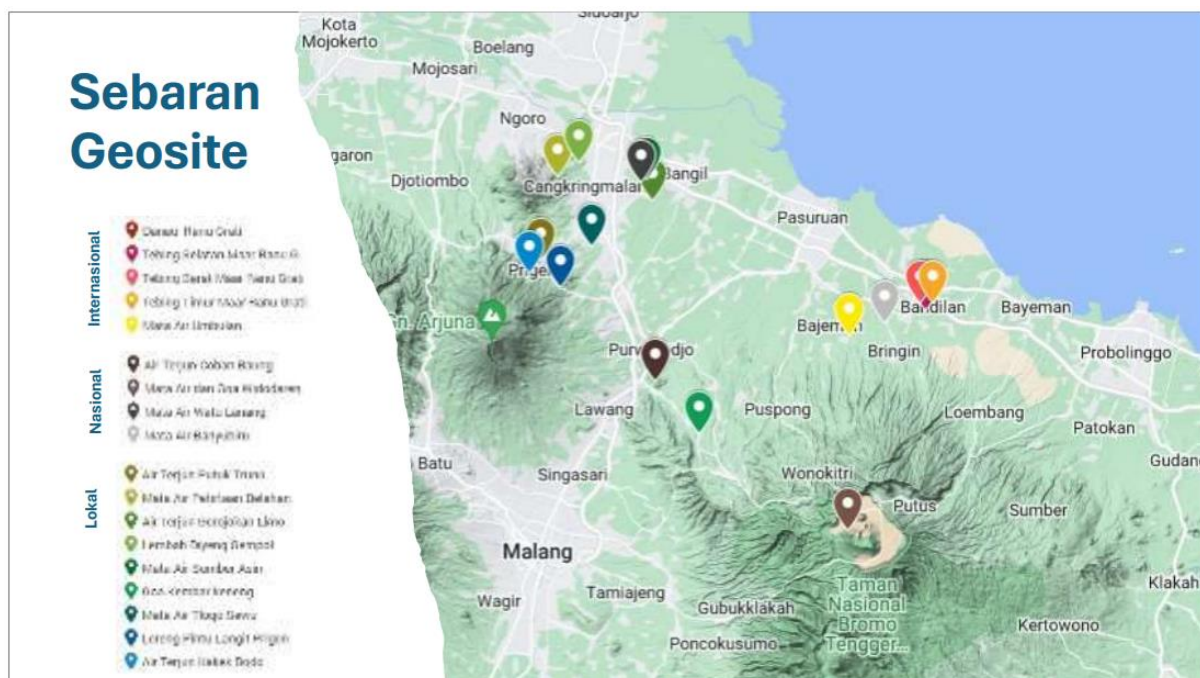
5. Potensi Keragaman Geologi

Berdasarkan pelaksanaan kajian mendalam mengenai Geoheritage (warisan geologi) yang dilakukan pada Tahun 2024, telah berhasil diidentifikasi dan diinventarisasi berbagai bentuk keragaman geologi (geodiversity) yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan. Temuan ini menunjukkan kekayaan fenomena geologis yang signifikan. Adapun hasil identifikasi geodiversity tersebut diklasifikasikan berdasarkan hierarki nilainya menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- 1) Geoheritage Bertaraf Internasional Pada tingkatan tertinggi ini, terdapat 5 (lima) situs geologi yang memiliki nilai signifikansi dunia. Situs-situs tersebut meliputi fenomena hidrologi Mata Air Artesis Umbulan, serta

kompleks vulkanik purba Ranu Grati yang terdiri secara rinci atas Danau Maar Ranu Grati beserta formasi dinding kalderanya, yakni Tebing Barat Maar Ranu Grati, Tebing Timur Maar Ranu Grati, dan Tebing Selatan Maar Ranu Grati.

- 2) Geoheritage Bertaraf Nasional Pada tingkatan nasional, teridentifikasi sebanyak 4 (empat) situs geologi yang menjadi aset penting negara. Kelompok ini mencakup Mata Air Artesis Banyubiru, pesona alam Air Terjun Coban Baung, Mata Air Watulanag, serta keunikan sistem hidrologi dan speleologi di Mata Air dan Goa Widodaren.
- 3) Geoheritage Bertaraf Lokal Pada tingkatan lokal, terdapat keragaman geologi yang paling banyak jumlahnya, yakni 9 (sembilan) situs. Situs-situs ini meliputi Mata Air Petirtaan Belahan, Air Terjun Gerojokan Limo, Mata Air Artesis Telogo Sewu, Air Terjun Kakek Bodo, Air Terjun Putuk Truno, bentang alam Lereng Pintu Langit Prigen, Mata Air Sumberasin, Goa Kembar Kaneng, serta fenomena geologi unik Brown Canyon Gempol.



Gambar 2.4 Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Kajian Geoheritage Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Air

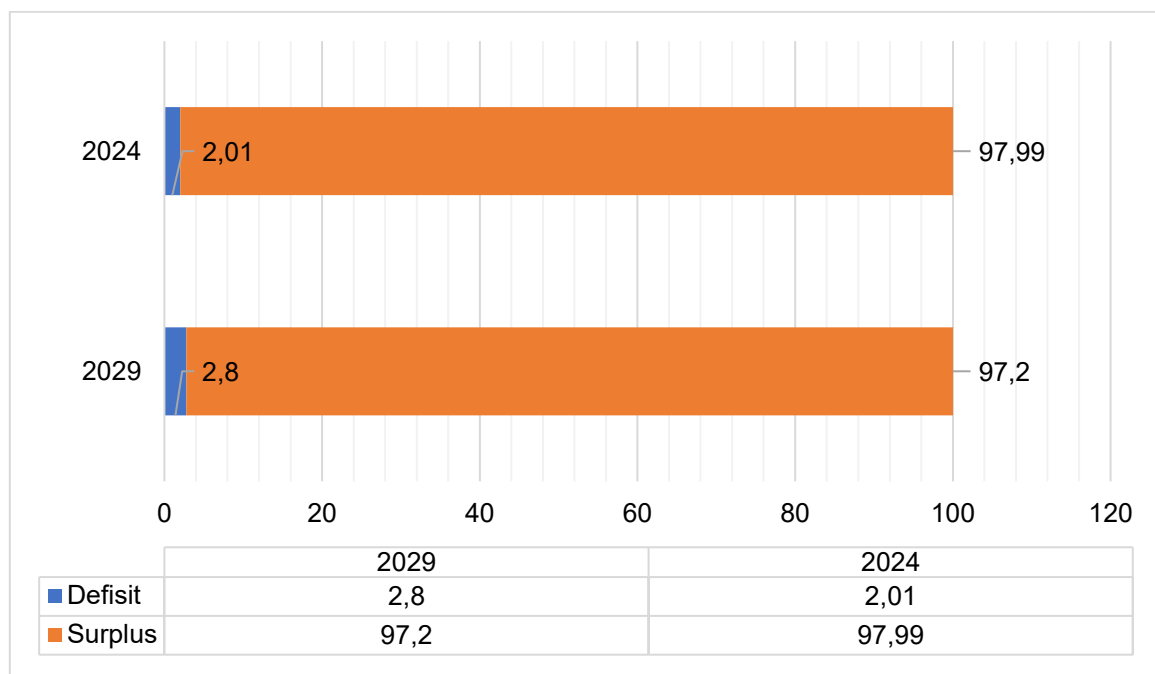
Evaluasi yang bersifat komprehensif dan mendalam mengenai keberlanjutan sumber daya alam, dengan fokus utama pada aspek daya dukung air, telah berhasil dilaksanakan sebagai bagian integral dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini disusun sebagai landasan ilmiah untuk mendukung perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan untuk periode perencanaan tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, analisis mengenai kondisi daya dukung air tanah di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial yang memiliki tingkat presisi tinggi, yakni dengan menerapkan metode sistem grid (grid system). Penggunaan pendekatan teknis ini dinilai sangat krusial karena memungkinkan dilakukannya pemetaan yang akurat dan terperinci mengenai sebaran neraca air di setiap segmen wilayah secara spesifik.

Berdasarkan hasil visualisasi dan interpretasi data spasial tersebut, dapat diidentifikasi secara jelas bagaimana kondisi ketersediaan air yang diklasifikasikan berdasarkan proporsi wilayah surplus dan wilayah defisit. Pada kondisi eksisting tahun 2024, ketahanan air di Kabupaten Pasuruan secara umum menunjukkan status yang relatif aman dan terkendali. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa mayoritas kebutuhan air di wilayah ini masih dapat terpenuhi dengan sangat baik, yang terindikasi secara statistik dengan cakupan wilayah yang berada dalam kondisi surplus mencapai angka dominan sebesar 97,99%. Kendati demikian, terdapat sinyal kerawanan dini yang sama sekali tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kepentingan, yaitu adanya 2,01% bagian wilayah yang telah teridentifikasi mulai mengalami tekanan dan berada dalam kondisi defisit air.

Lebih lanjut, apabila ditinjau berdasarkan analisis proyeksi untuk jangka menengah hingga tahun 2029, terlihat adanya tren pergeseran neraca air yang mengarah pada kondisi yang perlu diwaspadai secara serius. Berdasarkan model proyeksi tersebut, diprediksi akan terjadi peningkatan luas wilayah yang mengalami defisit menjadi 2,80%. Peningkatan area defisit ini secara otomatis akan diikuti dengan penurunan proporsi wilayah yang memiliki surplus air menjadi 97,20%. Meskipun

secara kuantitatif angka pergeseran menuju defisit tersebut tampak relatif kecil, namun adanya tren kenaikan defisit yang terjadi secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun memberikan indikasi kuat mengenai potensi penurunan daya dukung air yang berlangsung secara bertahap di masa mendatang.

Fenomena penurunan kapasitas daya dukung lingkungan ini disinyalir kuat merupakan dampak akumulatif dari berbagai faktor tekanan (driver) pembangunan. Faktor utamanya adalah peningkatan permintaan kebutuhan air baku yang beriringan dengan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, serta dampak dari fenomena perubahan iklim global yang secara signifikan mempengaruhi pola curah hujan dan siklus pengisian kembali (recharge) ketersediaan sumber daya air tanah. Oleh sebab itu, indikasi peningkatan tren defisit ini menuntut adanya langkah antisipatif yang konkret dan segera, melalui perumusan kebijakan pengelolaan tata kelola air yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas keseimbangan antara sisi kebutuhan (demand) dan sisi ketersediaan (supply) air di masa depan agar tidak terjadi krisis air. Adapun visualisasi lengkap mengenai peta sebaran kondisi daya dukung air ini telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



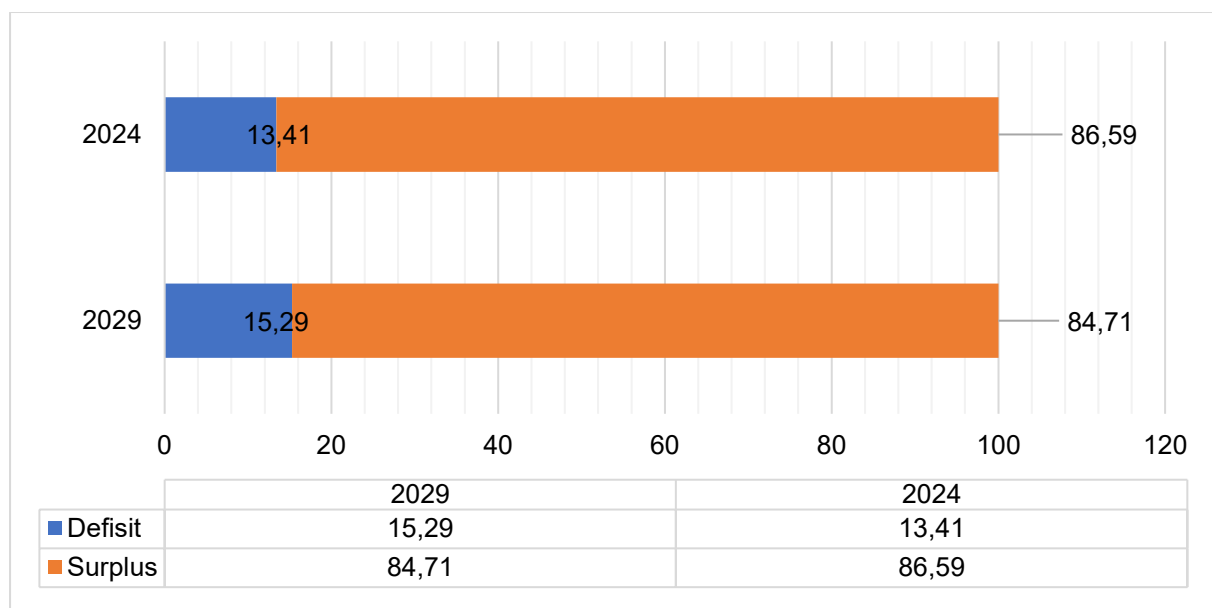
Gambar 2.5 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

B. Daya Dukung Pangan

Merujuk pada hasil analisis mendalam yang termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, gambaran mengenai kondisi daya dukung pangan di wilayah ini pada tahun 2024 menunjukkan performa ketahanan pangan yang kuat. Secara agregat, mayoritas wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam kondisi aman, yang ditandai dengan capaian kondisi surplus sebesar 86,59%. Angka persentase yang dominan ini merepresentasikan suatu kondisi di mana total ketersediaan dan pasokan pangan mampu melampaui jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat secara signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni adanya proporsi wilayah sebesar 13,41% yang teridentifikasi mengalami kondisi defisit. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil wilayah atau kelompok masyarakat tertentu yang kebutuhan pangannya belum dapat terpenuhi secara optimal dari produksi lokal atau pasokan yang ada. Untuk memahami sebaran lokasi antara area yang mengalami surplus dan area yang mengalami defisit secara lebih spesifik, visualisasi spasialnya telah disajikan secara terperinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.6 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

2.4. Ketahanan Energi

Dalam sebuah ekosistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, data demografi kependudukan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berfungsi sebagai catatan statistik semata, melainkan memegang peranan yang sangat vital dan fundamental. Data ini menjadi basis perhitungan utama dalam menyusun proyeksi kebutuhan masa depan serta alat ukur yang presisi untuk menilai tingkat ketahanan energi wilayah. Salah satu indikator kunci yang paling representatif dalam memotret kondisi tersebut adalah tingkat konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita). Secara definisi dan teknis, konsumsi listrik per kapita dipahami sebagai rasio perbandingan antara total pemakaian tenaga listrik di suatu area dibagi dengan jumlah total penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut dalam kurun waktu periode satu tahun anggaran. Angka rasio ini mencerminkan akumulasi total volume energi listrik dalam satuan kWh (kilo Watt hours) yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yang mencakup penggunaan secara langsung (rumah tangga) maupun tidak langsung (fasilitas publik dan industri) yang bersumber dari berbagai varian sumber energi yang tersedia di jaringan kelistrikan.

Merujuk pada hasil telaah mendalam terhadap data historis yang bersumber dari validasi Perusahaan Listrik Negara (PLN), terekam sebuah fenomena menarik di mana grafik konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten. Sorotan khusus dan atensi mendalam perlu ditujukan pada kondisi aktual di tahun 2024, di mana terjadi sebuah lonjakan angka konsumsi yang tergolong sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena kenaikan tajam ini bukanlah sekadar anomali statistik, melainkan memberikan indikasi kuat dan bukti empiris adanya akselerasi masif dalam aktivitas ekonomi daerah serta laju industrialisasi yang pesat. Hal ini ditandai secara nyata dengan bertumbuhnya sektor-sektor usaha baru dan ekspansi industri yang beroperasi secara intensif, yang secara otomatis mendongkrak permintaan energi.

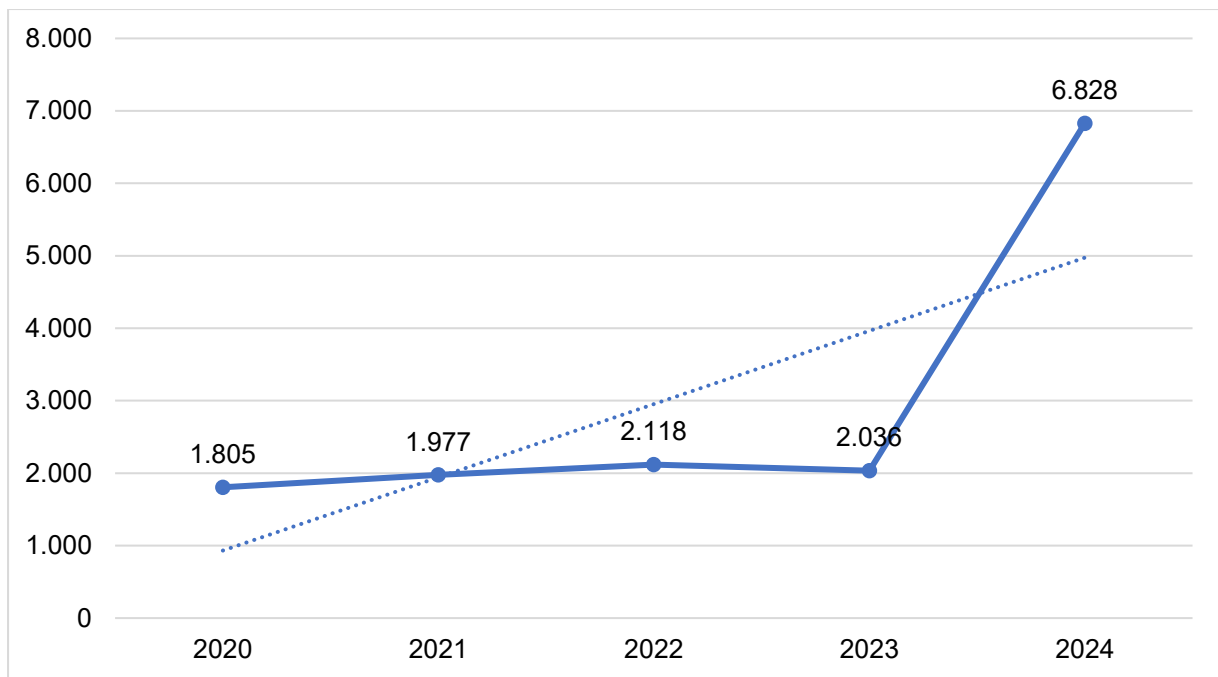
Dinamika lonjakan permintaan energi yang luar biasa ini membawa implikasi strategis yang serius dan menuntut adanya perumusan langkah-langkah penanganan yang bersifat komprehensif dan terukur. Fenomena tersebut mendorong urgensi bagi

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat sektor energi melalui tiga langkah prioritas utama, yakni:

Penguatan Infrastruktur Energi secara Masif: Sangat diperlukan upaya percepatan yang konkret dalam hal ekstensifikasi dan perluasan jangkauan jaringan listrik hingga ke seluruh pelosok wilayah untuk menjamin rasio elektrifikasi yang merata. Selain itu, pembangunan unit gardu induk baru di titik-titik lokasi strategis serta peningkatan kapasitas terpasang pada pembangkit listrik menjadi hal yang mutlak dilakukan agar sistem kelistrikan daerah mampu menopang beban puncak (peak load) yang diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan ekonomi yang pesat.

Akselerasi Diversifikasi Sumber Energi: Pemerintah perlu mendorong transformasi energi secara progresif dengan memperluas diversifikasi sumber daya energi. Langkah strategis ini diimplementasikan dengan menggali dan mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang tersedia di daerah, seperti tenaga surya atau biomassa. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah yang selama ini masih tinggi terhadap pasokan listrik berbasis bahan bakar fosil, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi: Mengimplementasikan manajemen pemakaian listrik atau Demand Side Management yang efisien, hemat, dan efektif di semua sektor. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketersediaan pasokan energi tidak hanya sekadar andal (reliable) dalam memenuhi lonjakan kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin prinsip keberlanjutan (sustainable) demi menjaga ketahanan energi jangka panjang bagi generasi masa depan."



Gambar 2.7 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

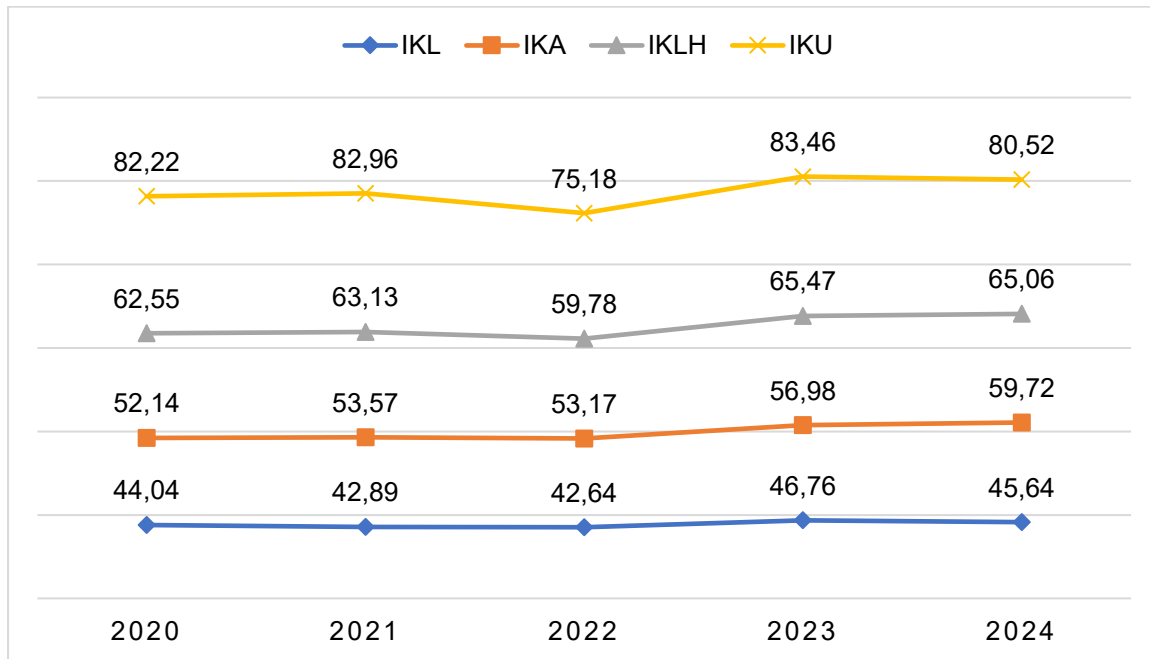
Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan, 2025

2.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pola pemanfaatan dan tata kelola penggunaan lahan di suatu wilayah bukan hanya sekadar aktivitas fisik semata, melainkan memiliki korelasi yang sangat erat serta dampak yang fundamental terhadap fluktuasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dinamika perubahan bentang alam yang didorong oleh aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi area komersial (deforestasi), ekspansi urbanisasi perkotaan yang cepat dan masif, serta penerapan sistem pertanian intensif yang eksploitatif, dapat membawa konsekuensi serius. Salah satu dampak utamanya adalah pengurangan area tutupan vegetasi hijau secara drastis yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga alami ekosistem. Kondisi ini secara berantai berpotensi memicu peningkatan polusi udara dan air, memperparah degradasi struktur dan kualitas tanah, serta menggerus kekayaan keanekaragaman hayati. Secara akumulatif, keseluruhan faktor negatif tersebut akan melemahkan daya dukung lingkungan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup daerah secara signifikan.

Sebaliknya, pergeseran menuju penerapan paradigma praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi solusi strategis yang

sangat krusial untuk memitigasi kerusakan tersebut. Strategi konkret seperti pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan serta upaya rehabilitasi lahan-lahan yang kritis atau terdegradasi terbukti mampu memberikan kontribusi positif dalam mendorong capaian IKLH. Upaya-upaya konstruktif ini berperan penting dalam menjaga stabilitas kesuburan tanah, melindungi siklus hidrologi demi keberlanjutan sumber daya air, serta memperkaya ekosistem keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi sangat fundamental, mengingat IKLH itu sendiri sejatinya merupakan nilai komposit yang terintegrasi dari tiga indikator utama performa lingkungan, yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Oleh karena itu, manajemen penggunaan lahan yang tepat tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tanah, tetapi akan berpengaruh langsung dan simultan terhadap perbaikan ketiga komponen penyusun indeks tersebut..



Gambar 2.8 Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana tervisualisasi secara jelas pada Gambar 1.11, tren capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan performa apabila disandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Penurunan agregat nilai indeks ini salah satunya dipicu oleh

merosotnya angka Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 ke tahun 2024. Analisis mendalam menunjukkan bahwa degradasi kualitas udara ini terkonsentrasi pada kawasan-kawasan dengan kepadatan transportasi tinggi, di mana emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi kontributor pencemar utama. Kondisi ini diperparah dengan minimnya keberadaan tegakan pohon sebagai penyangga (buffer) alami di titik-titik krusial, khususnya yang teridentifikasi pada lokasi sampling di Exit Tol Grati, serta sepanjang koridor jalur lalu lintas utama Pasuruan - Probolinggo, Pasuruan - Malang, dan Pasuruan - Surabaya. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan langkah mitigasi yang konkret berupa intensifikasi penanaman pohon peneduh di sepanjang jalur padat transportasi serta penerapan kebijakan yang ketat terkait pemenuhan baku mutu emisi kendaraan bermotor.

Selain faktor transportasi, penurunan kualitas lingkungan hidup secara umum juga didorong oleh akumulasi berbagai faktor tekanan lingkungan lainnya. Faktor-faktor tersebut meliputi praktik pembuangan air limbah domestik dan/atau air limbah industri yang belum memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup, atau bahkan dibuang langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan yang memadai pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di sisi lain, sektor industri juga berkontribusi melalui belum optimalnya kelengkapan alat pengendali pencemaran udara pada cerobong-cerobong sumber emisi. Masalah ini semakin kompleks dengan terjadinya fenomena alih fungsi lahan yang masif yang memicu degradasi lingkungan, belum terpenuhinya target persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, serta tren berkurangnya tutupan lahan vegetasi.

Dalam konteks pengendalian pencemaran, terdapat korelasi yang sangat signifikan antara ketersediaan RTH di wilayah perkotaan maupun peningkatan tutupan lahan terhadap perbaikan kualitas udara. Vegetasi dalam RTH memiliki fungsi vital ekologis dalam kemampuan penyerapan berbagai polutan udara berbahaya (seperti debu partikulat, CO, SO₂, dan NO₂). Saat ini, sebaran aset RTH telah mencakup wilayah perkotaan di seluruh kecamatan (24 Kecamatan). Guna meningkatkan fungsi ekologis tersebut, serangkaian upaya strategis untuk optimalisasi RTH terus dilakukan, yang meliputi:

1. Ekstensifikasi RTH: Meningkatkan kuantitas ketersediaan RTH di kawasan perkotaan melalui pembangunan titik-titik lokasi RTH baru yang representatif.

2. Pemanfaatan Lahan Sempadan: Mengoptimalkan fungsi lahan sempadan sebagai sabuk hijau (green belt), mencakup area sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalur SUTTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi Ekstra Tinggi), sempadan rel kereta api, hingga sempadan danau.
3. Program PJLH: Mengoptimalkan program Penyedia Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang difokuskan pada penyediaan lahan konservasi tanaman keras baik jenis kayu-kayuan maupun tanaman buah-buahan produktif khususnya pada area di luar Kawasan Hutan Negara.

Sementara itu, pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL), juga tercatat adanya penurunan nilai indeks dari tahun 2023 ke tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa penurunan ini utamanya disebabkan oleh kendala administratif teknis dalam proses penetapan delineasi tutupan vegetasi pada sistem aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada verifikasi data tahun 2023, delineasi tutupan lahan telah terverifikasi valid sehingga berkontribusi pada lonjakan signifikan nilai IKL dibanding tahun 2022. Namun, pada saat proses verifikasi ulang untuk data tahun 2024, sebagian data delineasi mengalami penolakan (reject) oleh tim verifikator pusat. Penolakan ini terjadi akibat ditemukannya tumpang tindih (overlap) delineasi dan titik koordinat dalam satu wilayah yang sama. Konsekuensinya, luasan tutupan vegetasi yang diakui secara sistem menjadi berkurang, sehingga nilai IKL tahun 2024 mengalami koreksi penurunan akibat penyesuaian data tersebut. Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya perbaikan mendasar dalam hal peningkatan akurasi inventarisasi data serta presisi dalam delineasi peta tutupan lahan di masa mendatang.

2.6. Kawasan Rawan bencana dan Perubahan Iklim

Kawasan rawan bencana didefinisikan sebagai wilayah atau area geografis yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk mengalami dampak buruk dari berbagai jenis fenomena, baik itu bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia (*man-made disaster*). Tingginya tingkat kerawanan ini tidak terlepas dari karakteristik kondisi geofisik wilayah Kabupaten Pasuruan yang sangat kompleks dan beragam. Keberadaan jajaran gunung berapi aktif, hamparan dataran rendah yang luas, serta kondisi ekologis dataran tinggi yang mulai mengalami degradasi

lingkungan, menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki spektrum potensi bencana alam yang cukup luas.

Berdasarkan pemetaan potensi, terdapat enam kategori utama kawasan rawan bencana di wilayah ini, yaitu:

1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi Wilayah Kabupaten Pasuruan diapit oleh aktivitas vulkanik yang signifikan. Potensi ini terbagi menjadi dua klaster utama. Pertama, Kawasan Gunung Bromo yang memiliki area rawan bencana seluas 1.320 Ha serta daerah dengan status waspada seluas 751 Ha. Area ini secara administratif mencakup Desa Ngadirejo, Desa Mororejo, Desa Wonokitri, dan Desa Kedawung yang terletak di Kecamatan Tosari. Kedua, Kawasan Gunung Welirang yang memiliki area rawan bencana seluas 1.368 Ha dan daerah waspada seluas 809 Ha. Wilayah paparannya meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, serta meluas hingga Desa Cendono, Desa Sumberejo, dan Desa Tambaksari di wilayah Kecamatan Purwosari.
2. Kawasan Rawan Longsor dan Gerakan Tanah Mengingat topografi wilayah yang berbukit, potensi kawasan rawan longsor di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi cukup luas, yakni mencapai 37.626,4 Ha. Kerawanan ini secara spesifik terdapat di wilayah dengan tingkat kemiringan lereng yang curam, yaitu lebih dari 40% (kelerengan > 40%). Zona merah kerawanan longsor ini terkonsentrasi di kawasan dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Tuter, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, dan Kecamatan Prigen.
3. Kawasan Rawan Banjir Ancaman hidrometeorologi berupa banjir memiliki potensi luasan terdampak sebesar 11.948,15 Ha. Bencana ini dominan mengancam wilayah dataran rendah atau daerah hilir yang menjadi muara dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Kecamatan yang masuk dalam zona rawan ini antara lain Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Winongan. Mekanisme banjir umumnya dipicu oleh tingginya curah hujan di

daerah hulu sungai yang tidak mampu tertampung sehingga mengakibatkan air meluap ke kawasan hilir. Selain banjir luapan sungai, terdapat pula ancaman banjir pasang air laut atau *rob* yang secara spesifik mengancam wilayah pesisir, khususnya di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton.

4. Kawasan Rawan Angin Puyuh/Puting Beliung Fenomena cuaca ekstrem berupa angin puyuh atau puting beliung memiliki potensi kejadian di wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan, dan Kecamatan Sukorejo. Selain itu, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan di beberapa kecamatan lain, mengingat adanya tren anomali iklim yang semakin tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir yang dapat memicu kejadian serupa di lokasi yang lebih luas.
5. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Potensi kebakaran hutan mengancam wilayah-wilayah yang memiliki tutupan vegetasi hutan dan semak belukar yang kering, terutama saat musim kemarau. Area yang rentan meliputi Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dikelola oleh Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, Cagar Alam Gunung Abang, serta Taman Wisata Alam (TWA) Tretes. Selain itu, kawasan pegunungan di R. Soeryo serta kompleks Pegunungan Arjuno, Welirang, dan Penanggungan yang mencakup wilayah Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol juga memiliki risiko tinggi terhadap karhutla.
6. Kawasan Rawan Kekeringan Ancaman bencana kekeringan di Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan risiko berdasarkan intensitas dan dampaknya, yaitu:
 - Ancaman Kekeringan Tinggi: Berpotensi terjadi secara meluas di beberapa desa, meliputi:
 - Kecamatan Lumbang: Desa Kronto, Desa Pancur, Desa Karang Asem, Desa Cukurguling, Desa Lumbang, Desa Bulukandang, Desa Karangjati, dan Desa Watulumbung.

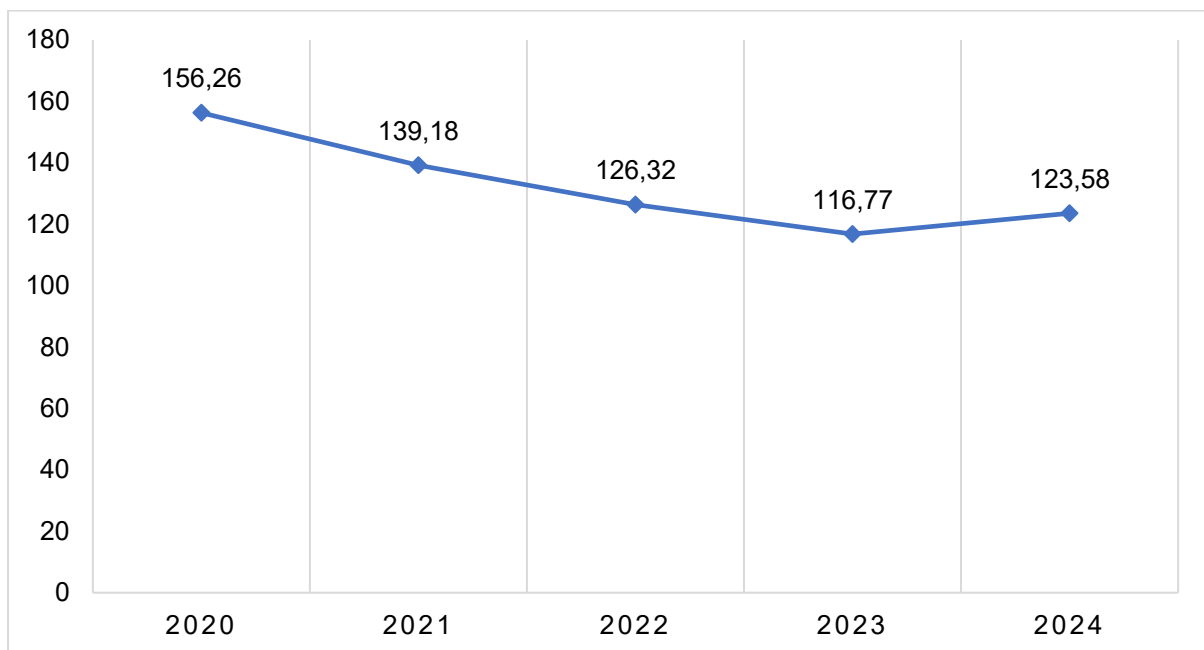
- Kecamatan Kejayan: Desa Ambal-Ambil, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Desa Lorokan, Desa Kedungpengaron, dan Desa Benerwojo.
 - Kecamatan Lekok: Desa Pasinan, Desa Wates, Desa Semedusari, dan Desa Branang.
 - Kecamatan Winongan: Desa Kedungrejo, Desa Umbulan, Desa Jeladri, Desa Sumberejo, dan Desa Sruwi.
 - Kecamatan Puspo: Desa Palangsari, Desa Puspo, dan Desa Jimbaran.
 - Kecamatan Gempol: Desa Bulusari.
 - Kecamatan Grati: Desa Karanglo.
- Ancaman Kekeringan Sedang: Teridentifikasi di wilayah Kecamatan Pasrepan, mencakup Desa Sapulante, Desa Mangguan, Desa Petung, Desa Sibon, Desa Lemahbang, dan Desa Tambakrejo.
 - Ancaman Kekeringan Rendah: Terjadi pada skala terbatas di Kecamatan Lumbang (Desa Banjarimbo dan Desa Welulang) serta Kecamatan Winongan (Desa Minggir).

Seluruh potensi kebencanaan yang telah diuraikan sebelumnya dipotret secara sistematis dan dianalisis secara komprehensif melalui instrumen Indeks Risiko Bencana (IRB). Instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko secara kuantitatif dengan menilai probabilitas serta besaran dampak yang diperkirakan akan muncul apabila suatu ancaman benar-benar termanifestasi menjadi peristiwa bencana di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, IRB tidak hanya merekam keberadaan ancaman, tetapi juga menggambarkan konsekuensi nyata yang mungkin ditimbulkan terhadap manusia, aset, lingkungan, dan aktivitas sosial-ekonomi wilayah.

Secara metodologis, IRB merupakan hasil integrasi dari tiga komponen utama, yaitu indeks ancaman (hazard) yang merepresentasikan intensitas dan frekuensi potensi bahaya, indeks kerentanan (vulnerability) yang mencerminkan tingkat

keterpaparan dan kelemahan sistem sosial, ekonomi, fisik, serta lingkungan, dan indeks kapasitas (capacity) yang menunjukkan kemampuan daerah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons terhadap bencana. Interaksi ketiga komponen tersebut menghasilkan gambaran risiko yang utuh dan proporsional, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian yang objektif dan terukur.

Hasil pengkajian risiko bencana berbasis IRB ini menjadi landasan strategis dalam perumusan kebijakan dan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Strategi PRB diarahkan secara simultan untuk menekan tingkat bahaya dan kerentanan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan aspek sosial dan ekonomi, serta perlindungan lingkungan, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, IRB berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan yang bersifat preventif dan berorientasi pada ketahanan wilayah. Adapun tren capaian nilai IRB Kabupaten Pasuruan secara visual disajikan dalam gambar berikut sebagai ilustrasi dinamika tingkat risiko bencana dari waktu ke waktu.:



Gambar 2.9 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

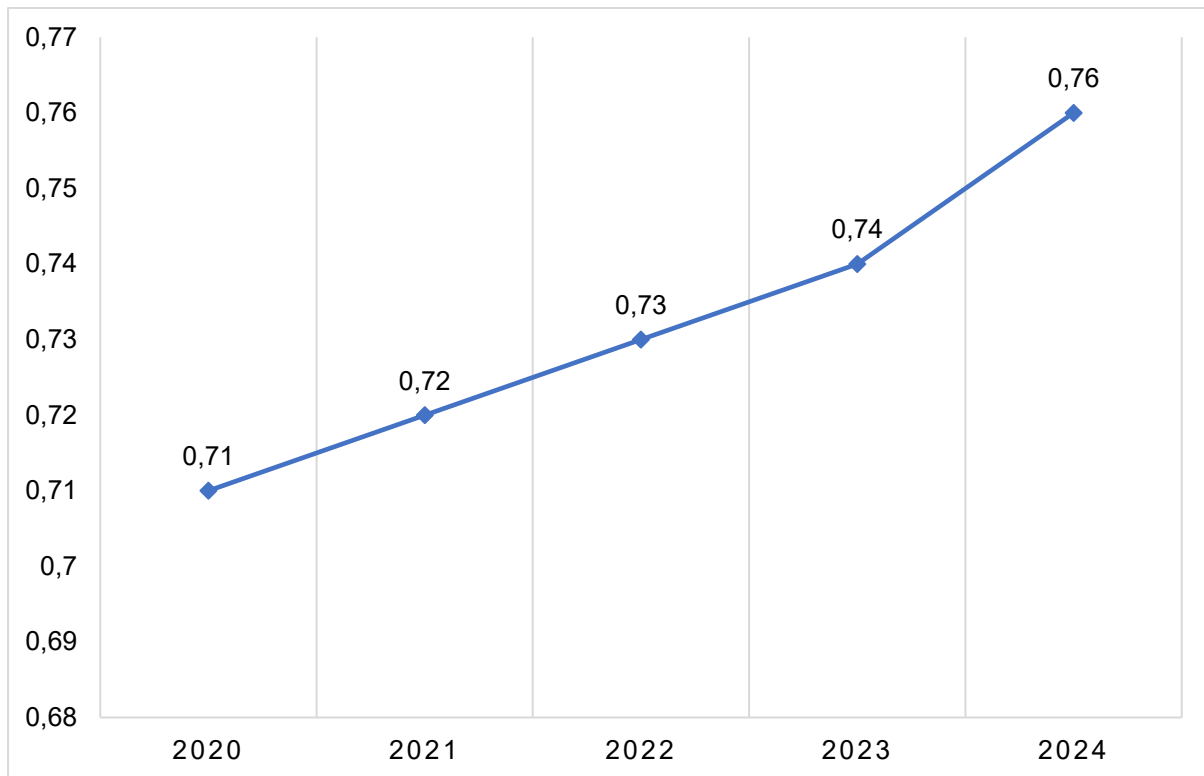
Catatan: Tahun 2024 menggunakan data H&V 2021

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap data runtun waktu (*time series*) yang mencakup periode lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024, kinerja penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan memperlihatkan capaian yang sangat positif dan menggembirakan. Indikator keberhasilan ini tercermin jelas dari nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) yang secara konsisten mengalami tren penurunan di setiap tahun pelaporannya. Akumulasi dari berbagai upaya strategis penurunan risiko yang dilakukan secara berkelanjutan ini telah berhasil mengubah peta kerawanan daerah, sehingga menempatkan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 masuk ke dalam kategori risiko bencana tingkat Sedang, sebuah perbaikan status yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian substansial dalam penurunan risiko bencana ini didorong secara signifikan oleh penguatan partisipasi aktif masyarakat di tingkat tapak, utamanya melalui akselerasi program pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). Progresivitas pembentukan dan pemberdayaan desa tangguh ini terlihat sangat nyata dari data pertumbuhan tahunan yang terus menunjukkan grafik meningkat. Pada tahun 2020, tercatat baru terdapat 10 desa/kelurahan yang berstatus tangguh bencana. Jumlah ini kemudian bertambah secara bertahap menjadi 14 desa/kelurahan pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi 18 desa/kelurahan pada tahun 2022, dan mencapai 20 desa/kelurahan pada tahun 2023. Puncaknya, terjadi lonjakan kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2024 dengan total capaian kumulatif sebanyak 30 desa/kelurahan yang telah berhasil dikukuhkan statusnya sebagai wilayah tangguh bencana.

Ditinjau secara teoritis maupun praktis, tren penurunan nilai IRB ini memiliki korelasi linier yang kuat dan berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman. Fenomena positif ini selaras dengan naiknya grafik Indeks Ketahanan Daerah (IKD), sebuah metrik yang merepresentasikan tingkat kesiapan dan ketangguhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola keseluruhan siklus manajemen bencana. Peningkatan ketahanan daerah yang solid ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dibangun di atas fondasi penguatan lima pilar utama kapasitas yang fundamental, yaitu penguatan struktur kelembagaan yang responsif, optimalisasi sistem peringatan dini (*early warning system*) yang akurat, penyelenggaraan pendidikan kebencanaan yang masif kepada publik, serta

implementasi upaya mitigasi fisik maupun non-fisik dan kesiapsiagaan yang terencana dengan matang. Gambaran komprehensif mengenai hubungan kausalitas antara penurunan risiko dan peningkatan ketahanan daerah ini disajikan secara visual dalam Gambar berikut:



Gambar 2.10 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

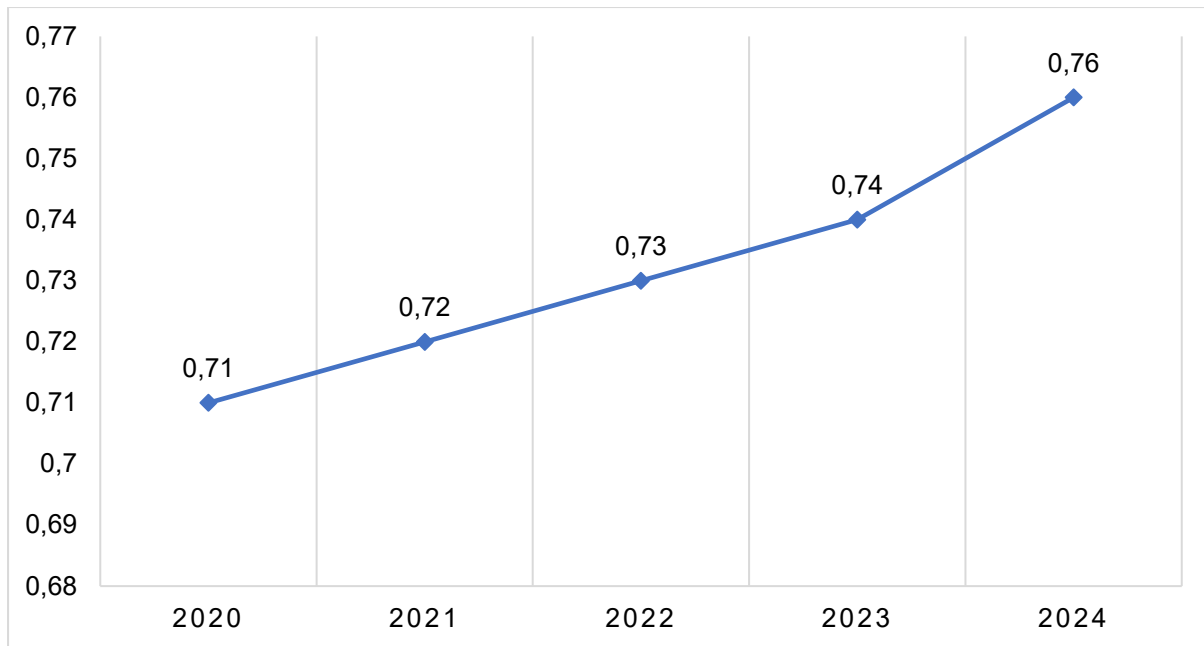
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Eskalasi fenomena bencana alam yang melanda suatu wilayah kini tidak lagi dapat dipandang secara parsial sebagai akibat tunggal dari faktor kerawanan geofisik lokal semata. Lebih jauh dari itu, frekuensi dan intensitas bencana telah berakselerasi secara dramatis akibat dampak destruktif dari fenomena global perubahan iklim. Perubahan iklim ini memicu efek domino yang luas, sistemik, dan multidimensi, yang tidak hanya mengancam stabilitas pertumbuhan sektor ekonomi dan menghambat produktivitas daerah, tetapi juga memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat secara umum melalui munculnya vektor penyakit baru, hingga mengganggu keseimbangan ekosistem alam yang vital. Secara spesifik, ancaman langsung yang paling nyata dan meresahkan dari krisis iklim ini bermanifestasi dalam bentuk kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang secara spesifik membahayakan keberlangsungan kawasan

pesisir melalui ancaman abrasi dan banjir rob, serta anomali cuaca berupa peningkatan intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang polanya semakin volatil, acak, dan sulit diprediksi dampaknya.

Merespons dinamika lingkungan yang semakin kritis tersebut, implementasi upaya mitigasi perubahan iklim menjadi langkah mutlak, imperatif, dan mendesak yang harus dilakukan guna mereduksi risiko kerusakan sistemik bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Dalam kerangka strategis ini, pelaksanaan kegiatan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) menempati posisi sentral sebagai langkah fundamental atau batu pijakan awal. Upaya inventarisasi ini bertujuan untuk menyediakan basis data yang akurat, valid, dan komprehensif guna mengidentifikasi, mengukur, serta memetakan sumber-sumber emisi karbon secara presisi. Tujuannya adalah agar strategi pengurangan emisi dapat dirumuskan secara *evidence-based* dan dieksekusi secara terukur, sistematis, serta tepat sasaran pada sektor-sektor prioritas yang menjadi penyumbang emisi terbesar, seperti sektor energi, limbah, maupun pertanian.

Selanjutnya, efektivitas kinerja mitigasi daerah ini dievaluasi secara ketat melalui indikator intensitas emisi GRK, dengan fokus utama pada parameter Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam satuan ton CO₂ ekuivalen (ton CO₂eq). Berdasarkan hasil pemantauan data terintegrasi melalui platform Sistem Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Nasional Rendah Karbon (AKSARA) dengan data mutakhir yang diakses pada tanggal 30 Mei 2024, tercatat fakta yang menggembirakan bahwa potensi penurunan emisi di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren positif berupa kenaikan grafik yang sangat signifikan sejak tahun dasar 2020. Lonjakan capaian angka potensi penurunan ini bukan sekadar representasi statistik di atas kertas semata, melainkan sebuah manifestasi konkret dari kuatnya komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam berkontribusi aktif menyukseskan upaya global mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, demi mewujudkan visi pembangunan daerah yang rendah karbon, hijau, dan berkelanjutan. Adapun rincian detail mengenai tren capaian komitmen penurunan emisi ini divisualisasikan secara lengkap pada Gambar berikut:



Gambar 2.11 Penurunan Emisi GRK Kumulatif di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024 (AKSARA, 30 Mei 2024)

2.7. Demografi

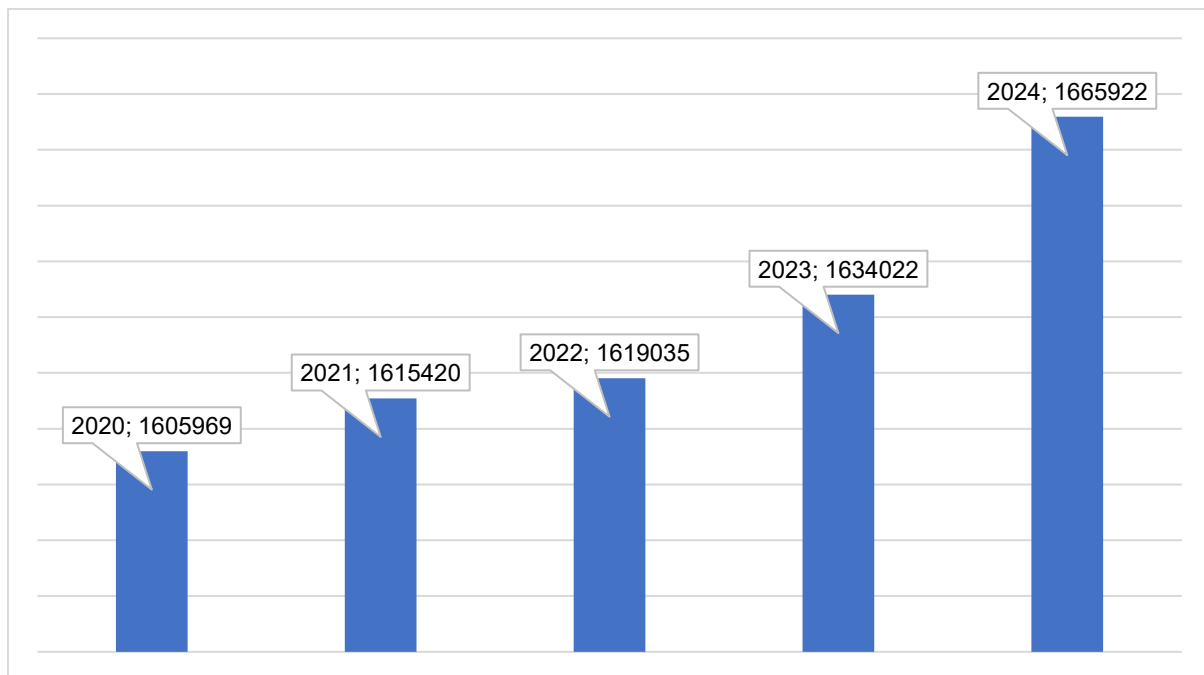
Dalam perspektif pembangunan daerah yang holistik, penduduk menempati posisi sentral sebagai salah satu modal dasar (basic capital) yang paling fundamental. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya disandarkan pada aspek kuantitas atau besaran jumlah penduduk semata, melainkan harus diimbangi dengan perhatian yang serius terhadap aspek kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar memang memiliki potensi, tetapi apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas, justru berpotensi memicu permasalahan sosial yang kompleks dan bertransformasi menjadi beban atau hambatan (liability) dalam akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan analisis terhadap data runtun waktu selama periode lima tahun (2020-2024) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, dinamika kependudukan di wilayah ini menunjukkan tren yang dinamis. Tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan secara konsisten mengalami kenaikan,

dengan catatan khusus pada tahun 2024 di mana laju pertumbuhan penduduk mengalami lonjakan peningkatan yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam periode tersebut.

Data tren demografi ini memegang nilai signifikansi yang tinggi sebagai basis data utama dalam formulasi perencanaan pembangunan strategis maupun perumusan kebijakan sosial di daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan populasi penduduk yang besar secara langsung berkorelasi dengan jaminan ketersediaan pasokan tenaga kerja (labor supply). Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat krusial untuk mengisi kebutuhan pasar kerja dan menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor unggulan, mulai dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan yang masif, hingga sektor jasa. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang sehat dan terkendali diharapkan mampu menjamin ketersediaan jumlah angkatan kerja yang produktif guna mendukung daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2.12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Analisis terhadap perkembangan demografi di Kabupaten Pasuruan selama periode lima tahun terakhir (2020-2024) memperlihatkan tren yang cukup dinamis. Berdasarkan data visualisasi grafik, jumlah total penduduk secara konsisten mengalami tren kenaikan positif di setiap tahunnya, bergerak dari angka 1.605.969

jiwa pada tahun 2020 hingga mencapai 1.665.922 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan kuantitas ini mencerminkan daya tarik wilayah serta pertumbuhan alami yang terus berjalan.

Namun, jika ditinjau dari sisi laju pertumbuhan penduduk (LPP), tren yang terjadi menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan, yang merefleksikan dinamika keberhasilan dan tantangan dalam kebijakan kependudukan:

1. Fase Akselerasi Awal (2021-2022): Terjadi peningkatan laju pertumbuhan dari 0,59% pada tahun 2021 menjadi 0,81% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya lonjakan pertumbuhan pasca-awal pandemi.
2. Fase Perlambatan (2023): Pada tahun 2023, laju pertumbuhan berhasil ditekan secara signifikan menjadi 0,58%. Angka ini menjadi titik terendah dalam periode pengamatan, yang mengindikasikan efektivitas intervensi program pengendalian penduduk pada tahun tersebut.
3. Fase Percepatan Kembali (2024): Memasuki tahun 2024, terjadi *rebound* atau percepatan kembali laju pertumbuhan yang cukup tajam mencapai angka 0,93%.

Secara keseluruhan, fluktuasi ini khususnya kemampuan daerah dalam menekan laju pertumbuhan pada periode tertentu (seperti tahun 2023) mengindikasikan bahwa instrumen dan program pengendalian penduduk di Kabupaten Pasuruan telah berjalan, meskipun masih menghadapi tantangan volatilitas yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pola naik-turunnya laju pertumbuhan ini menjadi *baseline* penting untuk evaluasi strategi keluarga berencana dan manajemen migrasi di masa mendatang.

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Selain aspek pertumbuhan, pemahaman mengenai struktur umur penduduk adalah faktor kunci dalam perencanaan kebijakan publik, baik di sektor ekonomi maupun sosial. Dengan membedah komposisi umur, pemerintah dapat merancang program yang lebih presisi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan kelompok usia dominan.

Berikut adalah rincian data jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan menurut Kelompok Umur Tahun 2024

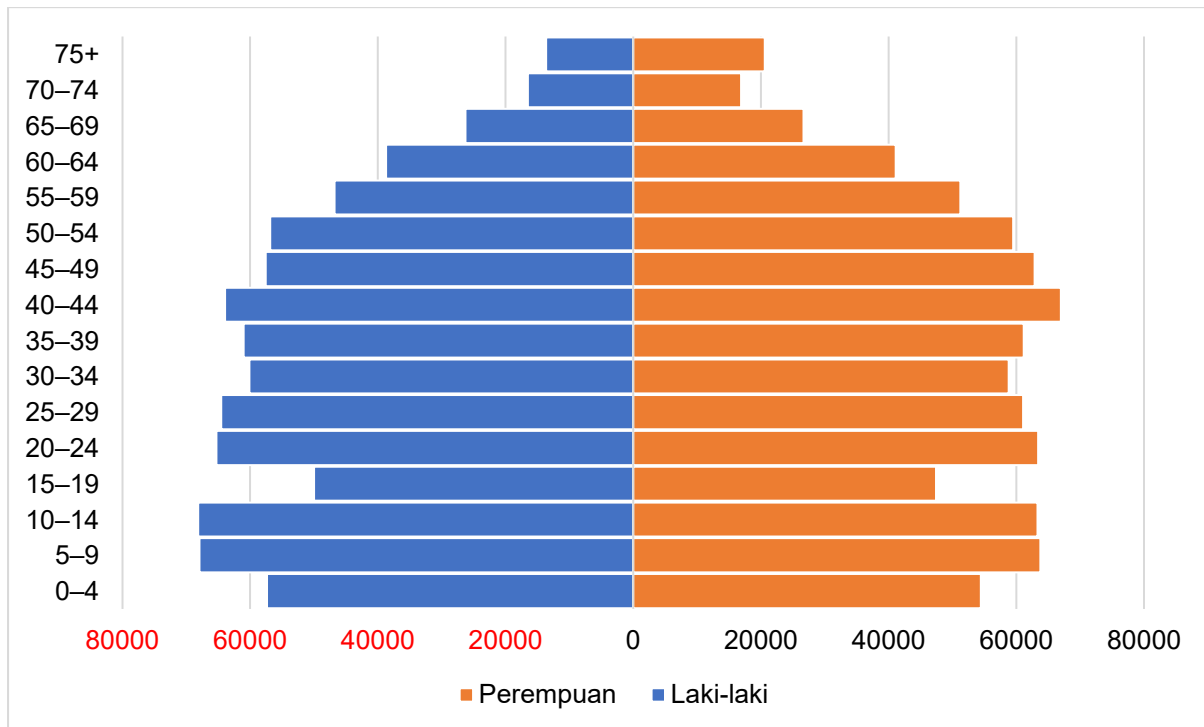
Kelompok Umur	Laki-laki (Ribuan Jiwa)	Perempuan (Ribuan Jiwa)	Jumlah (Ribuan Jiwa)
0–4	56.368	53.125	109.493
5–9	68.274	64.265	132.539
10–14	69.017	63.829	132.846
15–19	56.037	53.250	109.287
20–24	65.200	62.932	128.132
25–29	65.440	61.660	127.100
30–34	61.188	59.399	120.587
35–39	60.187	60.282	120.469
40–44	64.422	66.562	130.984
45–49	58.813	64.015	122.828
50–54	56.437	59.406	115.843
55–59	49.169	54.314	103.483
60–64	39.426	42.340	81.766
65–69	28.007	29.118	57.125
70–74	18.166	18.164	36.330
75+	14.954	22.156	37.110
Jumlah	831.105	834.817	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Merujuk pada Tabel di atas, dapat diidentifikasi pola persebaran usia yang signifikan. Kelompok umur 10-14 tahun tercatat sebagai kelompok dengan jumlah populasi tertinggi. Temuan ini membawa implikasi kebijakan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas fasilitas pendidikan menengah serta program pengembangan anak dan remaja.

Di sisi lain, jumlah penduduk terendah berada pada kelompok lansia (umur 70-74 tahun dan 75+). Angka yang mengecil pada kelompok usia lanjut ini dapat mengindikasikan adanya tingkat mortalitas yang lebih tinggi pada segmen tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor akses terhadap layanan kesehatan geriatri, kondisi kesehatan umum, atau faktor sosial ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Gambaran lebih komprehensif mengenai struktur demografi dapat dilihat melalui bentuk piramida penduduk yang menggabungkan variabel umur dan jenis kelamin. Visualisasi ini krusial untuk menentukan karakteristik demografi suatu wilayah, apakah sedang tumbuh, stagnean, atau menua. Berikut adalah visualisasi Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2024:



Gambar 2.13 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana terlihat pada Gambar tersebut, piramida penduduk Kabupaten Pasuruan dikategorikan sebagai jenis Piramida Ekspansif. Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini berada dalam fase pertumbuhan (*growing population*).

Karakteristik utama dari piramida ekspansif ini meliputi:

1. Dominasi Penduduk Usia Muda: Sebagian besar populasi terkonsentrasi pada kelompok usia anak-anak dan remaja, yang menjadi basis bagi bonus demografi di masa depan.

2. Proporsi Lansia Kecil: Kelompok usia tua jumlahnya semakin mengerucut di bagian atas piramida.
3. Tingkat Kelahiran Tinggi: Dasar piramida yang lebar mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran bayi masih cukup tinggi.
4. Pertumbuhan Penduduk Tinggi: Secara agregat, wilayah ini masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, yang menuntut penyediaan lapangan kerja dan layanan dasar yang masif.

C. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

Dinamika persebaran penduduk merefleksikan pola konsentrasi pemukiman yang dipengaruhi oleh daya dukung wilayah dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan analisis data demografi Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2024 yang mencakup 24 kecamatan, terlihat adanya pola distribusi yang tidak merata antarwilayah.

Kecamatan Gempol secara konsisten tercatat sebagai wilayah dengan densitas demografi tertinggi, dengan jumlah penduduk mencapai 133.197 jiwa pada tahun 2024. Tingginya angka ini menempatkan Gempol sebagai pusat konsentrasi penduduk utama di kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Tosari menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 18.925 jiwa pada tahun 2024. Jumlah ini merepresentasikan proporsi yang sangat kecil, yakni hanya sekitar 1,2% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Pasuruan, yang mengindikasikan karakteristik wilayah yang mungkin lebih didominasi oleh kawasan lindung atau topografi pegunungan dengan pemukiman yang terbatas.

Rincian lengkap data tren persebaran penduduk di setiap kecamatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	70.015	70.438	70.601	71.345	72.781
2	Tutur	53.743	53.887	53.830	55.107	56.187
3	Puspo	27.722	27.771	27.778	28.164	28.762
4	Tosari	18.799	18.818	18.837	18.550	18.925
5	Lumbang	35.174	35.385	35.464	35.879	36.681

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
6	Pasrepan	52.396	52.594	52.596	53.259	54.556
7	Kejayan	65.374	65.603	65.589	67.235	68.733
8	Wonorejo	59.864	60.186	60.286	61.112	62.326
9	Purwosari	84.137	84.706	84.962	86.266	88.051
10	Prigen	87.227	87.649	87.745	88.671	90.372
11	Sukorejo	87.477	88.069	88.336	88.839	90.568
12	Pandaan	111.062	111.563	111.651	112.299	114.237
13	Gempol	129.990	130.596	130.719	130.809	133.197
14	Beji	87.022	87.864	88.385	89.930	91.405
15	Bangil	83.307	83.671	83.724	84.241	85.504
16	Rembang	66.711	67.294	67.631	68.840	70.810
17	Kraton	88.525	88.912	88.969	88.535	90.315
18	Pohjentrek	31.296	31.581	31.751	31.436	31.900
19	Gondangwetan	56.264	56.589	56.705	57.339	58.533
20	Rejoso	46.766	47.036	47.132	48.366	49.070
21	Winongan	44.287	44.569	44.686	45.565	46.331
22	Grati	78.930	79.368	79.512	80.858	82.186
23	Lekok	77.514	78.176	78.551	78.286	80.139
24	Nguling	62.367	63.095	63.595	63.091	64.353
Kabupaten Pasuruan		1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Indikator kepadatan penduduk merupakan parameter krusial dalam perencanaan tata ruang, karena menggambarkan intensitas tekanan demografis terhadap daya dukung lingkungan. Secara teoritis, standar kepadatan penduduk yang dianggap ideal untuk kenyamanan ruang hidup adalah 500 jiwa per kilometer persegi (km^2). Semakin tinggi angka kepadatan di atas ambang batas tersebut, semakin besar pula tantangan dalam penyediaan infrastruktur, sanitasi, dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik tahun 2024, distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan disparitas yang sangat tajam antarwilayah. Secara agregat, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan telah mencapai 1.130,19 jiwa/ km^2 , angka yang jauh melampaui ambang batas ideal.

Tingkat kepadatan tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Pohjentrek, dengan angka densitas mencapai 2.685,19 jiwa/ km^2 . Angka ini mengindikasikan kondisi wilayah yang sangat padat (*overcrowded*), yang juga diikuti oleh wilayah urban lainnya

seperti Kecamatan Pandaan (2.640,10 jiwa/km²) dan Kecamatan Beji (2.290,85 jiwa/km²). Tingginya kepadatan di wilayah-wilayah ini menuntut prioritas pada penataan kawasan kumuh dan manajemen limbah domestik.

Di sisi lain, spektrum kepadatan terendah berada di Kecamatan Tosari, dengan angka densitas hanya sebesar 193,11 jiwa/km². Wilayah ini, bersama dengan Kecamatan Lumbang (292,16 jiwa/km²) dan Kecamatan Puspo (492,92 jiwa/km²), menjadi satu-satunya tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang masih berada dalam kategori kepadatan ideal (di bawah 500 jiwa/km²). Rendahnya kepadatan di wilayah-wilayah ini umumnya berkorelasi dengan karakteristik topografi pegunungan dan fungsi kawasan sebagai area konservasi atau pertanian.

Rincian lengkap mengenai tren kepadatan penduduk di seluruh kecamatan dari tahun 2021 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	687,47	689,06	696,32	710,34
2	Tutur	624,41	623,75	638,55	651,07
3	Puspo	475,94	476,06	482,67	492,92
4	Tosari	192,02	192,21	189,29	193,11
5	Lumbang	281,84	282,47	285,77	292,16
6	Pasrepan	584,70	584,72	592,10	606,51
7	Kejayan	828,84	828,67	849,46	868,39
8	Wonorejo	1.272,43	1.274,55	1.292,01	1.317,67
9	Purwosari	1.414,83	1.419,11	1.440,89	1.470,70
10	Prigen	719,02	719,81	728,79	741,36
11	Sukorejo	1.513,73	1.518,32	1.524,08	1.556,69
12	Pandaan	2.578,30	2.580,33	2.595,31	2.640,10
13	Gempol	2.011,65	2.013,54	2.014,93	2.051,71
14	Beji	2.202,11	2.215,16	2.253,88	2.290,85
15	Bangil	1.876,03	1.877,22	1.888,81	1.917,13
16	Rembang	1.582,64	1.590,57	1.619,00	1.665,33
17	Kraton	1.751,96	1.753,08	1.744,53	1.779,61
18	Pohjentrek	2.658,33	2.672,64	2.646,13	2.685,19
19	Gondangwetan	2.155,77	2.160,19	2.184,34	2.229,83
20	Rejoso	1.271,24	1.273,84	1.307,19	1.326,22

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
21	Winongan	969,52	972,07	991,19	1.007,85
22	Grati	1.562,98	1.565,81	1.592,32	1.618,47
23	Lekok	1.678,68	1.686,73	1.681,04	1.720,83
24	Nguling	1.481,10	1.492,84	1.481,01	1.510,63
Kabupaten Pasuruan		1.095,93	1.098,38	1.108,55	1.130,19

1 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) merupakan indikator demografi vital yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Keseimbangan rasio ini memiliki implikasi strategis dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Berdasarkan analisis, terlihat adanya dinamika pergeseran struktur gender penduduk di Kabupaten Pasuruan selama empat tahun terakhir. Pada periode tahun 2021 hingga 2022, Kabupaten Pasuruan masih didominasi oleh penduduk laki-laki, ditandai dengan angka rasio di atas 100, yakni 100,13 pada tahun 2021 dan 100,11 pada tahun 2022.

Namun, memasuki tahun 2023 dan 2024, terjadi titik balik (*turning point*) di mana komposisi penduduk perempuan mulai lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Hal ini tecermin dari penurunan angka rasio menjadi 99,45 pada tahun 2023 dan sedikit naik namun tetap di bawah seratus pada angka 99,56 di tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa saat ini jumlah penduduk perempuan secara agregat lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Jika ditinjau lebih spesifik per wilayah kecamatan pada tahun 2024, terdapat variasi yang cukup mencolok. Beberapa kecamatan masih mempertahankan dominasi laki-laki, seperti Kecamatan Prigen dengan rasio tertinggi sebesar 101,78. Sebaliknya, wilayah dengan dominasi perempuan (rasio terendah) terdapat di Kecamatan Nguling dengan angka rasio 96,40, yang mengindikasikan jumlah perempuan jauh melampaui laki-laki di wilayah tersebut.

Pergeseran dominasi jumlah penduduk ke arah perempuan ini membawa dampak turunan yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi:

1. Dampak Ekonomi: Peningkatan jumlah perempuan berpotensi mendorong partisipasi angkatan kerja wanita yang lebih besar. Hal ini menjadi peluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesetaraan pendapatan keluarga.
2. Dampak Sosial: Perubahan ini dapat mengubah dinamika peran dalam keluarga dan masyarakat, yang menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk menjamin kesetaraan gender dan akses layanan publik yang setara bagi perempuan.

Data lengkap mengenai perbandingan rasio jenis kelamin di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	103,00	103,10	101,09	101,62
2	Tutur	101,78	101,72	100,76	101,09
3	Puspo	99,06	99,10	98,51	99,49
4	Tosari	99,47	99,29	99,36	99,78
5	Lumbang	98,90	98,90	98,07	98,35
6	Pasrepan	97,32	97,35	96,82	96,89
7	Kejayan	96,96	97,15	96,52	96,62
8	Wonorejo	97,77	97,87	97,28	97,32
9	Purwosari	101,45	101,47	100,93	100,88
10	Prigen	102,20	102,14	101,73	101,78
11	Sukorejo	99,43	99,32	99,23	99,55
12	Pandaan	100,28	100,32	100,30	100,29
13	Gempol	101,41	101,30	101,20	101,11
14	Beji	101,09	101,07	100,38	100,55
15	Bangil	99,80	99,63	99,38	99,32
16	Rembang	97,23	97,20	96,54	96,75
17	Kraton	103,06	102,88	100,09	100,08
18	Pohjentrek	102,27	102,25	101,49	101,26
19	Gondangwetan	102,31	102,62	100,91	100,89
20	Rejoso	101,89	101,83	101,63	101,65

21	Winongan	99,40	99,30	99,47	99,30
22	Grati	99,09	98,99	97,98	98,02
23	Lekok	98,37	98,49	97,80	98,24
24	Nguling	96,40	96,33	96,42	96,40
Kabupaten Pasuruan		100,13	100,11	99,45	99,56

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan merupakan parameter fundamental untuk mengukur dinamika ekonomi dan produktivitas daerah. Berdasarkan data periode 2021-2024, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan dan penguatan yang positif.

Secara kuantitas, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, bergerak dari 893.726 jiwa pada tahun 2021 menjadi 978.581 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan ini berbanding terbalik dengan kelompok Bukan Angkatan Kerja (seperti mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya) yang terus mengalami penurunan dari 401.053 jiwa (2021) menjadi 320.809 jiwa (2024). Pergeseran ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang beralih status untuk aktif masuk ke pasar kerja.

Meskipun jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas sempat mengalami fluktuasi berupa penurunan pada tahun 2023 menjadi 1.285.630 jiwa, namun indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru menunjukkan tren positif yang terus menanjak, mencapai 71,31% pada tahun 2024. Kenaikan TPAK ini merefleksikan tingginya semangat dan ketersediaan penduduk untuk bekerja.

Di sisi lain, keberhasilan penyerapan tenaga kerja tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang signifikan, dari 6,03% pada tahun 2021 turun menjadi 5,02% pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh kenaikan jumlah penduduk yang bekerja yang mencapai 929.468 jiwa pada tahun 2024, sementara jumlah pengangguran berhasil ditekan menjadi 49.113 jiwa. Rincian indikator makro ketenagakerjaan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	Jiwa	893726	916175	915507	978581
	Bekerja	Jiwa	839861	862062	865336	929468
	Pengangguran	Jiwa	53865	54113	50171	49113
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	401053	389023	370123	320809
	Sekolah	Jiwa	80310	70415	82044	78547
	Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	247535	258013	237580	201369
	Lainnya	Jiwa	73208	60595	50499	40893
3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Jiwa	1294779	1305198	1285630	1299390
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21	71,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan terlihat didominasi oleh sektor formal dan industri. Berdasarkan Tabel tersebut, mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorar, dengan jumlah mencapai 359.929 jiwa pada tahun 2024. Dominasi ini selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sektor pertanian juga masih memegang peranan penting, terlihat dari jumlah Petani/Peternak/Nelayan yang stabil di angka 189.490 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenis pekerjaan dengan jumlah paling sedikit tercatat pada profesi Pembantu Rumah Tangga yang hanya berjumlah 626 jiwa pada tahun 2024.

Secara implisit, komposisi struktur pekerjaan tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang cukup tinggi terhadap sektor industri dan pertanian sebagai penopang utama penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan karakter ekonomi yang relatif produktif, namun sekaligus menuntut perhatian pada aspek perlindungan tenaga kerja, stabilitas pendapatan, serta

keberlanjutan sektor-sektor dominan tersebut agar ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga dalam jangka panjang.

Data lengkap mengenai sebaran jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat pada kelanjutan tabel berikut:

Tabel 2.11 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Bekerja	366672	378282	391685	397661
2	Mengurus Rumah Tangga	230025	238608	246299	249523
3	Pelajar/Mahasiswa	235356	224234	213833	208582
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	16834	16664	16565	16465
5	Petani/Peternak/Nelayan	189977	189391	189410	189490
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20114	20111	21479	21818
7	Perdagangan/Industri/Konstruksi/Transportasi	1862	1814	1844	1839
8	Buruh Harian Lepas	8948	9122	11640	12448
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorar	351171	357574	359011	359929
10	Guru/Dosen	11896	12306	12524	12693
11	Pembantu Rumah Tangga	638	622	625	626
12	Tukang Batu/Kayu	2149	2184	2650	2730
13	Pedagang/Wiraswasta	157972	159497	154107	161038
14	Kepala/Perangkat Desa	1186	1152	1106	1089
15	Lainnya	7123	4629	11244	4807

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025
(Data diolah)*

E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan indikator fundamental dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus cerminan kualitas tenaga kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, profil pendidikan penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola distribusi yang mengerucut pada pendidikan dasar.

Secara kuantitas, penduduk dengan kualifikasi pendidikan Tamat SD/ sederajat masih mendominasi struktur demografi pendidikan, dengan proporsi mencapai

30,33% atau sebanyak 497.614 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenjang pendidikan tertinggi yakni S2/S3 memiliki jumlah populasi paling sedikit, yakni hanya 2.122 jiwa (0,13%). Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan daya saing daerah di era ekonomi berbasis pengetahuan.

Meskipun demikian, terdapat pergeseran tren yang positif jika dilihat dari kontribusi per jenjang pendidikan. Kelompok penduduk dengan pendidikan rendah, khususnya yang Belum Tamat SD/ sederajat dan Tamat SD/ sederajat, menunjukkan tren penurunan persentase dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan dasar dan keberhasilan program wajib belajar.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang menggembirakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat mengalami kenaikan konsisten hingga mencapai 278.598 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan serupa juga terjadi pada lulusan pendidikan tinggi (D1-D3, D4/S1, hingga S2/S3), yang menandakan semakin membaiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi pendidikan tinggi. Namun, perlu menjadi catatan khusus bahwa kelompok Tidak/ Belum Sekolah juga mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan, yang kemungkinan besar berkorelasi dengan tingginya angka kelahiran (penduduk usia prasekolah) sebagaimana terlihat pada piramida penduduk ekspansif.

Rincian lengkap mengenai perkembangan komposisi pendidikan penduduk ini dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Tidak/belum sekolah	324914	341313	357417	364634
2	Belum tamat SD/ sederajat	244233	235317	229615	226048
3	Tamat SD/ sederajat	505584	501397	498965	497614
4	Tamat SLTP/ sederajat	217145	216089	216327	217241
5	Tamat SLTA/ sederajat	260185	269151	276243	278598

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
6	D1/D2/D3	9614	9871	10118	10237
7	D4/S1	38552	41085	43275	44244
8	S2/S3	1825	1967	2062	2122
Total		1602052	1616190	1634022	1640738

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

Tabel 2.13 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Tidak/belum sekolah	20,28	21,12	21,87	22,22
2	Belum tamat				
	SD/ sederajat	15,25	14,56	14,05	13,78
3	Tamat SD/ sederajat	31,56	31,02	30,54	30,33
4	Tamat				
	SLTP/ sederajat	13,55	13,37	13,24	13,24
5	Tamat				
	SLTA/ sederajat	16,24	16,65	16,91	16,98
6	D1/D2/D3	0,6	0,61	0,62	0,62
7	D4/S1	2,41	2,54	2,65	2,7
8	S2/S3	0,11	0,12	0,13	0,13
Total		100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

F. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut

Data mengenai komposisi agama dan kepercayaan merupakan indikator sosial yang penting untuk memetakan karakteristik sosiologis masyarakat serta merawat kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, struktur demografi religius di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang sangat stabil dengan dominasi mayoritas yang jelas.

Penganut agama Islam merupakan kelompok terbesar secara mutlak. Pada tahun 2024, jumlah penduduk muslim tercatat sebanyak 1.616.155 jiwa, yang merepresentasikan 98,50% dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan persentase yang perlahan namun konsisten dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 98,45%. Dominasi ini menegaskan identitas Kabupaten Pasuruan sebagai wilayah dengan basis komunitas muslim yang sangat kuat.

Di sisi lain, keberagaman tetap terlihat dengan keberadaan pemeluk agama lain. Secara statistik, Hindu menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 14.999 jiwa (0,91%) pada tahun 2024, diikuti oleh penganut Kristen sebanyak 6.863 jiwa (0,42%) dan Katholik sebanyak 2.362 jiwa (0,14%).

Sementara itu, kelompok dengan jumlah penganut paling sedikit adalah agama Konghucu, yang pada tahun 2024 tercatat hanya berjumlah 17 jiwa (0,001%), serta penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berjumlah 23 jiwa. Meskipun proporsinya kecil, keberadaan berbagai kelompok agama ini menandakan adanya heterogenitas yang terjaga dalam harmoni sosial di Kabupaten Pasuruan.

Rincian lengkap statistik penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Islam	1580238	1591629	1609458	1616155
2	Kristen	6974	6883	6885	6863
3	Katholik	2430	2402	2377	2362
4	Hindu	14991	14891	14937	14999
5	Budha	367	351	326	319
6	Konghuchu	11	11	15	17
7	Kepercayaan	26	23	24	23
Total		1605037	1616190	1634022	1640738

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

Tabel 2.15 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Islam	98,455	98,48	98,497	98,501
2	Kristen	0,435	0,426	0,421	0,418
3	Katholik	0,151	0,149	0,145	0,144
4	Hindu	0,934	0,921	0,914	0,914
5	Budha	0,023	0,022	0,02	0,019
6	Konghuchu	0,001	0,001	0,001	0,001
7	Kepercayaan	0,002	0,001	0,001	0,001
Total		100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

G. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk merupakan instrumen perencanaan strategis yang dibangun melalui perhitungan ilmiah, dengan mempertimbangkan asumsi dinamika komponen pertumbuhan penduduk yakni fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Keakuratan estimasi jumlah dan struktur penduduk untuk lima tahun mendatang menjadi basis fundamental bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang presisi dan antisipatif.

Pemanfaatan data proyeksi demografi ini memiliki urgensi yang mencakup berbagai dimensi pembangunan strategis:

1. Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah: Data ini menjadi acuan dalam menghitung beban kebutuhan dasar di masa depan, memastikan ketersediaan infrastruktur vital seperti jaringan jalan, pasokan listrik, dan akses air bersih mampu mengimbangi laju pertumbuhan populasi.
2. Optimalisasi Layanan Publik: Estimasi jumlah penduduk usia sekolah dan kelompok rentan memungkinkan pemerintah merencanakan kapasitas fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.

3. Ekonomi dan Kesejahteraan: Proyeksi ini krusial untuk memetakan kebutuhan perumahan (*housing backlog*), menyiapkan strategi penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, serta merancang kebijakan ekonomi yang efektif.
4. Keberlanjutan Lingkungan: Data ini membantu dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan, serta memperkuat kesiapsiagaan dalam manajemen bencana berbasis kepadatan wilayah.

Dengan demikian, proyeksi penduduk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan (*sustainable*) bagi generasi mendatang.

1. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil pemodelan demografi untuk periode jangka menengah (2025-2030), estimasi jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Data ini krusial sebagai landasan alokasi sumber daya daerah agar pembangunan dapat berjalan efektif.

Mengacu pada Tabel tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dari 1.669,40 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 1.721,87 ribu jiwa pada tahun 2030. Kenaikan populasi ini secara langsung berdampak pada tingkat kepadatan penduduk yang diprediksi akan meningkat dari 1.132,55 jiwa/km² di tahun 2025 hingga mencapai angka di kisaran 1.161 jiwa/km² menjelang tahun 2030. Peningkatan densitas ini menuntut perhatian khusus pada penataan ruang dan penyediaan fasilitas publik.

Menariknya, struktur komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pergeseran tren. Jika pada tahun 2025 rasio jenis kelamin diperkirakan masih seimbang di angka 100,00 (jumlah laki-laki dan perempuan setara), maka pada tahun-tahun berikutnya jumlah perempuan diproyeksikan akan mulai melampaui jumlah laki-laki. Hal ini terlihat dari penurunan angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) secara bertahap menjadi 99,54 pada tahun 2030.

Selain itu, terdapat indikasi perlambatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan yang berada di angka 0,73% pada tahun 2025 diproyeksikan akan melandai menjadi 0,47% pada tahun 2030.

Penurunan laju pertumbuhan ini dapat menjadi indikator keberhasilan program pengendalian penduduk atau perubahan pola fertilitas masyarakat.

Rincian lengkap data proyeksi jumlah, komposisi gender, dan kepadatan penduduk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten
Pasuruan Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87
Laki-Laki (Ribuan Jiwa)	834,72	840,21	845,38	850,23	854,76	858,96
Perempuan (Ribuan Jiwa)	834,68	840,82	846,7	852,34	857,74	862,91
Laju Pertumbuhan (%)	0,73	0,7	0,66	0,62	0,58	0,47
Rasio Jenis Kelamin (%)	100	99,93	99,84	99,75	99,65	99,54
Kepadatan (Jiwa/Km ²)	1132,55	1140,43	1147,94	1155,05	1161,8	1153,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

2. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pemetaan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur memegang peranan vital dalam perencanaan pembangunan sektoral. Data ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan spesifik di masa depan, mulai dari penyediaan sarana pendidikan dasar, kesiapan lapangan kerja, hingga layanan kesehatan geriatri. Berdasarkan proyeksi tahun 2025-2030, struktur umur penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya transisi demografi yang signifikan.

Mengacu pada Tabel tersebut, terlihat tren penurunan yang konsisten pada kelompok penduduk usia dini dan sekolah. Kelompok umur 0-4 tahun diproyeksikan menurun dari 116,68 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 111,48 ribu jiwa pada tahun 2030. Penurunan serupa juga terjadi pada kelompok umur 5-14 tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pengendalian kelahiran serta perubahan pola fertilitas di masyarakat, yang di satu sisi akan meringankan beban ketergantungan usia muda (young dependency ratio).

Sebaliknya, terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada kelompok penduduk lanjut usia. Kelompok umur 60-64 tahun diprediksi meningkat tajam dari 83,06 ribu jiwa (2025) menjadi 96,33 ribu jiwa (2030). Kenaikan yang lebih dramatis terlihat pada kelompok lansia tua (75+ tahun), yang melonjak dari 36,72 ribu jiwa menjadi 52,88 ribu jiwa pada akhir periode proyeksi.

Fenomena ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan sedang bergerak menuju struktur penduduk tua (aging population). Pergeseran ini menuntut adanya reorientasi kebijakan, di mana fokus pembangunan ke depan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja bagi usia produktif, tetapi juga perluasan akses perlindungan sosial dan layanan kesehatan jangka panjang yang ramah lansia.

Rincian lengkap proyeksi penduduk per kelompok umur dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	116,68	115,51	114,41	113,36	112,38	111,48
5-9	119,32	118,11	116,66	115,32	114,72	116,14
10-14	122,46	122,97	123,41	123,47	122,45	119,01
15-19	119,49	119,84	120,33	120,87	121,41	121,95
20-24	120,88	119,94	119,22	118,74	118,53	118,59
25-29	126,64	125,25	123,77	122,29	120,93	119,79
30-34	130,29	129,64	128,85	127,91	126,82	125,57
35-39	129,71	130,16	130,27	130,09	129,71	129,19

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
40-44	123,59	124,11	125,14	126,43	127,64	128,5
45-49	123,63	123,93	123,51	122,74	122,13	122,03
50-54	111,75	113,7	115,96	118,23	120,08	121,22
55-59	101,45	103,18	104,5	105,61	106,83	108,34
60-64	83,06	85,88	88,77	91,61	94,16	96,33
65-69	63,4	66,17	68,73	71,14	73,57	76,1
70-74	40,34	43,18	46,14	49,14	52,04	54,75
75+	36,72	39,47	42,44	45,64	49,12	52,88
Jumlah	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan,
2024, diolah*

3. Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan, dan Bonus Demografi

Analisis terhadap struktur umur penduduk khususnya perbandingan antara kelompok usia produktif dan non-produktif merupakan landasan vital dalam merancang kebijakan ekonomi makro daerah. Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2030, Kabupaten Pasuruan diprediksi akan mengalami dinamika demografi yang menuntut adaptasi kebijakan yang cepat, terutama terkait pemanfaatan bonus demografi dan kesiapan menghadapi penuaan penduduk.

Secara umum, penduduk Kabupaten Pasuruan diprediksi menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,66%. Namun, pergeseran struktur demografis yang terjadi di dalamnya memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang di masa depan.

Pertama, terkait Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun). Kabupaten Pasuruan masih berada dalam fase Bonus Demografi yang optimal. Hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif yang sangat dominan, yakni mencapai 70,11% pada tahun 2025. Meskipun diproyeksikan mengalami fluktuasi dan sedikit penurunan menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka ini

menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berada pada usia kerja yang potensial untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Kedua, terjadi tren penurunan pada Penduduk Usia Muda (0-14 tahun). Persentase kelompok ini diproyeksikan menyusut secara bertahap dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini mengindikasikan bahwa beban tanggungan dari kelompok usia muda semakin berkurang seiring dengan keberhasilan pengendalian kelahiran.

Ketiga, tantangan utama muncul dari lonjakan Penduduk Usia Lanjut (65 tahun ke atas). Data menunjukkan percepatan pertumbuhan populasi lansia yang signifikan, bergerak dari 8,41% pada tahun 2025 hingga menembus angka dua digit menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan proporsi ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan mulai bertransisi menuju struktur penduduk tua (aging population), yang membawa konsekuensi pada perlunya peningkatan layanan kesehatan geriatri dan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif.

Implikasi dari kombinasi tren di atas bermuara pada Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun jumlah penduduk usia muda menurun, pesatnya pertumbuhan lansia menyebabkan beban ketergantungan penduduk secara total justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan diproyeksikan naik dari 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara statistik, angka 44,51 ini bermakna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan menanggung beban ekonomi sekitar 45 orang penduduk non-produktif (anak-anak dan lansia). Tren peningkatan beban ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja sebelum beban demografi menjadi semakin berat di masa depan.

2.1. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi demografi untuk periode tahun 2025 hingga 2030 memberikan gambaran yang sangat krusial dan mendalam mengenai peta jalan pergeseran beban ekonomi serta transformasi struktur tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan. Secara agregat, jumlah penduduk diproyeksikan akan terus tumbuh secara stabil dengan laju rata-rata

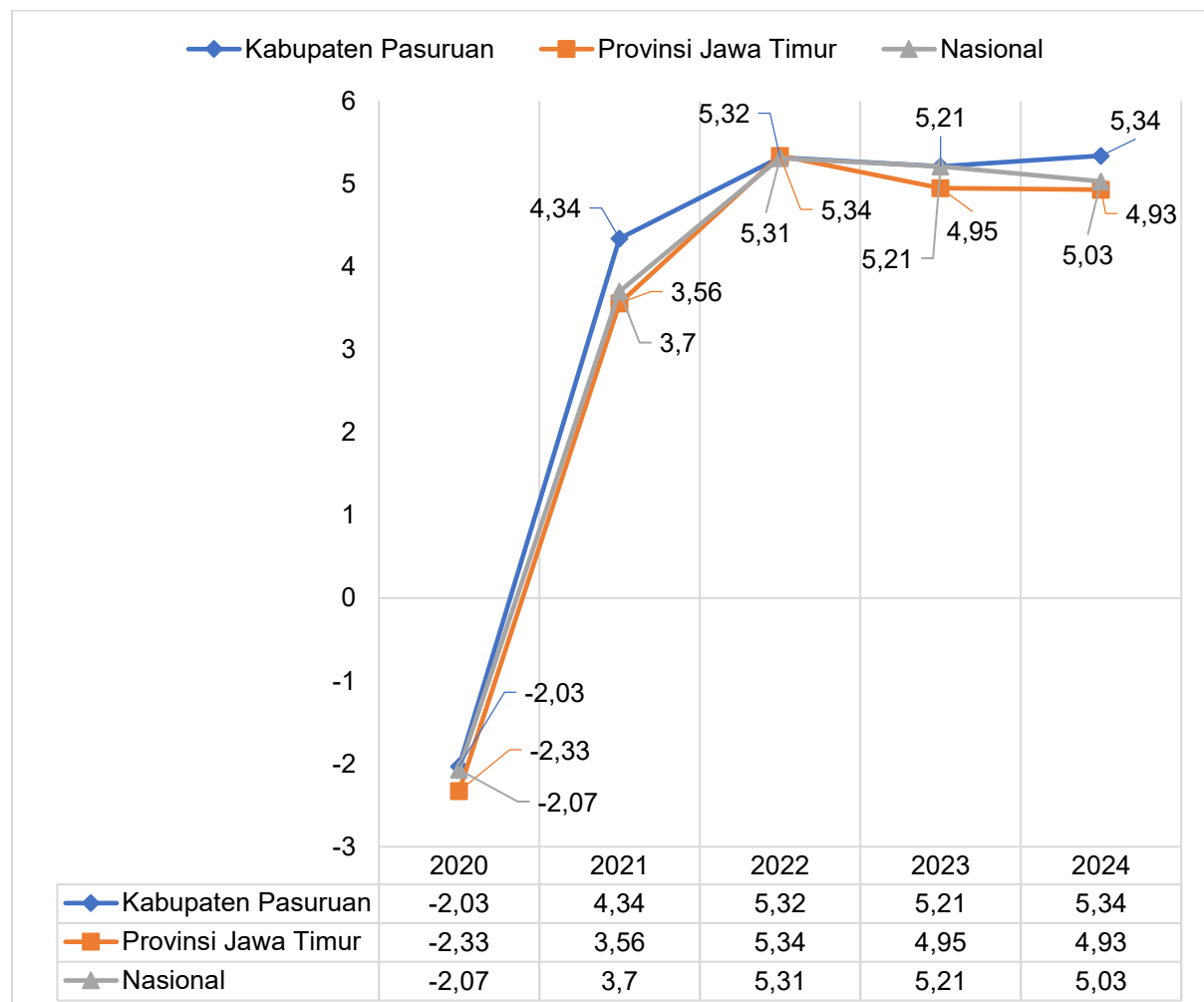
pertumbuhan sebesar 0,66% per tahun. Namun, di balik angka pertumbuhan kuantitatif yang terlihat moderat dan terkendali ini, sesungguhnya sedang terjadi perubahan fundamental dan dinamis pada komposisi internal kelompok umur penduduk. Pergeseran struktur ini membawa implikasi serius yang menuntut perhatian khusus serta strategi adaptif dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah maupun panjang.

Ditinjau dari sisi potensi modal manusia dan ekonomi, Kabupaten Pasuruan saat ini masih berada dalam koridor emas fase Bonus Demografi. Kondisi menguntungkan ini ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang persentasenya sangat masif dibandingkan kelompok usia lainnya. Pada tahun 2025, proporsi kelompok produktif ini tercatat mencapai angka dominan sebesar 70,11% dari total populasi. Meskipun diprediksi akan mengalami sedikit koreksi penurunan secara alami menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa ketersediaan suplai tenaga kerja di daerah ini masih sangat melimpah. Cadangan sumber daya manusia ini merupakan aset vital yang siap digerakkan untuk menopang percepatan roda aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, dinamika yang sangat kontras dan menarik untuk dicermati terjadi pada kedua kutub kelompok penduduk non-produktif. Pada satu sisi, kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) diproyeksikan terus mengalami tren penurunan proporsi, yakni bergerak turun dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan program pengendalian fertilitas dan keluarga berencana. Namun sebaliknya, fenomena penuaan penduduk (aging population) justru mulai terlihat nyata dan signifikan. Proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) diprediksi akan melonjak cukup tajam dari 8,41% pada tahun 2025 menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan yang menembus ambang batas psikologis 10% ini menjadi sinyal peringatan dini yang kuat bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah, terutama dalam memperkuat infrastruktur layanan kesehatan geriatri yang spesifik serta menyiapkan sistem jaminan sosial dan perlindungan lansia yang lebih komprehensif.

Akumulasi dari berbagai perubahan struktur umur tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun

beban tanggungan dari kelompok anak-anak secara statistik berkurang, pesatnya laju pertumbuhan jumlah lansia menyebabkan beban ekonomi total yang harus dipikul oleh penduduk produktif justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan ini diproyeksikan naik dari posisi 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara riil dan sederhana, angka rasio 44,51 pada tahun 2030 mengandung makna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan harus menanggung beban ekonomi hidup untuk sekitar 45 orang penduduk non-produktif (yang merupakan gabungan antara anak-anak dan lansia). Tren peningkatan rasio ketergantungan ini menuntut adanya upaya strategis yang mendesak untuk memaksimalkan produktivitas dan kualitas angkatan kerja yang ada saat ini, sebelum beban demografi menjadi semakin berat dan kompleks di masa depan.



Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

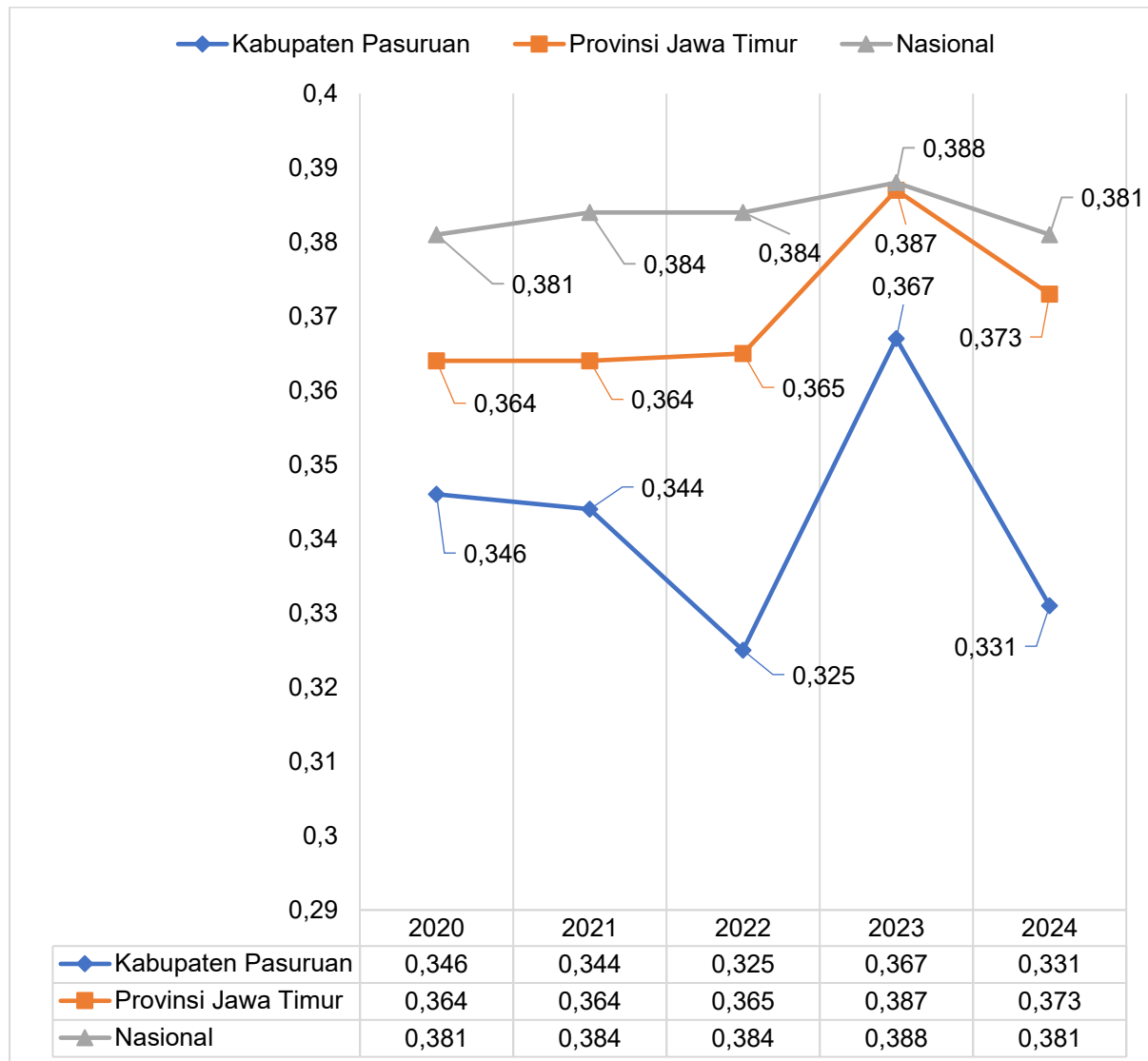
B. Indeks/Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator makro ekonomi utama yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pengeluaran atau kesenjangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Nilai Indeks Gini bergerak dalam rentang 0 hingga 1. Apabila koefisien bernilai 0, hal itu menandakan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menandakan ketimpangan sempurna. Secara umum, semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Berdasarkan standar internasional, angka Indeks Gini yang berkisar antara 0,3 hingga 0,5 dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan moderat (sedang).

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, dinamika ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap terkendali dalam kategori moderat. Pada paruh pertama periode pengamatan, terjadi perbaikan pemerataan yang signifikan di mana Indeks Gini menyentuh titik terendah (paling merata) pada tahun 2022 dengan angka 0,325. Meskipun sempat mengalami lonjakan ketimpangan pada tahun 2023 menjadi 0,367, kondisi ini berhasil dipulihkan kembali pada tahun 2024 dengan penurunan angka menjadi 0,331. Penurunan kembali angka Gini Ratio pada akhir periode ini mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan yang positif, di mana kue pembangunan dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.

Dalam konteks komparasi kewilayahan, capaian pemerataan ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan rata-rata regional maupun nasional. Data menunjukkan konsistensi di mana angka Indeks Gini Kabupaten Pasuruan selalu lebih rendah (lebih merata) dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di setiap tahun pengamatan. Sebagai ilustrasi nyata pada tahun 2024, saat ketimpangan Nasional berada di angka 0,381 dan Jawa Timur di angka 0,373, Kabupaten Pasuruan mampu menekan ketimpangan jauh lebih rendah di angka 0,331. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan memiliki kualitas yang baik karena bersifat inklusif (merata) dan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain.

Data lengkap mengenai perbandingan Indeks Gini tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.15 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. Angka Kemiskinan

Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengentasan kemiskinan (*No Poverty*) menempati Tujuan Pertama sebagai agenda prioritas global. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan, yang diukur melalui pendekatan pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan sendiri merupakan nilai rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk hidup layak, yang terdiri dari komponen makanan (setara 2.100 kilokalori) dan komponen non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

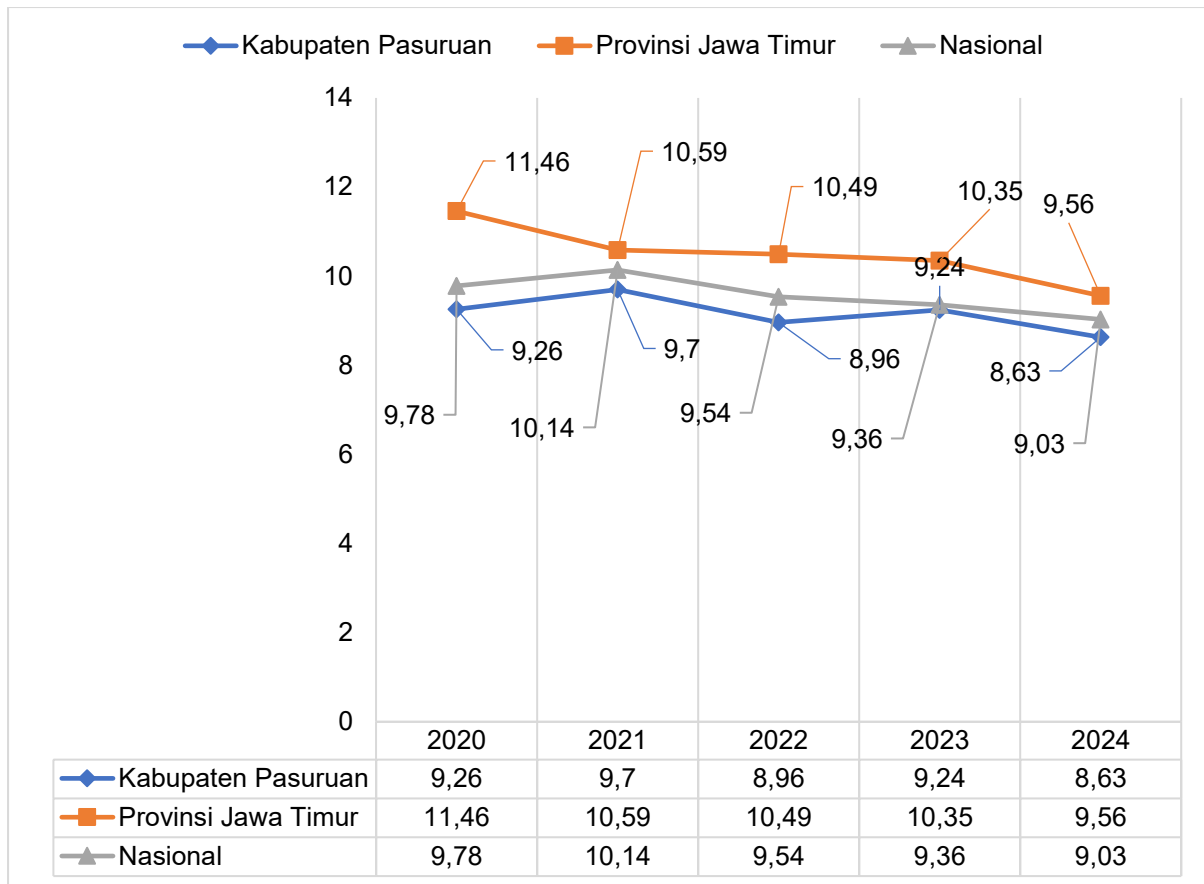
Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan capaian yang positif dan kompetitif. Secara umum, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan selalu berada di bawah (lebih baik) dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 8,63%, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (9,56%) dan Nasional (9,03%). Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah berjalan cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat rentan.

Selain melihat persentase (Head Count Index), kualitas kemiskinan juga diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,22 (2023) menjadi 1,09 (2024). Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan, yang berarti beban pengeluaran mereka untuk keluar dari kemiskinan semakin ringan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami perbaikan, turun dari 0,26 (2023) menjadi 0,21 (2024). Penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil (distribusi pengeluaran di kalangan warga miskin semakin merata).

Namun, tantangan terlihat pada kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang terus meningkat setiap tahunnya. GK naik dari Rp429.624 (2023) menjadi Rp450.088 per kapita/bulan (2024). Kenaikan standar biaya hidup ini menuntut adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih progresif agar penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan (*near poor*) tidak jatuh kembali ke jurang kemiskinan akibat inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

Berikut adalah data rincian indikator kemiskinan di Kabupaten Pasuruan serta tabel perbandingannya dengan tingkat Provinsi dan Nasional:



Gambar 2.16 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.18 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	151,43	159,78	148,62	154,09	144,84
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	355.299	368.686	394.016	429.624	450.088

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,15	1,17	1,29	1,22	1,09
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,24	0,29	0,26	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasuruan berhasil memulihkan kondisi kesejahteraan masyarakat pasca-pandemi dengan capaian tahun 2024 yang sangat baik. Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga 8,63% (terendah dalam 5 tahun terakhir) yang dibarengi dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah bersifat inklusif. Meskipun demikian, kenaikan standar Garis Kemiskinan harus terus diwaspadai sebagai sinyal perlunya pengendalian inflasi daerah yang efektif.

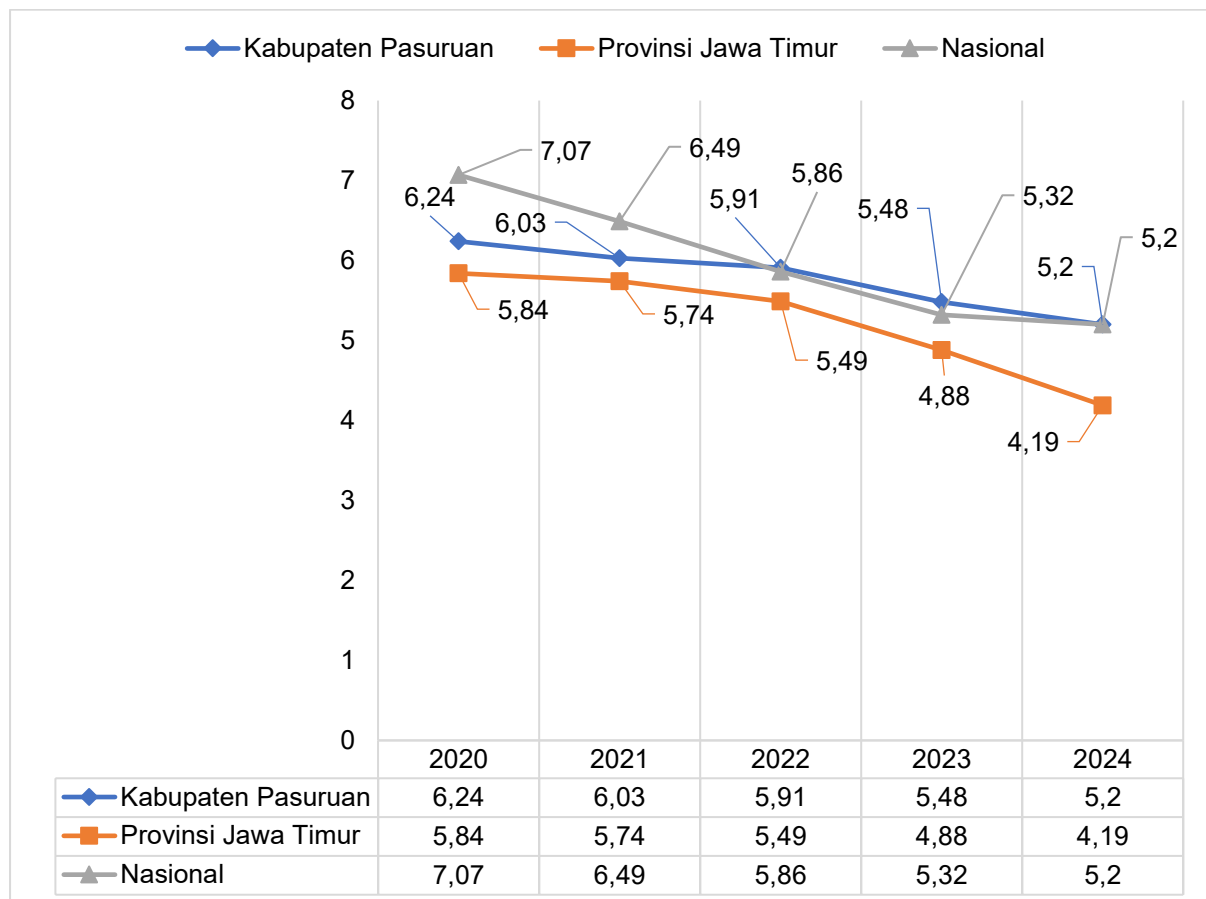
D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja. Tingginya angka TPT biasanya dipicu oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan (permintaan tenaga kerja) dengan jumlah pencari kerja (penawaran tenaga kerja). Oleh karena itu, penurunan TPT menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bersandingan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai strategi komprehensif penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan yang konsisten. TPT Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, bergerak dari angka 6,24% pada tahun 2020 menjadi 5,20% pada tahun 2024. Penurunan bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di sektor riil dan efektivitas pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, jika dilihat dari perspektif komparasi regional, Kabupaten Pasuruan masih menghadapi tantangan struktural. Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur di sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2024, saat Jawa Timur berhasil menekan pengangguran hingga angka 4,19%, Kabupaten Pasuruan masih berada di angka 5,20% (setara dengan angka Nasional). Kesenjangan ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Daerah untuk lebih agresif dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan (skilling, reskilling, upskilling) agar kompetensi tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang padat karya.

Rincian perkembangan data TPT dan perbandingannya dapat dilihat pada gambar bagan berikut:



Gambar 2.17 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Pasuruan terus membaik yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran secara berturut-turut selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, fakta bahwa angka TPT daerah masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur menuntut fokus kebijakan yang lebih tajam pada sisi *supply* (peningkatan *skill* SDM) dan sisi *demand* (investasi padat karya) untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja di masa mendatang.

E. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur estimasi pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai ini diperoleh dari total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk. Secara teoritis, semakin tinggi angka PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran atau standar hidup rata-rata penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren yang positif dan kompetitif. Secara nominal, nilai PDRB per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, dalam komparasi kewilayahan, capaian Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini mengukuhkan posisi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu penyangga ekonomi utama di Jawa Timur.

Namun, tingginya angka PDRB per kapita ini perlu dimaknai dengan cermat. Struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan didominasi oleh sektor industri pengolahan (kontribusi mencapai 60%) yang bertipologi padat modal. Kondisi ini menyebabkan perputaran nilai tambah ekonomi cenderung terkonsentrasi pada korporasi besar dan tidak serta-merta mencerminkan pendapatan riil yang diterima oleh setiap rumah tangga. Dengan kata lain, tingginya rata-rata tersebut "ditarik ke atas" oleh output industri besar, sementara masih terdapat kemungkinan kesenjangan pendapatan antar wilayah atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, angka ini lebih tepat dipandang sebagai indikator potensi ekonomi daerah ketimbang indikator tunggal kesejahteraan individu.

Dalam konstelasi regional Jawa Timur tahun 2024, Kabupaten Pasuruan menempati peringkat ke-5 tertinggi. Posisi ini berada di bawah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, namun tetap berada jauh di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pemerataan, skala ekonomi Kabupaten Pasuruan sangatlah masif.

Kabupaten Pasuruan masuk dalam jajaran "Top 5" ekonomi raksasa di Jawa Timur. Meskipun angka PDRB per kapita terlihat impresif, tantangan utama bagi pemerintah daerah adalah memastikan terjadinya pemerataan pembangunan. Fokus kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada pertumbuhan angka rata-rata, melainkan harus diarahkan pada mekanisme redistribusi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menikmati kue pertumbuhan ekonomi tersebut, guna meminimalisir ketimpangan antara wilayah industri dan non-industri.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (diukur dari Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan).

Dalam melihat tren jangka panjang, data IPM Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi dua periode berdasarkan metodologi perhitungan, yaitu metode lama (SP2010) untuk tahun 2017-2021 dan metode baru (Long Form SP2020) untuk tahun 2022-2024. Berikut adalah perkembangan IPM periode pertama:

Tabel 2.19 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021 (Metode SP2010)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	66,69	67,41	68,29	68,60	70,54
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,90	70,17	70,17	70,23	70,25

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,05	12,30	12,31	12,41	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,82	6,38	7,11	7,40	7,41
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	-	-	10.381	10.164	10.297

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode 2017-2021, status pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan status dari kategori "Sedang" menjadi "Tinggi" (IPM $\geq$ 70) tepat pada tahun 2021 dengan nilai 70,54. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan pada sisi ekonomi (Pengeluaran Per Kapita turun dari Rp10,38 juta menjadi Rp10,16 juta), nilai total IPM tetap tumbuh positif. Hal ini disebabkan oleh indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) yang tetap menunjukkan tren kenaikan, membuktikan resiliensi sektor sosial dasar di tengah guncangan ekonomi.

Selanjutnya, mulai tahun 2022 perhitungan IPM menggunakan metode baru berbasis *Long Form* SP2020 yang memberikan potret kependudukan lebih akurat, khususnya pada indikator kematian dan umur harapan hidup.

Tabel 2.20 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024 (Metode Long Form SP2020)

Uraian	2022	2023	2024
IPM	71,29	71,91	72,36
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,15	74,41	74,61
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,76	12,77	12,78

Uraian	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,42	7,44	7,46
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	10.726	11.239	11.617

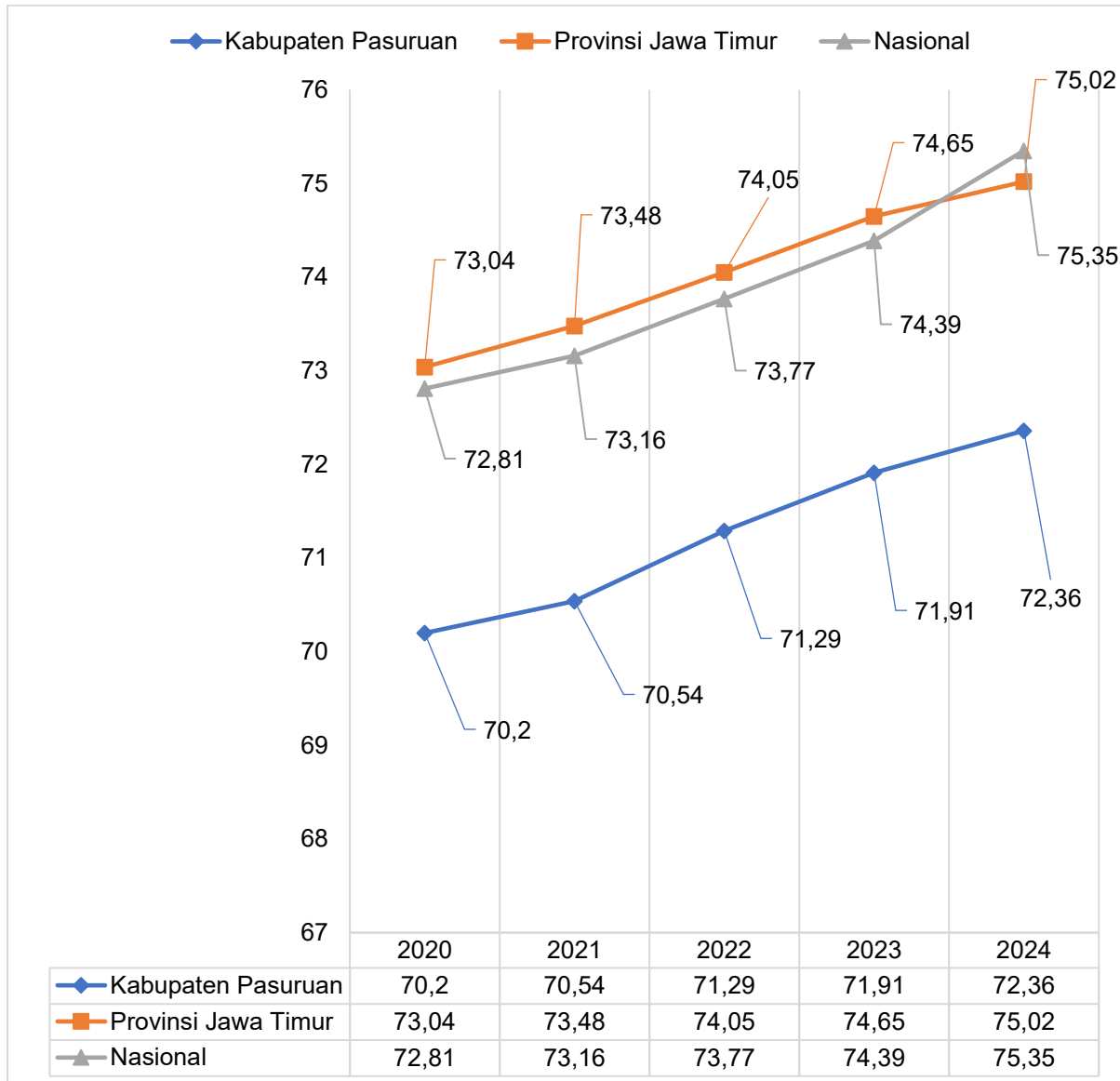
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Data yang dihasilkan melalui penerapan metode terbaru menunjukkan adanya lonjakan kualitas hidup masyarakat yang bersifat signifikan dan terukur. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan tercatat mencapai 72,36, yang menempatkan daerah ini pada kategori pembangunan manusia yang relatif baik dan mencerminkan keberhasilan akumulatif dari kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Angka tersebut tidak sekadar menunjukkan peningkatan numerik, tetapi juga merepresentasikan perbaikan struktural dalam kualitas hidup penduduk secara menyeluruh.

Perubahan metodologi penghitungan memberikan dampak yang sangat nyata, terutama pada komponen Angka Harapan Hidup (AHH). Dengan metode terbaru, AHH Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 tercatat mencapai 74,61 tahun, jauh melampaui hasil perhitungan dengan metode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 70 tahun. Selisih ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan medis, serta efektivitas intervensi kesehatan publik selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang substansial. Koreksi metodologis ini sekaligus memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil kesehatan penduduk.

Di sisi ekonomi, indikator Pengeluaran Per Kapita menunjukkan tren pemulihan yang konsisten dan berkelanjutan pasca-pandemi. Pada tahun 2024, nilai pengeluaran per kapita mencapai Rp11,617 juta per tahun, menandakan meningkatnya daya beli masyarakat serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi rumah tangga. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan pendapatan, stabilitas konsumsi, dan kepercayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, data dalam tabel tersebut mengonfirmasi bahwa kualitas kesehatan, akses pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan berada dalam lintasan pertumbuhan yang solid dan saling memperkuat. Meskipun demikian, capaian positif

ini tetap perlu ditempatkan dalam kerangka komparatif yang lebih luas, sehingga posisi Kabupaten Pasuruan dapat dievaluasi secara objektif melalui perbandingan dengan capaian regional pada wilayah sekitarnya.



Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

BAB III

CAPAIAN KINERJA DAN HASIL PELAKSANAAN

Pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pasuruan pada Semester II Tahun 2025 tidak lagi sekadar dijalankan sebagai rutinitas program kesehatan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah gerakan masif yang terstruktur, sistematis, dan akuntabel. Bab ini disusun untuk menyajikan potret utuh mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dalam mengawal masa depan generasi penerus bangsa.



Gambar 3.1 Roda Aksi Konvergensi

Analisis capaian kinerja yang tertuang dalam bab ini didasarkan pada kerangka kerja regulasi terbaru, yakni Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Aksi Konvergensi Tahun 2025. Sesuai dengan regulasi tersebut, mekanisme pelaksanaan program kini difokuskan melalui 4 (empat) tahap siklus pelaksanaan aksi konvergensi yang berkelanjutan. Kerangka kerja 8 Aksi Konvergensi yang sebelumnya menjadi acuan tunggal, kini diintegrasikan secara holistik ke dalam siklus baru ini untuk memastikan orkestrasi program yang lebih sinergis. Keempat tahapan siklus yang menjadi landasan analisis dalam laporan ini meliputi:

1. Tahap 1: Analisis Situasi (Integrasi Aksi 1 dan Aksi 7)

Tahap ini merupakan fondasi utama yang mengintegrasikan proses analisis situasi dengan pengukuran dan publikasi data *stunting*. Tujuan strategisnya adalah mengidentifikasi peta sebaran kasus, ketersediaan layanan, dan

kendala operasional. Dalam konteks Semester II ini, Bappelitbangda selaku koordinator fungsional telah memastikan terbitnya produk hukum berupa Peta Sebaran Keluarga Berisiko Stunting dan Peta Sebaran Sasaran Prioritas, yang menjadi basis data (*baseline*) fundamental bagi seluruh intervensi yang dilaporkan dalam bab ini.

2. Tahap 2: Penguatan Perencanaan (Integrasi Aksi 2, Aksi 3, dan Aksi 4)

Tahap ini menjamin bahwa hasil analisis situasi diterjemahkan secara konkret ke dalam dokumen perencanaan (RKPD/Renja) dan penganggaran (APBD). Melalui mekanisme Rembuk Stunting, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menggalang komitmen politik dan operasional lintas sektor. Keberhasilan tahap ini dibuktikan dengan adanya penandaan (*tagging*) anggaran spesifik pada DPA Perangkat Daerah serta regulasi tentang peran desa, yang realisasi keuangannya akan dibahas pada bagian akhir bab ini.

3. Tahap 3: Penguatan Pelaksanaan (Integrasi Aksi 6 dan Aksi 5)

Tahap ini adalah inti dari operasional lapangan, yang mengintegrasikan manajemen data dengan pembinaan pelaku di tingkat desa. Fokus utamanya adalah memastikan intervensi sampai ke sasaran rumah tangga secara *by name by address* (BNBA). Penguatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) menjadi kunci dalam tahap ini untuk memverifikasi validitas data sebelum intervensi dilakukan.

4. Tahap 4: Penilaian Hasil Monev (Pelaksanaan Aksi 8)

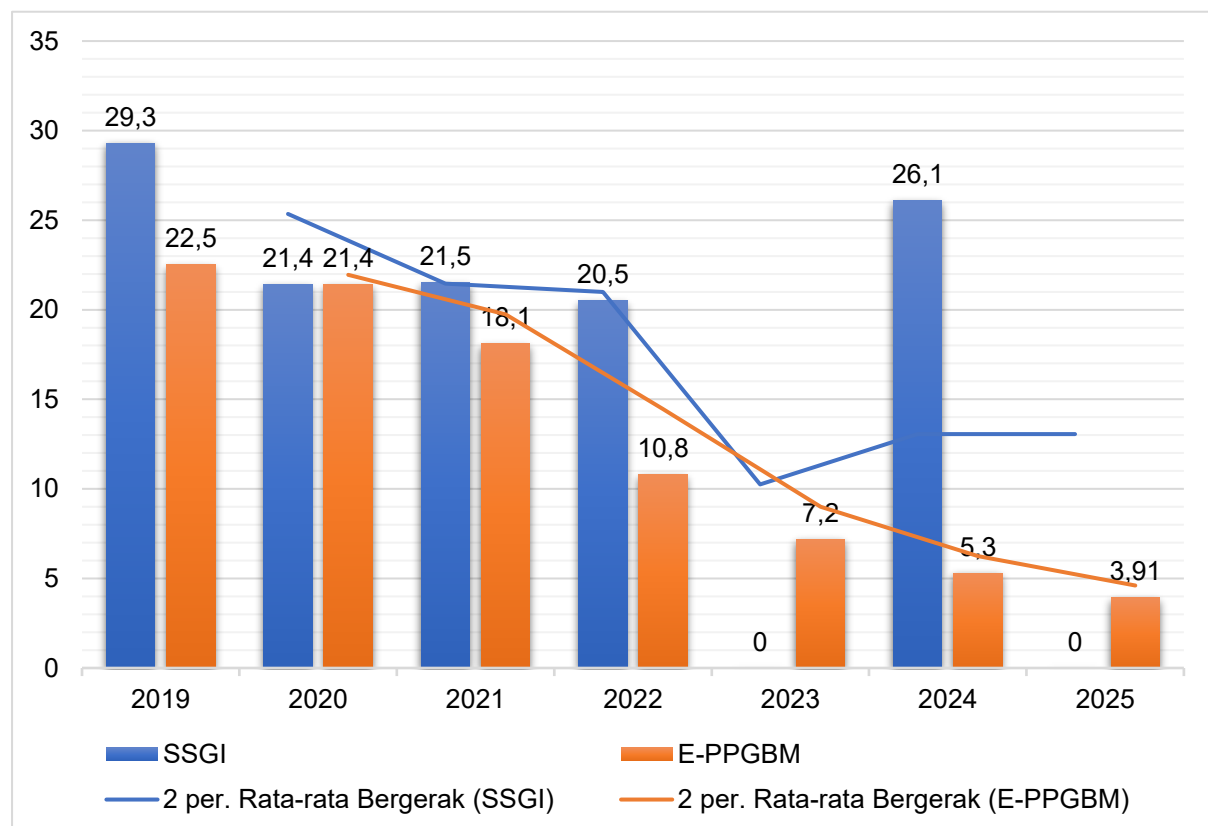
Tahap terakhir adalah evaluasi sistemik yang menjadi cerminan dari laporan ini. Tahap ini bertujuan menilai kemajuan pelaksanaan, mengukur *output* dan *outcome*, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan siklus tahun berikutnya.

Untuk memastikan keempat tahapan tersebut berjalan efektif, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga telah menerapkan struktur tata kelola data yang ketat. Di tingkat Kabupaten, Bappelitbangda bertindak sebagai *Approval* (Persetujuan) yang mengoordinasikan seluruh tahapan, sedangkan Perangkat Daerah bertindak sebagai

Verifikator dan Operator. Struktur ini diduplikasi hingga ke tingkat Kecamatan, di mana Camat bertindak sebagai *Approval*, serta Puskesmas dan PLKB sebagai Verifikator. Mekanisme berjenjang ini diterapkan untuk menjamin bahwa data capaian kinerja yang disajikan dalam Bab III ini telah melalui proses validasi bertingkat dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

3.1. Perkembangan Angka Prevalensi Stunting

Indikator dampak utama (*ultimate outcome*) dalam evaluasi kinerja penurunan *stunting* diukur melalui angka prevalensi, yang menggambarkan proporsi balita *stunting* terhadap total populasi balita yang diukur. Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan analisis komparatif yang mendalam dan kritis terhadap dua rezim data utama, yakni data survei makro nasional dan data pencatatan rutin masyarakat (*community-based recording*). Analisis ini sangat krusial untuk mendudukkan posisi kinerja daerah secara objektif di tengah tantangan disparitas data yang terjadi.



Catatan: 0 = Tidak Diketahui

Gambar 3.2 Perbandingan SSGI dan E-PPGBM

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, diolah

A. Analisis Komparatif Data SSGI dan E-PPGBM

Dalam mengevaluasi status gizi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada fenomena divergensi data yang cukup tajam antara hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

Merujuk pada publikasi data SSGI Tahun 2024, angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 26,10%. Angka ini menempatkan Kabupaten Pasuruan pada posisi yang cukup menantang karena masih berada di atas ambang batas standar toleransi WHO sebesar 20%. Secara metodologis, data SSGI ini diperoleh melalui metode survei sampling pada blok sensus terpilih. Meskipun metode ini sah secara statistik untuk memotret kondisi makro, namun memiliki keterbatasan *margin of error* dan seringkali tidak mampu menangkap dinamika perubahan cepat yang terjadi di tingkat mikro (desa/kelurahan). Tingginya angka SSGI ini diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai *early warning* atau peringatan eksternal untuk melakukan evaluasi ulang terhadap efektivitas program, namun tidak dijadikan satu-satunya patokan kinerja.

Di sisi lain, potret yang jauh berbeda dan lebih optimis ditunjukkan oleh data E-PPGBM. Data ini merupakan basis data operasional utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan karena menggunakan metode sensus (*total coverage*) yang dihimpun langsung dari hasil penimbangan dan pengukuran balita di Posyandu secara *real-time*. Berdasarkan data E-PPGBM Bulan Timbang Agustus 2025, angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 3,91%.

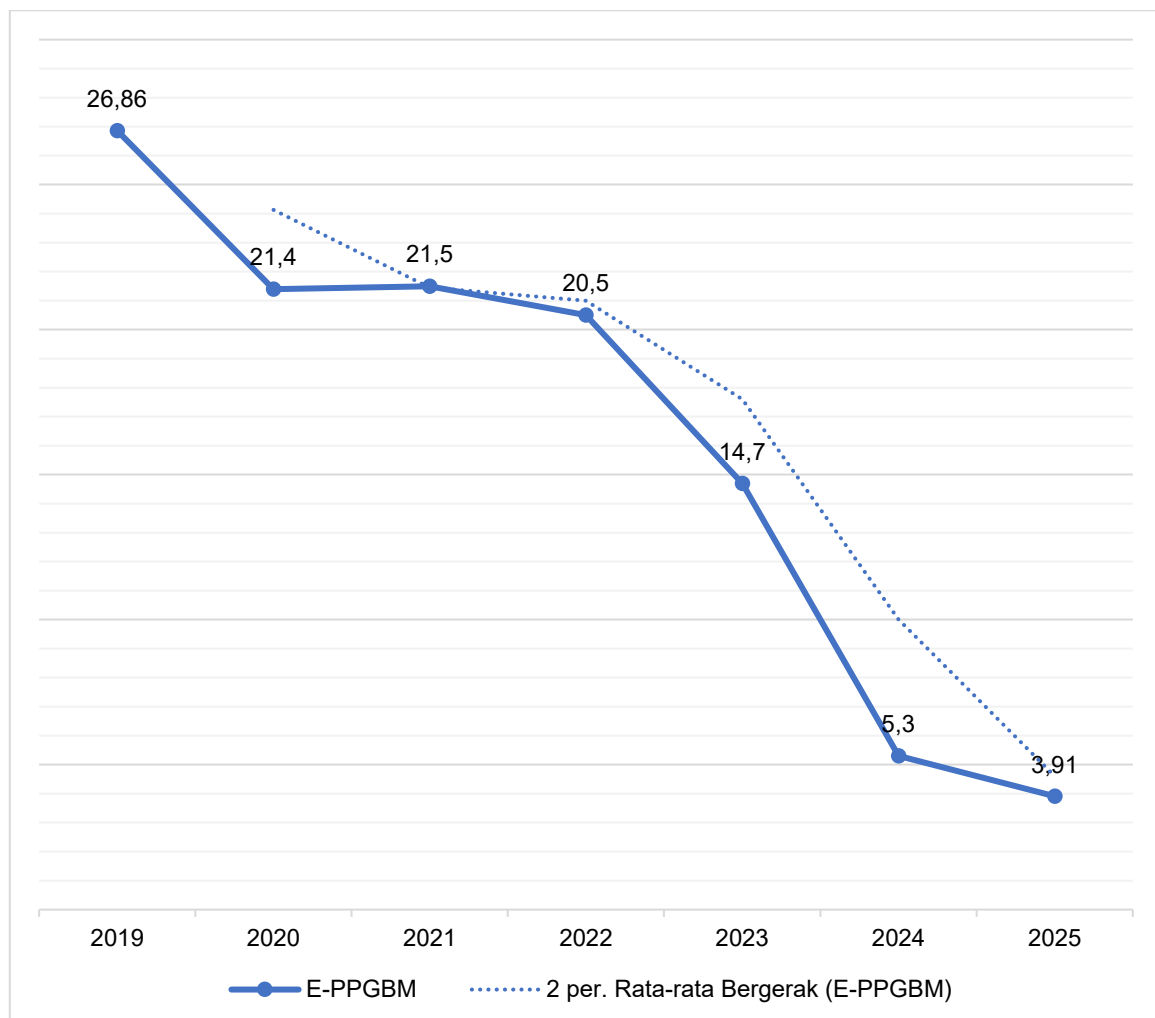
Disparitas angka yang sangat signifikan antara 26,10% (SSGI) dan 3,91% (E-PPGBM) ini dapat dijelaskan melalui pendekatan cakupan data. Data E-PPGBM dinilai lebih valid dan reliabel untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan karena mencakup hampir seluruh populasi balita di Kabupaten Pasuruan, sehingga meminimalisir bias sampling. Bagi TPPS Kabupaten Pasuruan, data 3,91% ini adalah cerminan hasil kerja keras ribuan kader dan tenaga kesehatan yang melakukan intervensi spesifik setiap hari, bukan sekadar anomali statistik. Oleh karena itu, dalam laporan Semester II ini, rujukan utama kinerja yang digunakan adalah data E-PPGBM

yang memungkinkan intervensi dilakukan tepat sasaran pada individu yang membutuhkan (*precision public health*).

B. Tren Penurunan Stunting Berdasarkan Bulan Timbang

Konsistensi kinerja penurunan *stunting* di Kabupaten Pasuruan dapat dibuktikan melalui analisis tren longitudinal data E-PPGBM. Jika ditarik garis data historis sejak tahun 2019 hingga 2025, terlihat adanya pola penurunan yang sangat konsisten, progresif, dan meyakinkan. Hal ini mengonfirmasi bahwa strategi konvergensi yang diterapkan telah berada di jalur yang tepat (*on the right track*).

Berikut adalah rekam jejak penurunan prevalensi stunting berdasarkan E-PPGBM:



Gambar 3.3 Tren Prevalensi Stunting Berdasarkan E-PPGBM Tahun 2019-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, diolah

Capaian angka prevalensi 3,91% pada Bulan Timbang Agustus 2025 ini memiliki legitimasi data yang sangat kuat. Berdasarkan laporan agregat, dari total populasi sasaran balita riil yang datang dan diukur di Posyandu (*D*) sebanyak 101.252 balita, ditemukan jumlah balita *stunting* secara absolut sebanyak 3.962 balita.

Angka partisipasi pengukuran sebesar 101.252 balita ini merupakan indikator kunci validitas data. Tingginya angka partisipasi masyarakat (*D/S*) ke Posyandu membuktikan bahwa angka 3,91% tersebut bukan dihasilkan dari sampel kecil, melainkan dari pengukuran massal yang merepresentasikan kondisi populasi sesungguhnya. Penurunan drastis hingga ke level satu digit (di bawah 5%) ini mengindikasikan keberhasilan intervensi spesifik di sektor kesehatan, seperti efektivitas pemberian Makanan Tambahan (*PMT*) lokal, keberhasilan promosi *ASI Eksklusif*, serta pemantauan pertumbuhan yang ketat. Data ini menjadi modal sosial dan politik yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk meyakinkan seluruh pemangku kepentingan bahwa Kabupaten Pasuruan semakin dekat menuju status *Zero New Stunting*.

3.2. Capaian Indikator Intervensi Spesifik (Sektor Kesehatan)

Intervensi spesifik merupakan pilar utama dalam penanganan *stunting* yang menysasar langsung penyebab-penyebab fundamental (kausalitas langsung) terjadinya gagal tumbuh, yakni inagurasi asupan gizi dan pengendalian penyakit infeksi. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, meskipun intervensi spesifik hanya berkontribusi sekitar 30% terhadap penurunan prevalensi, namun peranannya bersifat mutlak dan tidak tergantikan, khususnya dalam menyelamatkan periode kritis 1.000 Hari Pertama Kehidupan (*HPK*).

Pada Semester II Tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan selaku *leading sector* telah melakukan transformasi pendekatan layanan. Fokus kinerja tidak lagi semata-mata mengejar kuantitas cakupan (*coverage*), melainkan beralih pada peningkatan kualitas layanan (*Quality of Care*) dan ketepatan sasaran (*targeting accuracy*). Seluruh Puskesmas, Pustu, dan Polindes digerakkan secara masif untuk memastikan setiap rantai layanan kesehatan terdistribusi secara merata.

Berikut adalah analisis komprehensif mengenai capaian kinerja indikator intervensi spesifik berdasarkan klaster siklus hidup:

A. Pelayanan Kesehatan Remaja Putri

Remaja putri menempati posisi yang sangat strategis sebagai sasaran hulu (*upstream target*) dalam siklus panjang pencegahan stunting. Intervensi pada fase ini didasarkan pada urgensi medis untuk memutus mata rantai stunting antar-generasi sedini mungkin, bahkan sebelum masa kehamilan terjadi. Secara fisiologis, remaja putri yang menderita anemia (kekurangan sel darah merah/hemoglobin) memiliki risiko sangat tinggi untuk tumbuh menjadi ibu hamil yang anemia. Kondisi ini berbahaya karena berpotensi besar menyebabkan ibu melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan panjang badan yang tidak optimal, yang merupakan indikator awal stunting. Oleh karena itu, investasi kesehatan pada remaja putri bukan sekadar perbaikan gizi sesaat, melainkan investasi jangka panjang untuk menjamin kualitas generasi masa depan yang bebas stunting.

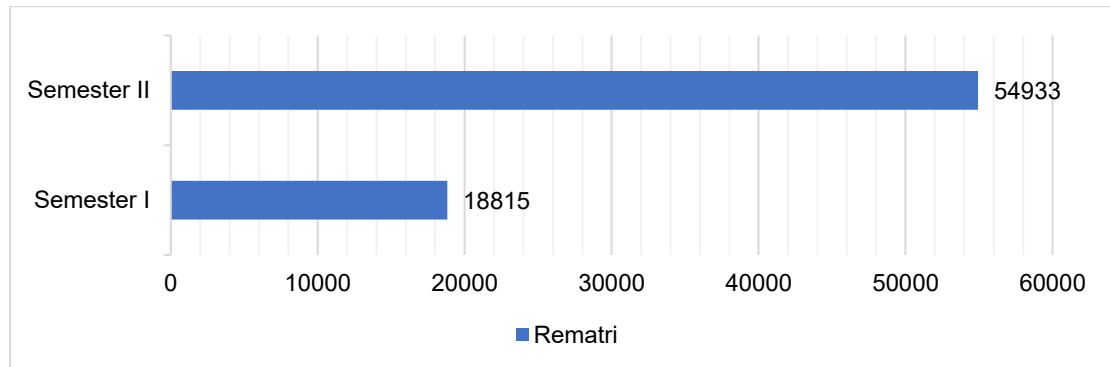
1. Intensifikasi Skrining Anemia di Institusi Pendidikan

Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui jejaring Puskesmas melakukan akselerasi kegiatan penjangkauan kesehatan (*skrining*) anak sekolah secara masif. Fokus utama kegiatan ini adalah pemeriksaan kadar Hemoglobin (Hb) yang menyoroti siswi kelas 7 (tingkat SMP/ sederajat) dan kelas 10 (tingkat SMA/ sederajat) sebagai titik masuk pemantauan. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan status anemia remaja putri secara presisi dengan metode *by name by address*, sehingga intervensi lanjutan dapat dilakukan tepat sasaran.

Berdasarkan data lapangan, tantangan terbesar dan paling kompleks yang dihadapi adalah menjangkau remaja putri yang berada di lingkungan pendidikan non-formal, khususnya Pondok Pesantren, serta remaja putri yang putus sekolah. Seringkali, akses masuk ke lingkungan pesantren memerlukan pendekatan khusus. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kesehatan telah memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan untuk membuka akses, serta membentuk pos-pos "Posyandu Remaja" di tingkat desa. Langkah ini diambil untuk menyisir remaja yang tidak terjangkau lewat jalur sekolah formal agar tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang setara.

2. Efektivitas dan Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)

Indikator kinerja utama pada klaster ini adalah persentase remaja putri yang tidak hanya menerima, tetapi benar-benar mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin. Target kepatuhan yang ditetapkan adalah konsumsi minimal 1 tablet per minggu sepanjang tahun (52 tablet per tahun).



Gambar 3.4 Grafik Tren Kepatuhan Konsumsi TTD Rematri Semester I vs Semester II

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, diolah

Realisasi capaian pada semester ini menunjukkan lonjakan positif yang signifikan berkat implementasi dan replikasi inovasi "Aksi Bergizi" yang dilakukan secara serentak di berbagai sekolah. Perubahan paradigma terjadi di sini; jika pada periode sebelumnya pembagian TTD seringkali hanya sampai pada tahap distribusi (obat diterima siswa tapi disimpan atau dibuang), maka pada Semester II ini telah diterapkan mekanisme pengawasan minum obat bersama (*supervised administration*).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan aktivitas fisik berupa senam bersama dan sarapan pagi bersama di sekolah setiap hari Jumat. Sarapan bersama ini krusial untuk mencegah efek samping mual yang sering menjadi alasan siswi menolak minum TTD. Peran guru UKS dan kader kesehatan remaja menjadi sangat vital dalam memantau kartu kontrol minum TTD setiap minggunya. Peningkatan kepatuhan ini berkorelasi langsung dengan peningkatan konsentrasi belajar siswi di kelas dan kebugaran fisik mereka (mengurangi gejala 5L: Lemah, Letih, Lesu, Lunglai, Lalai). Secara medis, menjaga kadar Hb remaja putri konsisten di atas 12 g/dL merupakan benteng pertahanan pertama agar kelak saat mereka memasuki masa pra-konsepsi dan kehamilan, tubuh mereka telah memiliki cadangan zat besi yang adekuat untuk mendukung pertumbuhan janin yang sehat.

B. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Nifas

Intervensi pada masa kehamilan dan nifas merupakan "medan pertempuran" utama dalam pencegahan *stunting*. Fase ini adalah periode di mana pertumbuhan sel-sel otak dan organ vital janin terjadi sangat pesat. Kegagalan pemenuhan nutrisi pada fase ini bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan sempurna). Oleh karena itu, pada Semester II Tahun 2025, standar pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan nifas diperketat dengan protokol pemantauan yang intensif.

1. Transformasi Kualitas Pemeriksaan Kehamilan (Antenatal Care/ANC)

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengadopsi standar nasional terbaru dalam pelayanan ANC, yaitu minimal 6 kali pemeriksaan (K6) selama masa kehamilan. Kualitas pemeriksaan ditingkatkan dengan mewajibkan minimal 2 kali pemeriksaan dilakukan langsung oleh Dokter Umum/Dokter Spesialis Kandungan, disertai pemeriksaan USG (*Ultrasonography*) pada Trimester 1 dan Trimester 3.

Pada Semester II ini, ketersediaan alat USG di seluruh Puskesmas Kabupaten Pasuruan telah dioptimalkan pemanfaatannya. Hal ini merupakan lompatan besar dalam deteksi dini risiko *stunting*. Melalui USG, tenaga kesehatan dapat memantau perkembangan janin secara visual, mendeteksi kelainan letak plasenta, serta mengukur taksiran berat janin secara presisi. Kasus-kasus Pertumbuhan Janin Terhambat (*Intrauterine Growth Restriction/IUGR*) yang menjadi cikal bakal bayi lahir pendek, kini dapat dideteksi lebih dini untuk segera dilakukan intervensi gizi atau rujukan ke RSUD. Aplikasi pemantauan ibu hamil berbasis digital juga telah diintegrasikan untuk memantau jadwal kunjungan, sehingga angka *drop-out* pemeriksaan dapat ditekan seminimal mungkin.

2. Penanganan Terfokus Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

Ibu hamil dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm dikategorikan sebagai Ibu Hamil KEK. Kondisi ini mencerminkan malnutrisi kronis pada ibu yang sangat berbahaya bagi janin. Strategi intervensi yang diterapkan pada semester ini adalah pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal yang kaya protein hewani, menggantikan model PMT biskuit pabrikan yang cenderung membosankan. PMT Lokal ini dikelola oleh kader kesehatan

desa dengan menu yang variatif dan disesuaikan dengan kearifan lokal. Pendampingan dilakukan selama minimal 90 hari makan (HMA) untuk memastikan asupan kalori dan protein benar-benar masuk. Evaluasi Semester II menunjukkan keberhasilan signifikan, di mana mayoritas Ibu Hamil KEK yang diintervensi mengalami kenaikan berat badan sesuai grafik kehamilan, dan berhasil melahirkan bayi dengan berat badan normal (>2500 gram) serta panjang badan normal (>48 cm).

3. Penguatan Pelayanan Nifas dan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan Pasca persalinan, fokus layanan beralih pada pemulihan kesehatan ibu dan manajemen laktasi. Kunjungan nifas (KF) dilakukan lengkap 4 kali untuk memastikan tidak ada komplikasi pasca salin dan ibu mampu memberikan ASI Eksklusif. Selain itu, indikator strategis yang digenjut pada semester ini adalah KB Pasca Persalinan (KBPP).

KB Pasca Persalinan memiliki korelasi kuat dengan penurunan *stunting*. Melalui edukasi intensif sejak masa kehamilan (KIE saat ANC), ibu didorong untuk langsung menggunakan kontrasepsi segera setelah melahirkan. Tujuannya adalah mengatur jarak kehamilan (*birth spacing*). Jarak kehamilan yang terlalu dekat (<2 tahun) terbukti secara ilmiah mengganggu proses menyusui (penyapihan dini) dan memecah fokus pengasuhan ibu, yang berisiko menyebabkan anak sebelumnya menjadi *stunting*. Peningkatan cakupan KBPP, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD dan Implan, menjadi bukti keberhasilan sinergi antara Bidan Desa dan Penyuluh KB (PLKB) di lapangan.

C. Pelayanan Kesehatan Balita

Balita adalah kelompok sasaran hilir (*downstream target*) yang menjadi indikator akhir keberhasilan program. Intervensi pada balita dibagi menjadi dua rezim: rezim pencegahan (promotif-preventif) bagi balita sehat, dan rezim tata laksana (kuratif-rehabilitatif) bagi balita bermasalah gizi.

1. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan yang Berkualitas
Sebagaimana telah disinggung pada analisis data prevalensi, partisipasi masyarakat (D/S) pada Bulan Timbang Agustus 2025 mencapai angka

fenomenal 101.252 balita. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari berjalannya fungsi Posyandu sebagai sentra deteksi dini.

Kualitas pemantauan pertumbuhan pada semester ini semakin valid dengan penggunaan alat Antropometri Kit terstandar (Timbangan Digital, *Infantometer*, *Stadiometer*) di seluruh Posyandu, menggantikan alat dacin tradisional yang rawan bias. Tenaga kesehatan dan kader telah dilatih untuk mendeteksi *Weight Faltering* (T) atau kondisi berat badan tidak naik sesuai grafik KMS. Deteksi dini "T" ini sangat krusial karena merupakan pintu masuk terjadinya *stunting*. Balita yang terdeteksi "T" langsung dirujuk untuk mendapatkan konseling gizi dan investigasi penyebab (apakah karena pola makan atau infeksi tersembunyi).

2. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan Lanjutan Penyakit infeksi berulang adalah "pencuri" zat gizi dalam tubuh balita. Energi yang seharusnya digunakan untuk tumbuh kembang, habis terkuras untuk melawan penyakit. Oleh karena itu, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah intervensi gizi sensitif yang sangat *cost-effective*.

Meskipun dihadapkan pada tantangan penolakan kelompok masyarakat tertentu dan isu *hoax* vaksin, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan terus melakukan pendekatan persuasif. Strategi *sweeping* (kunjungan rumah), *Defaulter Tracking* (melacak anak yang putus imunisasi), dan program "Bulan Imunisasi Anak Sekolah" (BIAS) dijalankan secara konsisten. Tercapainya target *Universal Child Immunization* (UCI) di sebagian besar desa menjadi benteng *Herd Immunity* yang melindungi balita dari penyakit PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) seperti Campak, Polio, dan Difteri.

3. Tata Laksana Gizi Buruk, Gizi Kurang, dan Stunting Bagi balita yang telah terlanjur mengalami masalah gizi, intervensi dilakukan dengan protokol medis yang ketat.
 - Balita Gizi Buruk: Dirawat dengan protokol Tata Laksana Gizi Buruk (TLGB) menggunakan F-75, F-100, atau Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) di bawah pengawasan Dokter Spesialis Anak.

- Balita Gizi Kurang & Stunting: Mendapatkan intervensi PMT Pemulihan berbahan pangan lokal tinggi protein hewani (telur, ikan, ayam) selama 90 hari. Pada Semester II ini, dilakukan evaluasi dampak pemberian PMT Lokal. Hasilnya menunjukkan tren perbaikan status gizi (kenaikan berat badan dan tinggi badan) yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa edukasi "Isi Piringku" yang menyertai pemberian PMT berhasil mengubah perilaku pemberian makan ibu balita di rumah, sehingga keberlanjutan perbaikan gizi tetap terjaga pasca program selesai.

3.3. Capaian Indikator Intervensi Sensitif (Lintas Sektor)

Keberhasilan percepatan penurunan *stunting* tidak dapat dilepaskan dari peran vital intervensi sensitif yang secara teoritis berkontribusi sebesar 70% dalam mengatasi akar permasalahan gizi. Berbeda dengan intervensi spesifik yang bersifat medis, intervensi sensitif menysasar determinan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang mempengaruhi tumbuh kembang anak secara tidak langsung. Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memperkuat orkestrasi lintas sektor ini dengan strategi konvergensi yang lebih solid, memastikan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak dalam satu komando untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pencegahan *stunting*. Capaian kinerja intervensi sensitif pada semester ini diuraikan dalam narasi analisis sebagai berikut:

A. Pelayanan dan Pendampingan Calon Pengantin (Catin)

Strategi penanganan *stunting* di Kabupaten Pasuruan telah bertransformasi secara fundamental ke arah pencegahan hulu (*upstream preventive strategy*). Pemerintah daerah menempatkan pasangan Calon Pengantin (Catin) dan akseptor Keluarga Berencana (KB) sebagai titik intervensi paling krusial dengan logika dasar bahwa memutus mata rantai *stunting* harus dimulai sebelum kehidupan itu sendiri terbentuk, atau pada fase pra-konsepsi. Dalam konteks persiapan kehidupan berkeluarga, Dinas P3AP2KB bersinergi erat dengan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan untuk menegakkan protokol skrining kesehatan pranikah yang ketat dan tidak dapat ditawar. Instrumen teknologi utama yang dioptimalkan penggunaannya pada semester ini adalah aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Aplikasi ini tidak lagi sekadar diposisikan sebagai syarat administratif semata untuk mendapatkan sertifikat nikah,

melainkan difungsikan secara vital sebagai alat deteksi dini (*early warning system*). Mekanisme kerjanya melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Kader KB untuk memantau input data Catin secara *real-time*. TPK memantau parameter kesehatan vital meliputi status anemia (Hb), ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) untuk mendeteksi Kekurangan Energi Kronis (KEK), Indeks Massa Tubuh (IMT), serta perilaku merokok. Catin yang terdeteksi memiliki faktor risiko kesehatan diwajibkan mendapatkan pendampingan intensif selama 3 bulan sebelum menikah berupa edukasi gizi dan fasilitasi rujukan, guna memastikan kondisi fisik calon ibu benar-benar prima dan "siap hamil" sebelum memasuki masa konsepsi.

Sejalan dengan upaya penyiapan Catin, penguatan layanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan juga menjadi prioritas utama pada semester ini sebagai strategi pengendalian jarak kelahiran. Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya bahwa jarak kehamilan yang terlalu dekat (kurang dari 3 tahun) memiliki korelasi positif yang kuat dengan risiko kejadian stunting pada anak berikutnya, serta berpotensi mengganggu proses pemberian ASI Eksklusif dan pola asuh optimal bagi anak sebelumnya. Oleh karena itu, promosi penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD (*Intrauterine Device*) dan Implan digencarkan secara masif di seluruh fasilitas kesehatan, jejaring praktik mandiri bidan, hingga rumah sakit. Pendekatan persuasif melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilakukan secara intensif bahkan sejak ibu masih dalam masa kehamilan (trimester III), sehingga keputusan ber-KB dapat diambil segera setelah proses persalinan selesai. Penggunaan MKJP dinilai jauh lebih strategis dibandingkan metode jangka pendek karena meminimalisir risiko lupa (*drop-out*). Sinergitas antara kesiapan fisik Catin dan pengaturan jarak kelahiran melalui KB ini diharapkan mampu memutus mata rantai lahirnya bayi stunting baru di Kabupaten Pasuruan secara sistemik.

B. Dukungan Sanitasi dan Lingkungan Hidup

Faktor lingkungan memegang peranan yang sangat determinan dalam status gizi balita, mengingat studi kesehatan masyarakat menegaskan hubungan kausalitas yang erat antara sanitasi yang buruk dengan kejadian penyakit infeksi berulang seperti diare dan cacingan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan terus berupaya keras memutus jalur

transmisi penyakit melalui perbaikan sanitasi dasar dengan fokus utama pada percepatan status Desa *Open Defecation Free* (ODF) atau Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya ini dilakukan secara holistik, tidak hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur fisik seperti pembangunan jamban sehat dan IPAL Komunal, tetapi lebih menekankan pada pendekatan perubahan perilaku masyarakat melalui metode Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Tantangan kultural di beberapa kantong wilayah yang masih mempraktikkan buang air di sungai direspon dengan pemucuan intensif yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk membangun kesadaran kolektif. Hal ini sangat krusial secara medis karena paparan kotoran manusia di lingkungan tempat tinggal dapat memicu kondisi *Environmental Enteropathy* (EED), yakni peradangan kronis pada usus halus balita yang menyebabkan dinding usus rusak sehingga menghambat penyerapan nutrisi makanan. Akibatnya, meskipun anak diberi asupan makan bergizi, ia tetap berisiko stunting karena nutrisinya tidak terserap tubuh secara optimal.

Melengkapi perbaikan sanitasi, jaminan ketersediaan akses air minum yang aman dan layak juga terus diperluas jangkauannya sebagai syarat mutlak kehidupan sehat. Pemerintah daerah menyadari bahwa air merupakan kebutuhan dasar vital, khususnya dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan pakai sabun dan mengolah Makanan Pendamping ASI (MPASI). Pada Semester II Tahun 2025, kegiatan pengawasan kualitas air minum (*water quality surveillance*) diperketat di desa-desa yang menjadi lokus stunting. Petugas Sanitarian Puskesmas melakukan pengambilan sampel air atau uji petik secara berkala di sumber-sumber air masyarakat untuk memastikan air bebas dari kontaminasi bakteri *E. coli* maupun zat kimia berbahaya. Jika ditemukan pencemaran, intervensi berupa klorinasi atau perbaikan konstruksi sumber air segera dilakukan. Integrasi antara penyediaan sarana sanitasi yang layak (bebas tinja) dan akses air bersih yang aman ini menjadi fondasi pertahanan kesehatan lingkungan yang mutlak diperlukan untuk mendukung optimalisasi pertumbuhan fisik balita di Kabupaten Pasuruan.

C. Penguatan Pola Asuh dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Selain aspek kesehatan fisik dan lingkungan, dimensi pengasuhan (*parenting*) dan stimulasi psikososial juga mendapatkan perhatian serius dalam kerangka intervensi sensitif, karena stunting bukan hanya masalah tubuh pendek melainkan juga

hambatan perkembangan otak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil peran strategis melalui pengembangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Konsep PAUD HI ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan usia dini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar kognitif, melainkan bertransformasi menjadi pos pelayanan terpadu yang memantau kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Di satuan PAUD HI, pengukuran pertumbuhan berat dan tinggi badan anak didik dilakukan secara rutin setiap bulan bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas, dan datanya disinkronkan dengan sistem E-PPGBM sehingga deteksi keterlambatan tumbuh kembang dapat dilakukan sedini mungkin. Kurikulum pembelajaran juga diselaraskan dengan muatan edukasi gizi, misalnya melalui kegiatan makan bersama dengan menu gizi seimbang, untuk membiasakan anak-anak mengenal dan menyukai makanan sehat sejak dini.

Sinergi intervensi di sekolah kemudian diperkuat dengan peningkatan kapasitas orang tua di rumah melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). Forum ini menjadi wadah edukasi vital bagi orang tua untuk memahami pola asuh yang benar, urgensi periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta cara menstimulasi perkembangan otak anak menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA). Pada semester ini, materi edukasi diperkaya secara signifikan dengan penekanan pada praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang tepat, baik dari segi tekstur, frekuensi, maupun porsi. Selain itu, terdapat inovasi program pelibatan peran ayah dalam pengasuhan atau "Kelas Ayah", yang didasarkan pada pemahaman bahwa pengasuhan anak dan pemantauan tumbuh kembang bukan beban ibu semata. Keterlibatan ayah dalam memberikan dukungan emosional dan bantuan fisik terbukti menurunkan tingkat stres ibu yang berdampak positif pada kualitas pengasuhan. Dengan demikian, kolaborasi antara PAUD HI dan BKB menciptakan ekosistem pengasuhan yang konsisten dan suportif, baik di sekolah maupun di rumah, demi terwujudnya generasi emas Kabupaten Pasuruan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

3.4. Kinerja Tim Pendamping keluarga (TPK)

Perubahan paradigma penanganan *stunting* dari sekadar pendekatan programatis menjadi gerakan masyarakat menempatkan sumber daya manusia (SDM) di lini lapangan sebagai variabel penentu keberhasilan utama. Dalam arsitektur strategi

nasional percepatan penurunan *stunting*, Tim Pendamping Keluarga (TPK) didesain sebagai garda terdepan (*frontliner*) yang bertugas melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan bantuan sosial kepada sasaran prioritas. Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan penguatan kelembagaan dan operasional TPK secara masif untuk memastikan bahwa setiap keluarga berisiko *stunting* mendapatkan pendampingan yang komprehensif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kinerja TPK pada periode ini dapat dianalisis melalui dimensi-dimensi strategis berikut:

A. Konsolidasi Kekuatan Personil dan Sinergitas Peran

Kekuatan utama TPK terletak pada struktur komposisinya yang unik dan saling melengkapi, terdiri dari Bidan Desa sebagai tenaga kesehatan profesional, Kader PKK sebagai penggerak sosial masyarakat, dan Kader KB sebagai pengelola data basis keluarga. Sinergitas ketiga unsur ini menciptakan kolaborasi mikro yang efektif di tingkat desa/kelurahan. Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil memobilisasi ribuan personil TPK yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan.

Dinamika kinerja di lapangan menunjukkan adanya peningkatan kohesivitas tim yang signifikan dibandingkan semester sebelumnya. Jika pada tahap awal pembentukan sering terjadi tumpang tindih peran, maka pada semester ini pembagian tugas telah berjalan lebih cair dan terorganisir. Bidan Desa berperan sebagai penanggung jawab medis yang memastikan intervensi kesehatan berjalan sesuai standar, Kader PKK berperan melakukan pendekatan persuasif kultural untuk mengubah perilaku pengasuhan ibu sasaran, sedangkan Kader KB memastikan validitas data sasaran yang didampingi terinput dalam sistem pelaporan. Konsolidasi ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi Kabupaten Pasuruan, mengingat tantangan geografis dan sosiologis masyarakat yang beragam membutuhkan pendekatan personal *door-to-door* yang hanya bisa dilakukan oleh kader setempat yang memahami karakteristik wilayahnya.

B. Efektivitas Pendampingan Berbasis Aplikasi Elsimil

Transformasi digital menjadi ciri khas kinerja TPK pada tahun 2025. Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) telah menjadi instrumen kerja harian yang wajib

digunakan untuk memantau kondisi sasaran secara *real-time*. Pada semester ini, fokus kinerja TPK tidak hanya sekadar pada kuantitas kunjungan, melainkan pada kualitas pendampingan yang tercatat dalam sistem digital. TPK melakukan pendampingan intensif kepada empat kelompok sasaran utama, yakni Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, dan Balita (0-59 bulan).

Analisis terhadap data Elsimil menunjukkan bahwa responsivitas TPK dalam menindaklanjuti notifikasi "Berisiko" semakin cepat. Ketika sistem mendeteksi adanya Ibu Hamil dengan risiko tinggi (misalnya KEK atau Anemia) atau balita dengan pertumbuhan tidak optimal, TPK segera melakukan kunjungan rumah untuk memberikan edukasi gizi dan memastikan sasaran tersebut mengakses layanan kesehatan di Puskesmas. Kinerja pendampingan ini juga mencakup fungsi advokasi, di mana TPK aktif memfasilitasi keluarga sasaran yang belum memiliki jaminan kesehatan (BPJS/KIS) atau dokumen kependudukan (Admuduk) untuk segera mendapatkannya, sehingga hambatan administratif dalam mengakses layanan publik dapat teratasi.

C. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Insentif Kinerja

Menyadari beban kerja TPK yang cukup berat dan kompleks, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui DP3AP2KB memberikan perhatian serius pada aspek peningkatan kapasitas (*capacity building*). Sepanjang Semester II Tahun 2025, serangkaian pelatihan dan orientasi teknis telah dilaksanakan untuk membekali TPK dengan kemampuan komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*) dan pemahaman teknis gizi terkini. Materi pelatihan difokuskan pada keterampilan konseling menyusui, pemantauan pertumbuhan, serta penggunaan fitur-fitur pemutakhiran data pada aplikasi Elsimil. Hal ini bertujuan agar kehadiran TPK di rumah sasaran tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar mampu menjadi konselor yang solutif bagi permasalahan keluarga.

Selain aspek kompetensi, aspek kesejahteraan kader juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja. Penyaluran biaya operasional pendampingan (*visum*) bagi TPK pada semester ini telah diupayakan berjalan tepat waktu dan transparan sesuai dengan juknis BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana). Mekanisme pembayaran berbasis kinerja (*performance-based incentive*) mulai diterapkan secara bertahap, di

mana insentif dikaitkan langsung dengan pelaporan aktivitas pendampingan di aplikasi. Langkah ini terbukti efektif meningkatkan motivasi dan disiplin kader dalam melakukan pelaporan data. Meskipun demikian, evaluasi lapangan masih menemukan beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan sinyal internet di wilayah pegunungan dan spesifikasi gawai milik kader yang belum merata, yang menjadi catatan perbaikan untuk dukungan sarana prasarana di tahun anggaran berikutnya.

3.5. Realisasi Kinerja Keuangan dan Pemanfaatan Insentif Fiskal

Salah satu indikator paling nyata dari keseriusan pemerintah daerah dalam menangani isu prioritas nasional adalah besaran dukungan fiskal yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak hanya menunjukkan rencana kerja, tetapi membuktikan komitmen anggaran yang sangat kuat (*strong budget commitment*) sebagai tulang punggung percepatan penurunan stunting. Berdasarkan data rekapitulasi realisasi anggaran Aksi Konvergensi per Triwulan 3 Tahun 2025, total pagu anggaran yang teralokasi untuk program stunting yang mencakup intervensi spesifik di sektor kesehatan maupun intervensi sensitif di sektor non-kesehatan mencapai angka yang sangat signifikan, yakni Rp 182.219.203.998 (Seratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Besarnya alokasi ini merefleksikan bahwa penanganan stunting telah ditempatkan sebagai arus utama pembangunan daerah, di mana setiap rupiah yang dianggarkan dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap perbaikan status gizi balita.

Tabel 3.1 Alokasi Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal Stunting

No	Perangkat Daerah (OPD)	Alokasi Anggaran (Rp)	Fokus Pemanfaatan
1	Dinas Kesehatan	Rp 3.209.646.000	PMT Lokal Bumil/Balita & Alkes Posyandu
2	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 2.907.590.000	Pengelolaan Persampahan & Sanitasi Kumuh
3	Dinas Sosial	Rp 365.000.000	Jaminan Sosial Keluarga 1000 HPK

4	Dinas P3AP2KB	Rp 340.000.000	KIE KB dan Bangga Kencana
5	Dinas SDA, Cipta Karya & TR	Rp 278.500.000	Penyediaan Air Minum (SPAM)
6	Dinas Peternakan & Keswan	Rp 46.500.000	Kesehatan Masyarakat Veteriner (Pangan ASUH)
-	TOTAL	Rp 7.147.236.000	-

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Pasuruan*

Dari total pagu anggaran yang cukup fantastis tersebut, kinerja penyerapan anggaran menunjukkan tren yang positif, progresif, dan akuntabel. Hingga posisi akhir November 2025, tercatat total realisasi anggaran telah mencapai Rp 124.303.649.350 (Seratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Angka realisasi ini merepresentasikan belanja program yang tersebar secara luas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu, mulai dari sektor kesehatan, ketahanan pangan, sanitasi lingkungan, hingga jaring pengaman sosial. Tingginya angka realisasi penyerapan ini mengonfirmasi bahwa program-program penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan administratif di atas kertas, melainkan benar-benar dieksekusi secara riil di lapangan. Belanja barang/jasa dan belanja modal yang dilakukan telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat sasaran, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting secara agregat.

Selain mengandalkan kekuatan kemandirian APBD murni, prestasi kinerja penurunan stunting Kabupaten Pasuruan juga mendapatkan pengakuan dan apresiasi konkret dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025, Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting. Total alokasi dana insentif yang diterima sebesar Rp 7.147.236.000 (Tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Penerimaan dana insentif ini merupakan bukti validasi eksternal yang prestisius, yang menegaskan bahwa kinerja Kabupaten Pasuruan dinilai "berprestasi" dan memiliki tata kelola data serta hasil

capaian penurunan prevalensi stunting yang lebih unggul dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal tersebut dikelola dengan prinsip kecepatan dan ketepatan; dana tidak dibiarkan mengendap sebagai SiLPA, melainkan langsung didistribusikan secara strategis kepada Perangkat Daerah kunci untuk mengakselerasi intervensi di sisa tahun anggaran 2025. Berdasarkan usulan rencana penggunaan dana (*spending plan*) yang telah disetujui, alokasi terbesar diarahkan untuk memperkuat dua pilar utama, yaitu sektor kesehatan dan sektor lingkungan hidup. Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi sebesar Rp 3.209.646.000 yang dialokasikan untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP/UKM). Anggaran ini difokuskan secara tajam untuk belanja intervensi spesifik yang bersifat mendesak, seperti pengadaan Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal yang kaya protein hewani untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita Gizi Kurang, serta pemenuhan alat kesehatan antropometri standar di Puskesmas dan Posyandu guna menjamin validitas dan akurasi pengukuran status gizi di lapangan.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan porsi alokasi terbesar kedua, yakni senilai Rp 2.907.590.000 untuk Program Pengelolaan Persampahan. Strategi pengalokasian ini dinilai sangat tepat sasaran mengingat faktor kebersihan lingkungan dan sanitasi memiliki korelasi kausalitas yang kuat dengan kejadian penyakit infeksi berulang pada balita. Dana ini digunakan secara intensif untuk membenahi manajemen sanitasi dan persampahan di wilayah-wilayah yang menjadi lokus stunting dan terindikasi kumuh, sehingga dapat memutus mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan yang menghambat pertumbuhan anak. Selain kedua sektor tersebut, distribusi dana insentif juga menyentuh aspek perlindungan sosial melalui Dinas Sosial dengan alokasi Rp 365.000.000. Dana ini dialokasikan untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebuah langkah afirmasi untuk memastikan keluarga sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang rentan secara ekonomi mendapatkan bantalan sosial yang memadai agar tetap mampu mengakses pangan bergizi.

Dukungan infrastruktur dasar juga diperkuat melalui alokasi kepada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp 278.500.000. Anggaran ini

difokuskan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang bertujuan menjamin ketersediaan air bersih yang layak konsumsi bagi rumah tangga sasaran, demi mencegah penyakit diare yang sering menjadi pemicu stunting. Di sektor penguatan keluarga, Dinas P3AP2KB mengelola dana insentif sebesar Rp 340.000.000 yang terbagi untuk dua program vital, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp 240 juta dan Program Pembangunan Keluarga Sejahtera (Bangga Kencana) sebesar Rp 100 juta. Dana ini digunakan untuk intensifikasi penyuluhan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi di lini lapangan guna mengatur jarak kelahiran yang aman. Terakhir, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapatkan alokasi Rp 46.500.000 untuk Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang secara tidak langsung mendukung ketersediaan rantai pasok pangan protein hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat luas.

Sinergitas yang solid antara realisasi APBD Reguler yang telah mencapai lebih dari Rp 124 Miliar dan suntikan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 7,1 Miliar ini menciptakan ruang fiskal yang sangat memadai dan fleksibel bagi Kabupaten Pasuruan. Kombinasi sumber pendanaan ini menjadi amunisi krusial untuk menuntaskan target penurunan stunting pada akhir tahun 2025. Pola penganggaran yang konvergen dan terintegrasi ini memastikan bahwa prinsip *Money Follows Program* telah berjalan efektif, di mana setiap rupiah anggaran negara benar-benar hadir melayani kebutuhan gizi, kesehatan, dan masa depan generasi penerus Kabupaten Pasuruan.

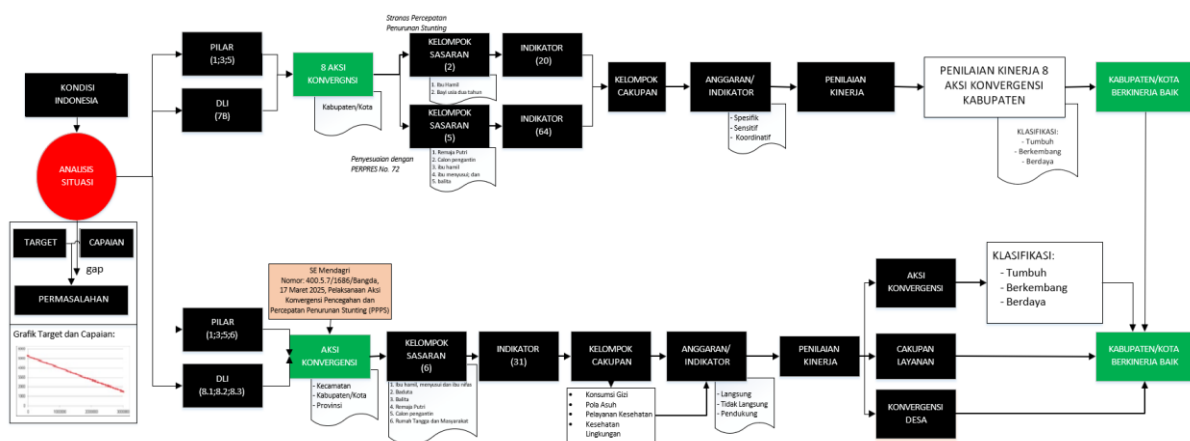
3.6. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Indikator Kinerja

Sesuai dengan kerangka kerja 4 Tahap yang telah dibahas di awal Bab III, analisis kesenjangan (*gap analysis*) ini memiliki fungsi ganda yakni sebagai puncak dari Tahap 1 (Analisis Situasi) dan sebagai input fundamental bagi Tahap 4 (Penilaian Hasil Monev). Tujuan utamanya adalah untuk mengukur secara akuntabel dan kuantitatif sejauh mana realisasi capaian layanan baik intervensi spesifik maupun sensitif yang telah dipaparkan sebelumnya telah berhasil atau gagal bergerak menuju target yang telah ditetapkan. Kesenjangan (*gap*) yang teridentifikasi dalam sub-bab ini adalah selisih antara kondisi ideal (Target) dengan kondisi riil (Capaian) di lapangan.

Metodologi yang digunakan bersifat komparatif, yaitu melakukan perbandingan langsung antara dua set data utama:

1. Target Kinerja: Target ini bukanlah angka arbitrer, melainkan target resmi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis daerah (RPJMD/RKPD) dan merupakan output formal dari Tahap 2 (Penguatan Perencanaan).
2. Realisasi Capaian: Merupakan capaian riil intervensi untuk Indikator Aksi Konvergensi selama Semester II Tahun 2025.

Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk menyediakan sebuah diagnosis yang jernih. Dengan memetakan indikator-indikator mana yang berstatus "Merah" (mengalami kesenjangan kritis dan *off-track*), "Kuning" (mengalami kesenjangan minor), dan "Hijau" (*on-track*), kita dapat mengidentifikasi letak kegagalan sistemik. Alur pikir diagnostik ini dimulai dari penetapan Target, komparasi dengan Capaian, identifikasi *Gap*, hingga perumusan Permasalahan. Temuan-temuan inilah yang akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis di Bab IV. Adapun kerangka pikir analisis tersebut divisualisasikan dalam bagan berikut:



Gambar 3.5 Konseptual Alur Berpikir

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan

BAB IV

KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Evaluasi kinerja Semester II Tahun 2025 tidak hanya berhenti pada pemaparan capaian keberhasilan semata, melainkan menukik tajam pada identifikasi kendala yang diukur secara kuantitatif dan transparan. Pendekatan evaluasi yang jujur ini krusial untuk memetakan "lubang-lubang" kinerja yang mungkin terlewatkan jika hanya melihat angka agregat. Berdasarkan analisis komparasi yang ketat antara target perencanaan yang ditetapkan di awal tahun dan realisasi lapangan hingga triwulan ketiga, ditemukan sejumlah kesenjangan (*gap*) numerik yang signifikan. Celah ini teridentifikasi sebagai penghambat utama optimalisasi penurunan prevalensi stunting menuju angka target. Penjabaran kendala dan rencana tindak lanjut berikut disusun berdasarkan prinsip *evidence-based policy*, menihilkan asumsi kualitatif yang bias, guna memastikan setiap rupiah anggaran intervensi di sisa tahun berjalan dieksekusi tepat sasaran dan berdampak nyata.

4.1. Identifikasi Kendala dan Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasuruan saat ini terpolarisasi pada tiga isu krusial yang saling berkaitan dan membentuk efek domino. Ketiga isu tersebut adalah adanya residu sasaran layanan kesehatan ibu yang belum tuntas, disparitas data skrining kesehatan remaja di sektor hulu, serta tantangan manajerial terkait tekanan penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

A. Residu Sasaran Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Nifas

Kendala paling menonjol dan mendesak pada klaster intervensi spesifik terletak pada masih adanya kelompok sasaran prioritas yang belum tersentuh layanan standar secara paripurna. Data ini menjadi "lampu kuning" bagi Dinas Kesehatan. Berdasarkan data riil lapangan, dari total sasaran estimasi sebanyak 24.368 Ibu Hamil di Kabupaten Pasuruan, tercatat baru 19.962 orang (82%) yang mendapatkan layanan pemeriksaan kehamilan lengkap atau K6 (termasuk minimal 2 kali pemeriksaan dengan dokter dan USG). Statistik ini menyisakan residu masalah yang cukup serius, yakni adanya 4.406 Ibu Hamil yang kondisi kesehatannya tidak terpantau secara intensif sesuai standar medis. Kelompok residu ini merupakan *blind spot* atau titik buta yang sangat berbahaya, karena membuka peluang risiko

komplikasi medis seperti pre-eklampsia, anemia berat, atau gangguan janin yang tidak terdeteksi sejak dini, yang pada akhirnya berkontribusi pada kelahiran bayi stunting atau BBLR.

Kondisi yang tak kalah krusial terjadi pada layanan pasca persalinan. Dari total target 17.577 Ibu Nifas, terdapat selisih capaian kinerja sebesar 2.647 Ibu Nifas (15%) yang terkonfirmasi belum terlayani program Keluarga Berencana (KB) pasca salin. Ribuan ibu yang belum ber-KB ini dikategorikan sebagai titik rawan (*critical point*) dalam siklus stunting. Tanpa proteksi kontrasepsi segera setelah melahirkan, mereka berpotensi besar mengalami kehamilan berulang dengan jarak yang sangat dekat (kurang dari 3 tahun). Secara medis, jarak kehamilan yang terlalu rapat terbukti berkorelasi kuat dengan kejadian stunting pada anak berikutnya akibat rahim ibu belum pulih sempurna dan cadangan nutrisi tubuh ibu belum kembali normal. Selain itu, upaya pemulihan gizi juga masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan segera. Dari 1.864 sasaran Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang terdata, masih terdapat 291 orang (15,7%) yang status gizinya belum pulih atau belum tuntas penanganannya, yang berarti janin yang dikandungnya masih berada dalam risiko tinggi mengalami hambatan pertumbuhan.

B. Disparitas Data Skrining Remaja Putri di Hulu

Bergeser ke sektor hulu, upaya pencegahan anemia pada remaja putri menghadapi tantangan ketimpangan data antara output logistik (distribusi obat) dan output klinis (skrining kesehatan). Meskipun distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) tercatat sangat sukses menjangkau 98% sasaran, namun data skrining kadar Hemoglobin (Hb) menunjukkan angka yang lebih rendah, menciptakan disparitas yang membingungkan. Dari total populasi 72.336 Remaja Putri di Kabupaten Pasuruan, teridentifikasi sebanyak 8.480 remaja yang belum menjalani skrining Hb (capaian skrining baru menyentuh 63.856 atau 88,27%). Ketiadaan data status anemia pada 8.480 remaja ini menyulitkan tim medis untuk mengukur efektivitas biologis dari program TTD yang dijalankan; apakah tablet tersebut benar-benar diminum dan menaikkan kadar Hb, atau hanya didistribusikan saja. Tanpa data Hb yang valid, daerah kehilangan peta deteksi dini terhadap ribuan calon pengantin masa depan yang berisiko melahirkan bayi stunting, menjadikan intervensi di sektor ini kurang presisi.

C. Tekanan Akselerasi Serapan Anggaran

Dari sisi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, manajemen keuangan daerah dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) untuk menjamin kualitas output program. Berdasarkan data evaluasi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalokasikan dukungan anggaran intervensi stunting yang signifikan sebesar Rp 182.219.203.998. Hingga posisi November, realisasi pembayaran telah mencapai Rp 124.303.649.350.

Adapun alokasi dana yang tersedia sebesar Rp 57,9 Miliar saat ini dipersiapkan untuk penyelesaian pembayaran termin akhir (*final payment*) atas berbagai program fisik dan non-fisik yang telah rampung atau sedang dalam tahap penyelesaian di lapangan. Pola realisasi ini menunjukkan mekanisme kontrol kualitas, di mana pembayaran dilakukan berbasis progres fisik (*payment by progress*). Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama OPD teknis terus mengawal proses administrasi ini secara intensif untuk memastikan seluruh kewajiban pembayaran tuntas tepat waktu di akhir tahun buku, sehingga serapan anggaran optimal dan berdampak positif pada penilaian kinerja insentif fiskal di periode mendatang.

4.2. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Merespons temuan data kendala dan analisis gap di atas, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memutuskan untuk mengambil langkah taktis dengan menetapkan strategi intervensi kilat (*crash program*) di sisa waktu tahun anggaran 2025. Strategi ini didukung penuh oleh pemanfaatan Dana Insentif Fiskal Kinerja Stunting sebesar Rp 7.147.236.000 yang baru diterima. Seluruh sumber daya, baik manusia maupun finansial, difokuskan secara tajam untuk "menutup lubang" kinerja pada indikator-indikator yang masih merah (belum mencapai target).

A. Operasi Sisir Sasaran (Sweeping) dan Intervensi Presisi

Dinas Kesehatan akan berkolaborasi erat dengan Dinas P3AP2KB untuk menggerakkan seluruh kekuatan lini lapangan, meliputi Bidan Desa, Petugas Lapangan KB (PLKB), dan ribuan anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK). Mereka ditugaskan melakukan kunjungan rumah (*door-to-door*) secara masif dalam operasi *sweeping* sasaran. Fokus operasi ini sangat spesifik, yaitu menemukan dan melayani

4.406 Ibu Hamil yang belum tuntas pemeriksaan K6 dan 2.647 Ibu Nifas yang belum ber-KB. Data *by name by address* dari residu sasaran ini akan diverifikasi ulang (*cross-check*) di lapangan. Tujuannya adalah memastikan apakah mereka benar-benar belum terlayani, pindah domisili, atau ada kendala lain. Tim lapangan wajib memastikan ibu hamil segera dirujuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan dokter dan USG, serta memfasilitasi ibu nifas untuk segera mendapatkan layanan KB, utamanya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Untuk mendukung mobilitas tinggi ini, dukungan anggaran Insentif Fiskal dialokasikan secara khusus: Rp 3,2 Miliar di Dinas Kesehatan dan Rp 340 Juta di Dinas P3AP2KB. Dana ini digunakan untuk biaya operasional tim lapangan, pengadaan alat kontrasepsi darurat, dan biaya rujukan, guna menjamin prinsip *no one left behind* benar-benar terwujud di akhir tahun.

B. Eskalasi Penanganan Gizi pada Kelompok Risiko Tinggi

Selain penyisiran sasaran, fokus intervensi gizi diarahkan secara agresif dan presisi kepada kelompok yang paling rentan, yaitu 291 Ibu Hamil KEK yang belum pulih dan 3.962 Balita Stunting yang telah terdata. Menggunakan pos belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Dana Insentif Fiskal, Dinas Kesehatan akan mendistribusikan paket intervensi gizi berupa Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita *stunting* dengan masalah medis, serta pangan lokal tinggi protein hewani bagi ibu hamil KEK. Berbeda dengan program reguler, mekanisme distribusi kali ini disertai protokol pengawasan ketat (*supervised feeding*). Setiap paket makanan yang diberikan wajib dipantau konsumsinya setiap hari oleh kader pendamping untuk memastikan makanan tersebut benar-benar dimakan oleh sasaran (tidak dibagi ke anggota keluarga lain). Lebih jauh lagi, bagi balita stunting yang tidak menunjukkan kenaikan berat badan adekuat setelah 14 hari intervensi pakan intensif (*red flag*), protokol rujukan ke RSUD akan diaktifkan segera. Balita tersebut akan mendapatkan penanganan komprehensif dari Dokter Spesialis Anak untuk menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit penyerta (*co-morbidity*) yang tersembunyi, seperti TBC Paru, anemia defisiensi besi, atau kelainan jantung bawaan yang seringkali menjadi penyebab anak gagal tumbuh.

C. Percepatan Eksekusi Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berkomitmen mengawal realisasi anggaran pada Semester II Tahun 2025 untuk memastikan setiap rupiah memberikan dampak nyata bagi penurunan stunting (*value for money*). Koordinasi intensif dilakukan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Sumber Daya Air (SDA), guna memastikan seluruh pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih dapat diselesaikan tepat waktu (*on schedule*) dengan tetap mengutamakan standar kualitas bangunan.

Proses administrasi pembayaran termin kepada pihak ketiga dikelola secara tertib dan bertahap sesuai progres fisik di lapangan untuk menjamin akuntabilitas keuangan. Secara simultan, akselerasi belanja barang yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal seperti alat kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan bantuan sosial di Dinas Sosial dilaksanakan melalui mekanisme *e-katalog* lokal. Strategi ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan, sehingga manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat sasaran sebelum berakhirnya tahun anggaran 2025.

4.3. Penetapan Wilayah Prioritas (Lokus) Kecamatan Intervensi Tahun 2026

Penetapan wilayah prioritas atau Lokasi Fokus (Lokus) merupakan langkah strategis dalam manajemen penanggulangan stunting yang efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyadari bahwa intervensi yang dilakukan secara sporadis tanpa pemetaan wilayah yang jelas seringkali kurang memberikan daya ungkit yang optimal terhadap penurunan angka prevalensi secara agregat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis kewilayahan untuk mengonsolidasikan sumber daya anggaran dan program dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Proses penetapan Lokus untuk perencanaan Tahun Anggaran 2026 dilakukan melalui analisis multivariat yang ketat. Basis data utama yang digunakan adalah hasil pengukuran *real-time* E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) periode Bulan Timbang Agustus 2025, serta data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) hasil pendataan BKKBN. Indikator penentuan tidak hanya melihat tingginya prevalensi (persentase) stunting di suatu desa, tetapi juga

mempertimbangkan jumlah kasus absolut (jumlah jiwa), serta indikator layanan sensitif seperti ketersediaan air bersih layak, kepemilikan jamban sehat, dan kondisi rumah tidak layak huni.

Berdasarkan analisis bobot masalah tersebut dan telah disahkan melalui Keputusan Bupati Pasuruan tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan konsentrasi intervensi pada 8 (delapan) Kecamatan dan 25 (dua puluh lima) Desa.

Wilayah-wilayah ini akan menjadi "medan operasi utama" konvergensi program, di mana intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan sensitif (sektor non-kesehatan) akan dikeroyok secara terpadu. Berikut adalah rincian data sebaran wilayah Lokus Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2026:

Tabel 3.2 Sebaran Wilayah Lokus Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa Prioritas (Lokus)
1	Kraton	7 Desa	1. Tambaksari 2. Klampisrejo 3. Slambrit 4. Mulyorejo 5. Jeruk 6. Karanganyar 7. Curahdukuh
2	Wonorejo	4 Desa	1. Karang Asem 2. Karangjatianyar 3. Kluwut 4. Karangmenggah
3	Grati	4 Desa	1. Rebalas 2. Plososari 3. Sumber Dawesari 4. Sumberagung
4	Winongan	3 Desa	1. Karangtengah 2. Jaladri

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa Prioritas (Lokus)
			3. Sumberejo
5	Pasrepan	3 Desa	1. Petung 2. Lemahbang 3. Mangguan
6	Puspo	2 Desa	1. Pusung Malang 2. Palangsari
7	Bangil	1 Desa	1. Masangan
8	Kejayan	1 Desa	1. Kurung

Sumber: SK Bupati Pasuruan tentang Penetapan Lokus Stunting Tahun 2026

Penetapan 25 desa di 8 kecamatan ini membawa konsekuensi logis pada perencanaan pembangunan tahun 2026. Seluruh OPD pengampu wajib memprioritaskan alokasi anggarannya ke wilayah-wilayah tersebut sesuai tupoksi masing-masing.

Dinas Kesehatan akan memfokuskan pemantauan pertumbuhan balita, pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan tata laksana gizi buruk di wilayah ini. Sementara itu, Dinas Perkim dan Dinas SDA akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur sanitasi (jambanisasi) dan penyediaan air bersih di desa-desa tersebut untuk memutus mata rantai infeksi berulang. Selain itu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) di 25 desa ini akan mendapatkan penguatan kapasitas khusus agar pendampingan terhadap Calon Pengantin, Ibu Hamil, dan Baduta dapat berjalan lebih intensif, memastikan target *Zero New Stunting* dapat tercapai di wilayah prioritas ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis situasi yang komprehensif, rekapitulasi capaian kinerja, serta evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting Semester II Tahun 2025 di Kabupaten Pasuruan, dapat ditarik beberapa kesimpulan strategis yang menjadi intisari kinerja daerah sebagai berikut:

A. Tren Penurunan Prevalensi yang Positif dan Signifikan

Kinerja penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil yang sangat progresif dan menggembirakan. Hal ini terkonfirmasi secara valid melalui data pencatatan rutin Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) pada Bulan Timbang Agustus 2025, yang mencatatkan angka prevalensi stunting di posisi terendah, yakni sebesar 3,91%. Capaian impresif ini telah melampaui target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar 14%, serta menunjukkan konsistensi tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun masih terdapat tantangan berupa disparitas data yang cukup lebar jika disandingkan dengan hasil survei makro (Survei Status Gizi Indonesia/SSGI), namun konsistensi data E-PPGBM yang berbasis sensus (populasi) memberikan keyakinan bahwa intervensi spesifik dan sensitif yang dilakukan Pemerintah Daerah telah berjalan efektif. Keberhasilan menekan angka hingga di bawah 4% mengindikasikan bahwa program penanganan telah berhasil menyasar kelompok risiko tinggi secara presisi, meminimalisir kasus baru (*new stunting*), serta memperbaiki status gizi balita *existing*.

B. Efektivitas Pemanfaatan Insentif Fiskal sebagai Stimulus

Kabupaten Pasuruan berhasil membuktikan kualitas kinerja manajerial dan operasionalnya dengan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting sebesar Rp 7,14 Miliar. Pemanfaatan dana insentif ini tidak sekadar dibelanjakan, melainkan telah dioptimalkan secara strategis sebagai instrumen untuk menambal celah (*filling the gap*) kebutuhan program krusial yang sebelumnya belum terakomodasi secara penuh

dalam APBD murni. Alokasi dana ini terbukti efektif dalam mengakselerasi penyediaan sarana sanitasi dasar di desa kumuh, pemenuhan alat antropometri standar di seluruh Posyandu guna menjamin validitas data ukur, serta perluasan cakupan bantuan sosial pangan bagi keluarga rentan stunting. Dengan demikian, insentif fiskal ini berfungsi sebagai daya ungkit (*leverage*) yang memperkuat kapasitas daerah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas di sisa tahun anggaran berjalan.

C. Penguatan Konvergensi Lintas Sektor yang Solid

Evaluasi Semester II Tahun 2025 menegaskan terjadinya pergeseran paradigma penanganan stunting yang positif, di mana program ini tidak lagi didominasi atau dianggap sebagai tanggung jawab sektor kesehatan semata. Terlihat adanya kontribusi yang sangat signifikan dan terukur dari sektor non-kesehatan (intervensi sensitif). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Sumber Daya Air (SDA) memainkan peran vital dalam penyediaan infrastruktur dasar berupa akses air bersih dan sanitasi layak, yang menjadi fondasi pencegahan penyakit infeksi. Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan sukses menjaga ketersediaan akses pangan bergizi melalui program kemandirian pangan keluarga dan kampanye Gemarikan. Sinergi lintas sektor ini semakin diperkuat dengan penetapan 25 Desa Lokus Prioritas untuk Tahun 2026. Penetapan lokus ini menjadi jaminan bahwa intervensi terintegrasi akan terus berlanjut secara fokus dan berkelanjutan, menyasar wilayah yang paling membutuhkan perhatian multipihak.

D. Akuntabilitas Keuangan dan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam aspek tata kelola anggaran, meskipun Pemerintah Kabupaten Pasuruan dihadapkan pada tantangan klasik berupa tekanan administrasi pembayaran yang menumpuk di akhir tahun anggaran, komitmen terhadap prinsip *Good Governance* tetap terjaga kokoh. Pemerintah daerah menerapkan strategi percepatan pembayaran termin akhir (*final payment*) yang ketat berbasis progres fisik riil di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan serapan anggaran dapat maksimal (mendekati 100%) tanpa mengorbankan kualitas output pekerjaan, baik itu pekerjaan konstruksi fisik maupun pengadaan barang jasa. Mekanisme pengawasan berjenjang diaktifkan untuk memitigasi risiko penyimpangan, memastikan bahwa setiap rupiah APBD yang

dibelanjakan untuk program stunting dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sasaran.

5.2. Rekomendasi

Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di tahun mendatang serta mengatasi berbagai kendala struktural maupun operasional yang ditemui pada Semester II Tahun 2025, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pasuruan merekomendasikan langkah-langkah tindak lanjut strategis sebagai berikut:

A. Validasi dan Audit Kualitas Data (Data Quality Audit)

Merespons adanya fenomena kesenjangan (*gap*) statistik yang sangat ekstrem antara hasil survei makro SSGI (26,10%) dengan data pencatatan rutin E-PPGBM (3,91%), TPPS merekomendasikan pelaksanaan langkah korektif berupa Validasi dan Audit Kualitas Data secara menyeluruh. Disparitas angka yang terlalu lebar ini berpotensi menimbulkan bias kebijakan, sehingga diperlukan pelaksanaan Uji Petik Independen atau validasi berjenjang yang melibatkan pihak ketiga (akademisi atau organisasi profesi kesehatan). Langkah ini difokuskan untuk mengaudit dua aspek utama, yaitu kalibrasi alat ukur antropometri di seluruh Posyandu untuk memastikan akurasi alat, serta evaluasi keterampilan kader dalam melakukan pengukuran panjang dan tinggi badan balita. Hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa angka prevalensi 3,91% tersebut adalah potret riil kondisi gizi balita di lapangan, dan bukan merupakan hasil dari *under-reporting*, kesalahan teknis pengukuran, atau *human error*. Dengan data yang terverifikasi validitasnya, maka kebijakan intervensi yang diambil pemerintah daerah akan benar-benar berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan tepat sasaran, serta mampu menjawab keraguan publik terhadap anomali data yang ada.

B. Transformasi Pola Belanja Anggaran (Spending Reform)

Belajar dari evaluasi penyerapan anggaran tahun berjalan, direkomendasikan reformasi tata kelola keuangan melalui Transformasi Pola Belanja Anggaran untuk Tahun Anggaran 2026. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu, khususnya dinas teknis yang menangani belanja modal fisik konstruksi seperti Dinas Perkim dan Dinas SDA, diwajibkan untuk melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa melalui mekanisme lelang dini di Triwulan I (Januari-Maret). Strategi ini

mutlak diperlukan untuk menghindari pola klasik penumpukan pencairan anggaran dan pelaksanaan proyek di bulan Desember (akhir tahun), yang seringkali berdampak buruk pada kualitas bangunan fisik akibat pengerjaan yang terburu-buru serta meningkatkan risiko terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi. Manajemen *cash flow* harus diperbaiki dengan menetapkan target realisasi keuangan yang terdistribusi secara proporsional di setiap triwulan, sehingga manfaat pembangunan, baik itu jamban sehat maupun sarana air bersih, dapat segera dinikmati oleh masyarakat sasaran di pertengahan tahun tanpa harus menunggu akhir tahun anggaran.

C. Intensifikasi Intervensi di Wilayah Lokus 2026

Fokus intervensi pada tahun mendatang tidak boleh lagi menyebar tanpa arah, melainkan harus diarahkan secara masif, terpusat, dan terintegrasi ("keroyokan") ke 8 Kecamatan dan 25 Desa Lokus Prioritas yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. TPPS disarankan untuk menyusun dokumen teknis berupa "Matriks Rencana Aksi Lokus" yang bersifat mengikat, di mana matriks tersebut mewajibkan setiap OPD anggota TPPS untuk memiliki setidaknya satu kegiatan konkret dan terukur di desa-desa lokus tersebut. Strategi konvergensi ini bertujuan untuk memastikan terjadinya penurunan angka stunting yang signifikan di kantong-kantong wilayah prioritas tersebut. Dengan membanjiri desa lokus dengan berbagai intervensi—mulai dari perbaikan sanitasi, bantuan pangan, layanan kesehatan, hingga edukasi pola asuh—secara simultan, diharapkan faktor determinan stunting di wilayah tersebut dapat diputus secara total, sehingga desa tersebut dapat segera keluar dari status zona merah stunting.

D. Penguatan Pendampingan Keluarga dan Kapasitas TPK

Sebagai garda terdepan perubahan perilaku, peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) harus dioptimalkan melalui dukungan sumber daya yang memadai. Direkomendasikan adanya alokasi anggaran khusus untuk penyediaan biaya operasional berupa pulsa atau kuota internet bagi para kader, mengingat pelaporan kinerja berbasis aplikasi Elsimil membutuhkan koneksi data yang stabil. Selain dukungan teknis, peningkatan kapasitas SDM TPK juga harus dilakukan melalui pelatihan intensif mengenai komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*)

dan teknik konseling persuasif. Keterampilan *soft skill* ini sangat krusial agar kader mampu mendekati keluarga sasaran secara efektif, mengatasi resistensi budaya, dan memastikan kepatuhan minum TTD atau pola asuh yang baik. Dengan dukungan data pelaporan yang *real-time* di Elsimil serta pendampingan yang berkualitas terhadap Calon Pengantin (Catin) dan Ibu Hamil, target daerah untuk mewujudkan *Zero New Stunting* atau tidak adanya balita stunting baru di Kabupaten Pasuruan dapat terealisasi secara nyata.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan
dan Pengembangan Manusia

HERU MAULANA, S.Sos.